



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2005 – 2025**



**TANJUNG SELOR  
TAHUN 2007**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	I	-	1
	1.1. Latar Belakang .....	I	-	1
	1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	I	-	3
	1.2.1. Maksud .....	I	-	4
	1.2.2. Tujuan .....	I	-	4
	1.2.3. Sasaran .....	I	-	5
	1.3. Landasan Hukum .....	I	-	5
	1.4. Sistematika Penulisan .....	I	-	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b> .....	II	-	1
	2.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan .....	II	-	4
	2.2. Pendidikan .....	II	-	9
	2.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) .....	II	-	13
	2.4. Kesehatan dan Keluarga Berencana .....	II	-	14
	2.5. Peranan Perempuan .....	II	-	18
	2.6. Kesejahteraan Sosial .....	II	-	20
	2.7. Agama .....	II	-	21
	2.8. Pemuda dan Olah Raga .....	II	-	22
	2.9. Perekonomian Daerah .....	II	-	24
	2.10. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura .....	II	-	33
	2.11. Perkebunan .....	II	-	37
	2.12. Kehutanan .....	II	-	38
	2.13. Peternakan .....	II	-	40
	2.14. Perikanan dan Kelautan .....	II	-	41
	2.15. Sumber Daya Alam .....	II	-	45
	2.16. Pariwisata .....	II	-	49
	2.17. Tata Guna Lahan .....	II	-	52
	2.18. Lingkungan Hidup .....	II	-	56
	2.19. Perhubungan dan Transportasi .....	II	-	58
	2.20. Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi .....	II	-	65
	2.21. Pengairan .....	II	-	68

2.22. Air Bersih .....	II – 69
2.23. Energi Listrik .....	II – 71
2.24. Pemerintahan .....	II – 73
2.25. Hukum .....	II – 75
2.26. Pos, Telekomunikasi dan Media Massa .....	II – 77
2.27. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat .....	II – 78
<b>BAB III VISI DAN MISI DAERAH .....</b>	<b>III – 1</b>
3.1. Visi .....	III – 1
3.2. Misi .....	III – 3
3.3. Nilai – Nilai .....	III – 5
<b>BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV – 1</b>
4.1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas .....	IV – 1
4.1.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan .....	IV – 1
4.1.2. Pendidikan .....	IV – 2
4.1.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) .....	IV – 5
4.1.4. Kesehatan dan Keluarga Berencana .....	IV – 6
4.1.5. Peranan Perempuan .....	IV – 7
4.1.6. Kesejahteraan Sosial .....	IV – 8
4.1.7. Agama .....	IV – 9
4.1.8. Pemuda dan Olah Raga .....	IV – 9
4.2. Pembangunan Ekonomi Dalam Arti Luas .....	IV – 10
4.2.1. Perekonomian Daerah .....	IV – 10
4.2.2. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura .....	IV – 11
4.2.3. Perkebunan .....	IV – 12
4.2.4. Kehutanan .....	IV – 13
4.2.5. Peternakan .....	IV – 14
4.2.6. Perikanan dan Kelautan .....	IV – 15
4.2.7. Sumber Daya Alam .....	IV – 16
4.2.8. Pariwisata .....	IV – 17
4.3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur .....	IV – 18
4.3.1. Tata Guna Lahan .....	IV – 18

4.3.2.	Lingkungan Hidup .....	IV – 19
4.3.3.	Perhubungan dan Transportasi .....	IV – 20
4.3.4.	Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi .....	IV – 21
4.3.5.	Pengairan .....	IV – 22
4.3.6.	Air Bersih .....	IV – 22
4.3.7.	Energi Listrik .....	IV – 23
4.4.	Pemerintah Yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Demokratis ....	IV – 24
4.4.1.	Pemerintahan .....	IV – 24
4.4.2.	Hukum .....	IV – 25
4.4.3.	Pos, Telekomunikasi dan Media Massa .....	IV – 25
4.4.4.	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat .....	IV – 26
4.5.	Tahapan Pelaksanaan dan Skala Prioritas .....	IV – 27
4.5.1.	RPJM Pertama (2005 – 2010) .....	IV – 29
4.5.2.	RPJM Kedua (2010 – 2015) .....	IV – 36
4.5.3.	RPJM Ketiga (2015 – 2020) .....	IV – 42
4.5.4.	RPJM Keempat (2020 – 2025) .....	IV – 50

<b>BAB V</b>	<b>PENETAPAN FUNGSI DAN PERAN TIAP SUB WILAYAH PEMBANGUNAN</b> .....	<b>V – 1</b>
5.1.	Kecamatan Tanjung Selor .....	V – 2
5.2.	Kecamatan Tanjung Palas .....	V – 2
5.3.	Kecamatan Tanjung Palas Tengah .....	V – 3
5.4.	Kecamatan Tanjung Palas Barat .....	V – 4
5.5.	Kecamatan Tanjung Palas Utara .....	V – 4
5.6.	Kecamatan Tanjung Palas Timur .....	V – 5
5.7.	Kecamatan Sesayap .....	V – 5
5.8.	Kecamatan Sesayap Hilir .....	V – 6
5.9.	Kecamatan Peso .....	V – 6
5.10.	Kecamatan Peso hilir .....	V – 7
5.11.	Kecamatan Tana Lia .....	V – 7
5.12.	Kecamatan Bunyu .....	V – 8
5.13.	Kecamatan Sekatak .....	V – 8
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>VI – 1</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan pemerintah dalam mengelola pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut berakibat sangat luas terhadap bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di setiap daerah Kabupaten/Kota sebagai wilayah yang memiliki kewenangan otonomi. Oleh sebab itu kemampuan dalam menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada pada setiap Daerah akan merupakan faktor kunci sukses dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Dalam kaitan tersebut dibutuhkan suatu perencanaan menyeluruh dan jangka panjang untuk pemanfaatan segala potensi daerah yang selanjutnya dituangkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu kepada RPJP Nasional. Selain itu perencanaan pembangunan jangka panjang daerah juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam wilayah Kabupaten Bulungan yang



ditetapkan tanggal 15 Agustus 2002, maka Kabupaten Bulungan terdiri atas 13 (tiga belas) Kecamatan, terdiri dari 6 Kelurahan dan 97 desa.

Dengan pembentukan beberapa kecamatan baru ini diharapkan pelayanan publik lebih optimal dan pembangunan wilayah akan makin dipercepat dalam rangka meminimalisir diskrepansi antar wilayah.

Sejalan dengan dinamika dan perkembangan dalam masyarakat maka pada dasarnya Pemerintah Daerah berupaya untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat terhadap :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan (good governance).
2. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini.
3. Mewujudkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang sinergi dengan kebijakan nasional.
4. Kemampuan merumuskan pilihan, tujuan (alternatif) dan sasaran pengembangan daerah, menemu-kendalikan permasalahan dan merumuskan tujuan serta menetapkan sasaran secara tepat dalam mengembangkannya.

Posisi strategis Kabupaten Bulungan sebagai calon Ibukota Propinsi Kaltara yang berada pada jalur laut, darat maupun udara yang menghubungkan dengan wilayah Selatan Kaltim serta Negara Bagian Sabah Malaysia Timur, memberikan dampak positif terhadap dinamika kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, dan kehidupan kemasyarakatan lainnya. Lingkungan strategis baik secara internal maupun eksternal akan menjadi hal yang berpengaruh di dalam tata kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kabupaten Bulungan, semakin dituntut untuk lebih demokratis dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan tuntutan otonomi daerah.



Dalam rangka mengantisipasi dan merespon tuntutan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tersebut di atas, maka ditetapkan suatu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan koridor arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, berdasarkan aspirasi dan komitmen seluruh *stakeholders* pembangunan Kabupaten Bulungan.

Sejalan dengan amanat pembangunan yang dituangkan dalam RPJP Nasional, maka tujuan pembangunan Kabupaten Bulungan adalah :

1. Memantapkan perwujudan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah (*Capacity Building*) agar terselenggara pemerintah yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif dan efisien serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat.
2. Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi daerah perkotaan dan pedesaan, pengembangan permukiman serta pengelolaan penataan ruang kota, peningkatan ekonomi daerah dan penguatan landasan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Tujuan pembangunan Kabupaten Bulungan tersebut diatas akan menjadi rujukan dalam proses dan kegiatan penyelenggaraan, dimana tahapan-tahapan kegiatan tahunan akan merupakan jawaban atas tuntutan dan dinamika perkembangan daerah yang dapat diukur melalui evaluasi kinerja pembangunan daerah setiap tahunnya.

## **1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 – 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan yang disusun sebagai acuan pokok bagi penyelenggaraan



pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, khususnya dalam penyusunan RPJM serta menentukan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya.

### **1.2.1. Maksud**

RPJP Daerah Kabupaten Bulungan 2005 – 2025 yang memuat tentang visi, misi dan arah kebijakan bagi Kabupaten Bulungan untuk periode 20 (dua puluh tahun) ke depan dimaksudkan sebagai koridor dan acuan dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM daerah.

### **1.2.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Kabupaten Bulungan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi, antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bulungan.
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Bulungan yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- f. Menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan per lima tahunan.



### 1.2.3. Sasaran

Sasaran Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang meliputi :

- a. Tersedianya acuan bagi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) Kabupaten Bulungan dalam menentukan agenda pembangunan daerah lima tahunan dan tahunan yang akan dibiayai dari APBD;
- b. Tersedianya Rencana Pembangunan Daerah yang berkelanjutan secara efektif dan efisien yang dituangkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran;
- c. Tersedianya tolak ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja pembangunan daerah.

### 1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2006 – 2025 adalah :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- b. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 TLN Nomor 3896);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam wilayah Kabupaten Bulungan.

Selain rujukan terhadap seluruh produk hukum diatas, RPJPD Daerah ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun oleh Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat. Rujukan dimaksud diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijakan maupun gerak langkah operasional tahunan dan lima tahunan daerah, tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas sehingga mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan dinamika masyarakat.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulungan tahun 2006 – 2025 ini disusun sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan.** Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Landasan Penyusunan RPJPD dan Sistematika Penulisan.
- BAB II. Gambaran Umum.** Pada bab ini berisi tentang kondisi saat ini, kendala, analisis dan prediksi pembangunan Kabupaten Bulungan.
- BAB III. Visi dan Misi Daerah.** Pada bab ini berisi tentang Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh segenap masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian terutama bidang agroindustri yang unggul serta didukung oleh Sumber Manusia yang tangguh.
- BAB IV. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.** Pada bab ini berisi tentang strategi, arah kebijakan dan tahapan pelaksanaan serta skala prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bulungan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.



**BAB V. Penetapan Fungsi dan Peran tiap Sub Wilayah Pembangunan.** Pada bab ini berisi tentang potensi dasar, potensi penunjang dan kendalanya serta arah pengembangan setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan.

**BAB VI. Penutup.** Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan Umum RPJPD Kabupaten Bulungan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan masyarakat maka Kabupaten Bulungan pada tahun 1997 memekarkan wilayahnya dengan meningkatkan status ***Kotif Tarakan menjadi Kotamadya Tarakan*** berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997.

Pada bulan Oktober 1999 Kabupaten Bulungan dimekarkan kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Malinau dan Kabupaten Nunukan. Sehingga dengan adanya pemekaran tersebut luas wilayah Kabupaten Bulungan hanya tersisa seluas 18.010,50 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 15.587,90 Km<sup>2</sup> dan perairan 2.422,60 Km<sup>2</sup>. Selain itu berbagai potensi ekonomi yang selama ini menjadi unggulan masuk dalam wilayah kabupaten pemekaran.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 15 Agustus 2002, dilakukan pemekaran wilayah kecamatan, yang sebelumnya dari 5 kecamatan menjadi 13 kecamatan, terdiri atas 6 Kelurahan dan 97 Desa. Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya analisis dan prediksi kondisi umum daerah menggunakan data setelah pemekaran wilayah tersebut.

Kabupaten Bulungan terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya pada posisi 2<sup>o</sup>06' 0,5" – 3<sup>o</sup>45' 10" Lintang Utara dan 116<sup>o</sup>20' 45" - 118<sup>o</sup>00' 00" Bujur Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Disisi Utara berdampingan dengan Kabupaten Nunukan dan memiliki aksesibilitas ke Negara Bagian Sabah (Malaysia Timur), Bandar Sri Begawan (Brunei) dan Mindanao (Filipina Selatan).
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau dan mempunyai aksesibilitas ke Negara Bagian Sarawak.
- Dibagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau dan memiliki aksesibilitas ke Kutim, Bontang, Samarinda, Balikpapan dan terus ke Makasar, Surabaya, Denpasar dan Mataram.



- Di sebelah timur berseberangan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan serta mempunyai aksesibilitas ke Palu, Tolitoli, Buol, Gorontalo, Bitung dan Manado.

Wilayah Kabupaten Bulungan terbagi atas 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu dataran, perbukitan rendah, dan perbukitan bergelombang. Berdasarkan fisiografis dan pembagian cekungan atau tinggian, secara umum daerah Kalimantan Timur terdiri dari cekungan Kutai, Cekungan Tarakan, dan Tinggian Mangkaliat. Adapun tatanan stratigrafis wilayahnya, meliputi : Endapan Aluvial, Formasi Sumbat dan Retas, Formasi : Sajau, Sinjin, Domaring, Tabung, Batuan Terobosan, Jelai, Birang, Sembakung, dan Formasi Bengara.

Topografi wilayah yang dimiliki relatif datar hingga berbukit-bukit. Perbukitan terjal terhampar di sebelah Utara bagian barat (Kecamatan Sesayap), perbukitan sedang terdapat di bagian tengah dan dataran bergelombang landai ditemukan di bagian timur memanjang hingga pantai sebelah timur. Sedangkan perbukitan di sebelah selatan bagian tengah berketinggian berkisar 500-1.500 mdpl. Semakin ke barat daya (Kecamatan Peso Hilir dan Peso) ketinggian kian meningkat (curam) hingga mencapai diatas 300 mdpl, dengan kemiringan berkisar 16-25 persen, 26-40 persen dan 41-60 persen. Sebaliknya, makin ke timur ketinggian wilayah semakin rendah (landai) hingga kurang dari 2 mdpl, dengan kemiringan lahan kurang dari 2 % dan 2-8 persen. Kondisi topografi seperti ini pada umumnya potensial bagi pengembangan pertanian, baik untuk tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, maupun perkebunan. Dalam hal pengembangan jaringan jalan dan infrastruktur wilayah lainnya, ke arah timur lebih mudah dibandingkan ke arah barat dan barat daya.

Sementara itu, kondisi geologi atau formasi batuan Kabupaten Bulungan terdiri dari formasi batuan serpih, kristalin, batu sabak, batu gamping, steril formalin, alluvium, paleogers dan sebagainya. Formasi ini mempunyai daya dukung lemah sampai sedang. Batuan induk pembentuk tanah di Kabupaten Bulungan pada umumnya merupakan batuan endapan, dengan bahan endapan bervariasi, dimana endapan yang paling banyak adalah batu pasir, lanau batu lumpur dan konglomerat. Bahan endapan laut dan endapan sungai



banyak ditemukan di sepanjang pesisir dan pulau-pulau dekat muara sungai. Bahan gambut dapat pula dijumpai di bagian utara (Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir).

Dengan formasi batuan seperti di atas, maka jenis tanah di Kabupaten Bulungan didominasi oleh jenis *latosol* (inceptisol) dan *litosol* di bagian tengah ke arah timur, *aluvial* (entisol) di daerah-daerah landai ke arah utara Sungai Kayan serta *organosol*, *podsolik* dan *podsolik* merah kuning (ultisol) di daerah-daerah landai ke arah selatan Sungai Kayan.

Kondisi hidrologi di Kabupaten Bulungan sangat dipengaruhi oleh banyaknya sungai yang mengalir di wilayah ini. Ada dua sungai besar, yaitu Sungai Kayan (576 km, mengalir hingga ke Kabupaten Malinau) dan Sungai Sesayap (278 km). Sedangkan anak-anak sungai seperti Sungai Pimping (43 km), Sungai Bandan (70 km), Sungai Sekatak (72 km), Sungai Jelarai (30 km), Sungai Sajau, Sungai Binja, sungai Selor dan Sungai Linuang Kayan (37 km).

Sungai-sungai tersebut merupakan sumber air permukaan yang berperan sangat penting bagi irigasi, sumber air rumah tangga dan industri, transportasi, budidaya perikanan dan bahkan berpotensi untuk pengembangan PLTA. Sumber air lainnya adalah sumber air bawah tanah yang berasal dari siklus hidrologi (banyak di eksploitasi pada kedalaman 25-100 meter hampir di setiap kecamatan) serta sumber air laut yang berguna untuk kegiatan penangkapan ikan, budidaya laut (*marine culture*) dan transportasi laut.

Kabupaten Bulungan pada umumnya, dan Tanjung Selor pada khususnya mengalami musim hujan sepanjang tahun dengan hari hujan selama 237 hari. Untuk penyinaran matahari rata-rata 52,9 persen, terendah 39,6 persen dan tertinggi 73,3 persen. Secara umum Kabupaten Bulungan beriklim sedang, dengan rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7 C – 34,5 C, sedangkan curah hujan selama tahun 2004 di Kabupaten Bulungan pada umumnya dan Tanjung Selor pada khususnya berkisar antara 15,6 mm sampai 372,7 mm. Kelembaban udara relatif tinggi berkisar antara 78,9 persen sampai dengan 86,0 persen dengan rata-rata selama tahun 2004 adalah 84,2 persen.



## 2.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk mempunyai kedudukan yang sentral dalam pembangunan daerah, yaitu kedudukannya sebagai subyek pembangunan, sekaligus juga memiliki kedudukan sebagai obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan diharapkan dengan jumlah penduduk yang besar dapat memberikan keuntungan ekonomis, diantaranya biaya tenaga kerja yang relatif murah dan terjaminnya ketersediaan tenaga kerja. Kedudukan kedua penduduk sebagai obyek pembangunan, hal ini mengandung arti bahwa segala upaya yang dilakukan oleh pembangunan sarasannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan jika tidak disertai dengan upaya peningkatan derajat kualitas penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2005 tercatat sebesar 107.238 jiwa atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 98.310 jiwa dengan kenaikan sebesar 9,08%. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulungan setiap tahun adalah 4,22%.

Pola persebaran penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah, kepadatannya adalah berkisar antara 1,22 jiwa/km<sup>2</sup> (Kecamatan Tana Lia) sampai 49,70 jiwa/km<sup>2</sup> (Kecamatan Bunyu).

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ini terlihat dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah 112,67, ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 113 laki-laki, dari jumlah tersebut sebagian besar mata pencaharian di sektor pertanian yaitu 68,84%, selanjutnya adalah sektor perdagangan 9,47% dan sektor jasa 8,45%.



**Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk, Rata-Rata Penduduk Per Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2005.**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jumlah Desa	Jumlah Keluarga	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Rata-rata Penduduk /Keluarga
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Peso	3 142,79	17,45	10	1.108	4.129	1,31	3,73
2. Peso Hilir	1.639,71	9,10	4	1.004	4.113	2,51	4,10
3. Tg. Palas	1.755,74	9,75	7	3.095	12.475	7,11	4,03
4. Tg. Palas Barat	1.064,51	5,91	4	1.545	6.619	6,22	4,28
5. Tg. Palas Utara	806,34	4,48	6	2.064	8.234	10,21	3,99
6. Tg. Palas Timur	677,77	3,76	5	1.522	7.742	11,42	5,09
7. Tanjung Selor	1.277,81	7,09	7	6.370	30.066	23,53	4,72
8. Tg. Palas Tengah	624,95	3,47	3	1.177	5.282	8,45	4,49
9. Sekatak	1.993,98	11,07	21	1.845	7.712	3,87	4,18
10. Sesayap	1.752,54	9,73	9	1.164	5.168	2,95	4,44
11. Sesayap Hilir	877,86	4,87	5	715	3.160	3,60	4,42
12. Bunyu	198,32	1,10	3	2.411	9.857	49,70	4,09
13. Tanah Lia	2.198,18	12,20	3	552	2.681	1,22	4,86
Jumlah 2005	18.010,50	100,00	87	24.572	107.238	5,95	4,36
2004	18.010,50	100,00	87	22.828	98.310	5,46	4,31
2001	18.010,50	100,00	87	21.070	85.647	4,75	4,06

Sumber : BPS-Kabupaten Bulungan dalam Angka 2006

Di Kabupaten Bulungan pada tahun 2005, jumlah penduduk yang tergolong usia kerja (10 tahun keatas) sebanyak 77.057 jiwa. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut yang tergolong angkatan kerja sebanyak 42.134 jiwa, terdiri dari angkatan kerja yang sudah bekerja sebanyak 37.478 jiwa dan sedang mencari pekerjaan 4.656 jiwa. Adapun penduduk usia kerja yang bukan tergolong angkatan kerja sebanyak 34.923 jiwa, terdiri dari masih sekolah 15.476 jiwa, mengurus rumah tangga 16.659 jiwa, dan lainnya 2.788 jiwa. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 54,68 jiwa.

Masyarakat Kabupaten Bulungan dapat dikatakan sebagai masyarakat agraris karena secara turun-temurun bercocok tanam telah membudaya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu sektor pertanian tetap dominan



sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak dilihat dari sisi lapangan kerja dan lapangan usaha penduduk dibandingkan sektor-sektor lain.

Pada tahun 2005 sektor pertanian menyerap 68,84% tenaga kerja, kemudian perdagangan 9,47%, jasa 8,45%, komunikasi 4,29%, konstruksi 4,13%, industri 3,10%, disusul secara berurutan yang menyerap tenaga kerja dibawah 1% yaitu pertambangan dan penggalian 0,88%, lainnya 0,68% dan keuangan 0,16%.

**Tabel 2.2. Prosentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha Utama Tahun 2005.**

No	Lapangan Usaha Utama	Status Pekerjaan					Jumlah
		Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain	Berusaha dengan dibantu orang lain	Berusaha dengan buruh tetap	Buruh/ Karyawan	Pekerja keluarga	
<b>TAHUN 2005</b>							
1.	Pertanian	70,20	91,63	81,11	8,65	90,50	68,84
2.	Pertambangan & Penggalian	0,13	0,00	0,00	4,19	1,37	0,88
3.	Industri	2,84	0,54	4,01	9,31	0,00	3,10
4.	Konstruksi	3,61	0,00	10,04	10,94	0,00	4,13
5.	Perdagangan	12,96	6,86	4,83	8,39	6,98	9,47
6.	Angkutan dan Komunikasi	5,87	0,97	0,00	10,75	0,00	4,29
7.	Keuangan	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,16
8.	Jasa	2,90	0,00	0,00	46,71	0,77	8,45
9.	lainnya	1,49	0,00	0,00	0,00	0,39	0,68
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS-Kabupaten Bulungan dalam Angka 2006

Bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk baik yang disebabkan oleh penambahan alamiah (kelahiran) maupun migrasi, setiap tahun akan merubah komposisi jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja yang bermuara pada permintaan lapangan kerja baru yang terus bertambah. Di lain sisi penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru masih relatif terbatas yang disebabkan belum berkembangnya investasi daerah. Dilihat dari perkembangannya sejak tahun 2003 hingga tahun 2005 jumlah angkatan kerja



di Kabupaten Bulungan tiap tahun terjadi penurunan yaitu 43.489 orang (2003), turun menjadi 42.582 orang (2004) dan kembali menurun menjadi 40.301 orang tahun 2005. dari jumlah angkatan kerja tersebut pada tahun 2003 yang bekerja 42.739 orang dan mencari pekerjaan 750 orang; tahun 2004 yang bekerja 40.398 orang, mencari pekerjaan 2.184 orang serta pada tahun 2005 yang bekerja 37.478 orang dan yang mencari pekerjaan sebanyak 2.823 orang.

**Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama Tahun 2003 – 2005.**

<b>Kegiatan Utama</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Angkatan Kerja	43.489	42.582	40.301
▪ Bekerja	42.739	40.398	37.478
▪ Mencari Pekerjaan	750	2.184	2.823
Bukan Angkatan Kerja	32.122	34.659	36.756
▪ Sekolah	12.906	15.477	15.567
▪ Mengurus rumah tangga	16.088	15.354	17.398
▪ Lainnya	3.128	3.828	3.791
<b>Jumlah</b>	<b>75.611</b>	<b>77.241</b>	<b>77.057</b>

Sumber : BPS-Kabupaten Bulungan dalam Angka 2006

Dari data dalam tabel 2.3 tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah pencari kerja/pengangguran yang cukup signifikan yang disebabkan bukan oleh bertambahnya angkatan kerja baru melainkan berkurangnya kapasitas lowongan kerja yang terjadi terutama pada sub sektor kehutanan Yaitu adanya PHK pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan terkait dengan berbagi perubahan kebijakan pemerintah di bidang kehutanan. Dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah pencari kerja/pengangguran ini maka ke depannya pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penyediaan lapangan kerja baru pada berbagai sektor lain sehingga terjadi pemerataan daya serap tenaga kerja sekaligus pemerataan pendapatan.

Angkatan kerja di Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 2003-2005 mengalami penurunan. Berdasarkan hasil Susenas, terjadi penurunan jumlah



angkatan kerja sebesar 5,36 persen dari tahun 2004. Angkatan kerja tahun 2004 sebesar 55,13 persen dari penduduk usia kerja yang ada di Kabupaten Bulungan sedangkan pada tahun 2005 sebesar 52,30 persen, dengan rincian yang bekerja sebesar 48,64 persen dan yang mencari pekerjaan sebesar 3,66 persen. Jumlah yang mencari pekerjaan pada tahun 2005 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diperlukan penyediaan lapangan kerja baru.

#### **a. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang menyangkut bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bulungan antara lain :

(1) pola persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa wilayah kurang memiliki tenaga kerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga berdampak pada terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah; (2) masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga yang mengakibatkan banyaknya anak-anak dibawah usia kerja yang bekerja sehingga kesempatan untuk memperoleh pendidikan menjadi terbatas; (3) belum tersusunnya suatu kebijakan peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk yang sesuai dengan potensi ekonomi wilayah; (4) masih terbatasnya peluang investasi di daerah yang berdampak pada minimnya peluang berusaha dan bekerja; (5) masih belum optimalnya pelaksanaan sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIK); (6) banyaknya pekerja yang bekerja di sektor kurang produktif sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan ; (7) rendahnya kualitas SDM tenaga kerja.

#### **b. Prediksi**

Berdasarkan kondisi dan permasalahan Kependudukan dan Ketenagakerjaan tersebut diatas maka untuk pembangunan jangka panjang ke depan diharapkan :

1) Dengan meningkatnya investasi terutama di bidang perkebunan dan pertambangan maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan akan terjadi peningkatan peluang kerja di kabupaten Bulungan.



- 2) semakin meningkatnya peluang kerja di sektor industri pengolahan sejalan dengan peningkatan produk hulu pertanian.
- 3) penataan administrasi kependudukan yang lebih baik sejalan dengan perkembangan teknologi.
- 4) Semakin meningkatnya pemberdayaan UMKM yang menyerap tenaga kerja informal
- 5) Tersedianya Balai Latihan Kerja yang mampu menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.
- 6) Meningkatnya peran pihak swasta untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja pada lingkup kepentingannya sendiri sejalan dengan berkembangnya kegiatan usaha.
- 7) Tersedianya tenaga kerja terampil yang siap masuk dalam pasar kerja.

## **2.2. Pendidikan**

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas. Tingkat produktivitas dan kompetisi seseorang akan sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Berdasarkan data tahun 2005, fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Bulungan mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas terdiri dari SD 137 buah; SLTP 31 buah dan SLTA 14 buah. Jika dibandingkan dengan tahun 2001 maka secara keseluruhan jumlah sekolah mengalami peningkatan, yaitu sebelumnya : SD 131 buah, SLTP 22 buah dan SLTA 9 buah. Pada seluruh kecamatan telah memiliki Sekolah Dasar dan SLTP namun untuk SLTA masih enam kecamatan yang belum dibangun yaitu kecamatan Peso Hilir, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Tengah, Sekatak, dan Tanah Lia.

Perbandingan atau rasio antara guru dan murid akan menggambarkan beban yang harus dihadapi oleh seorang guru dalam mengajar. Jumlah guru untuk jenjang pendidikan SD hingga SLTA pada tahun 2004 sudah cukup memadai yaitu berjumlah 1.600 orang dan jumlah murid 24.664 orang, sehingga



perbandingan rata-ratanya setiap guru mengajar 16 orang murid. Kalau dilihat dari tingkat/jenjang pendidikan di tingkat SD setiap guru mengajar 16 orang murid; SLTP 13 orang; dan tingkat SLTA 23 orang murid.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dapat terlihat dari jumlah siswa putus sekolah serta anak usia sekolah yang tidak sekolah. Di Kabupaten Bulungan angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP menunjukkan angka yang cukup baik. Untuk tingkat SD menunjukkan angka sebesar 98,09 persen, sehingga masih terdapat 1,91 persen anak usia 7 – 12 tahun yang belum/tidak bersekolah. Sedangkan pada jenjang SLTP menunjukkan angka partisipasi sekolah sebesar 81,56 persen, sehingga dapat dikatakan adanya keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Angka melek huruf di Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan, yang sebelumnya pada tahun 2004 sebesar 92,92 persen menjadi 93,58 persen pada tahun 2005. Sedangkan rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 7,30 tahun pada tahun 2005 dibandingkan tahun 2004 sebesar 7,19 tahun.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Bulungan terutama ditunjang melalui kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir untuk membebaskan siswa dari biaya sekolah, terutama biaya SPP maupun BP3 mulai jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA sehingga membantu dan memotivasi masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka telah ditandatangani MOU antara Menteri Pendidikan Nasional RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Nomor  $\frac{50/VII/KB/2006}{119/5111/Pem.D/2006}$  tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Peningkatan Kualifikasi Guru dan Penuntasan Buta Aksara di Kalimantan Timur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 661.056.530.000,- selama 3 tahun (Tahun Anggaran 2007 s/d 2009), dengan komposisi/bersumber 50 persen dari APBN, 30 persen dari APBD provinsi dan 20 persen dari APBD kabupaten/kota. Demikian pula halnya dengan ditetapkannya ketentuan konstitusi tentang besaran alokasi dana



pendidikan sebesar 20 % dari APBN/APBD setiap tahun, maka direncanakan Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sudah mulai merealisasikan sesuai dengan ketentuan tersebut dimana selama ini alokasi dana untuk bidang pendidikan Kabupaten Bulungan hanya berkisar antara 10 % hingga 12 % saja. Dalam kaitan itu maka diharapkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sudah dapat dicapai paling lambat pada awal lima tahun ke dua RPJPD ini. Oleh karena itu rencana strategis bidang pendidikan harus sudah tersusun dan mampu memberikan gambaran tentang potret bidang pendidikan hingga dua puluh tahun ke depan dalam kaitannya sebagai salah satu sektor utama dalam menciptakan SDM Kabupaten Bulungan yang tangguh. Standar Pelayanan (SP) Minimal Pendidikan untuk sekolah dasar meliputi : tersedianya ruang sekolah, rumah penjaga sekolah, kelompok belajar, guru bidang study, alat bantu peraga bidang study, ruang kantor TU, ruang kantor Kepala Sekolah, ruang kantor guru, dan ruang aula, sedangkan untuk SP Maksimal Sekolah Dasar selain SP Minimal tersebut ditambah lagi dengan kantin, pagar sekolah dan kelas agama. Sedangkan untuk SP Minimal pendidikan SLTP meliputi : sebagaimana SP Maksimal Pendidikan SD ditambah dengan fasilitas laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan laboratorium komputer, sedangkan untuk SP Maksimal SLTP adalah SP Minimal ditambah dengan fasilitas ruang dan peralatan *Visual Learning*. Selanjutnya untuk SP Minimal SLTA meliputi SP Maksimal SLTP (kecuali *Visual Learning*) untuk SP Maksimal SLTA adalah SP Minimal ditambah laboratorium bahasa dan matematika.

#### **a. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian serius terutama berkaitan dengan belum tersedianya pendidikan lanjutan setingkat Politeknik bagi sekolah kejuruan pertanian yang ada, belum proporsionalnya sebaran fasilitas pendidikan yang selaras dengan sebaran penduduk terutama tidak tersedianya SLTA di setiap kecamatan, masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan dan antar wilayah, masih rendahnya kualifikasi mutu dan jumlah tenaga pendidikan khususnya bidang studi eksakta, masih kurangnya tenaga



pendidik dengan latar belakang ilmu pendidikan sehingga diperlukan penyetaraan sebelum ditetapkan menjadi tenaga pengajar, masih rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, dan belum tersusunnya rencana strategis (Renstra) bidang pendidikan.

#### **b. Prediksi**

Berdasarkan kondisi umum tersebut, maka diprediksi untuk peningkatan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Bulungan yang mengarah pada penyiapan SDM yang tangguh di bidang agroindustri adalah :

- 1) terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana semua jenjang pendidikan (SD/SMP/SLTA) pada seluruh wilayah kecamatan sebelum berakhirnya lima tahun pertama RPJPD seiring dengan adanya peningkatan alokasi dana bidang pendidikan;
- 2) Terwujudnya pendidikan tingkat lanjutan atas (SLTA Negeri maupun swasta) pada seluruh kecamatan dalam lima tahun pertama RPJPD.
- 3) Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan mulai tingkat SD hingga SLTA dalam lima tahun kedua RPJPD di seluruh kecamatan;
- 4) Terwujudnya SLTA Kejuruan hingga perguruan tinggi seperti politeknik atau poliagro dalam lima tahun kedua RPJPD untuk mendukung visi daerah agroindustri di Kabupaten Bulungan
- 5) Terwujudnya SLTA yang telah menerapkan dan memenuhi standar pelayanan maksimal pendidikan sebelum berakhirnya RPJPD ini
- 6) Terpenuhinya kualitas dan kuantitas kebutuhan guru di semua bidang studi dan jenjang pendidikan pada awal lima tahun kedua RPJPD.
- 7) Tercapainya penuntasan wajib belajar sembilan tahun pada awal lima tahun kedua RPJPD.
- 8) Terciptanya pendidikan yang berbasis kompetensi melalui peran institusi swasta.
- 9) Tersusunnya rencana strategis (Renstra) bidang pendidikan.



### **2.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu kebutuhan dalam upaya pembangunan suatu daerah. Salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang umum dilakukan oleh daerah yaitu melalui kegiatan penelitian dan kajian terutama menyangkut potensi berbagai sumber daya hingga permasalahan daerah yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Kajian dan penelitian yang dilakukan dapat diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan seperti ; pemerintahan, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, penataan ruang dan pemanfaatan lahan, transportasi, pertanian, lingkungan, energi, data statistik, PDRB, dan lain sebagainya.

Sejak tahun 2001, kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan antara lain : Penataan Ruang Kabupaten dan RUTR semua kecamatan, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), peluang investasi di kawasan sentra produksi Bulungan, kawasan industri, studi penyusunan tatanan transportasi darat dan sungai di kabupaten Bulungan, Membangun Visi Kabupaten Bulungan, PDRB, Indeks Harga Konsumen, dan Bulungan Dalam Angka (setiap tahun).

#### **a. Permasalahan**

Beberapa permasalahan mendasar dibidang pengembangan dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi terutama berkaitan dengan belum terpenuhinya sarana dan prasarana di bidang pengembangan dan pengkajian teknologi baik di instansi pemerintah maupun di masyarakat antara lain ;

- 1) Belum terbentuknya kelembagaan Litbang dan Iptek di daerah.
- 2) Masih terbatasnya kajian dan penelitian yang dilakukan.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian Litbang dan Iptek baik dalam pengambilan kebijakan publik maupun oleh masyarakat disebabkan kurangnya publikasi atas hasil kajian Litbang dan Iptek.
- 4) Masih rendahnya peran masyarakat khususnya dunia usaha dalam pembentukan maupun pengembangan Litbang dan iptek di daerah.



- 5) Masih terbatasnya penggunaan teknologi dalam upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah.

#### **b. Prediksi**

- 1) Meningkatnya jenis dan kualitas pelayanan jasa teknologi
- 2) Penyempurnaan data statistik sebagai sumber informasi dalam rangka perencanaan dan pengembangan kabupaten Bulungan di masa mendatang.
- 3) Pelaksanaan kajian-kajian spesifik berupa kajian potensi dan karakteristik wilayah, kajian nilai-nilai budaya, analisis peluang, analisis pasar regional dan nasional.
- 4) Tersedianya informasi peluang usaha, jaringan sistem informasi teknologi (E-Government) dan meningkatnya nilai tambah teknologi bagi pengembangan sumber daya manusia pelaku pertanian, perikanan, peternakan dan agroindustri serta berbagai industri sesuai dengan karakteristik sumber daya lokal dan struktur industri kecil, menengah dan koperasi daerah.
- 5) Meningkatnya kerjasama riset dengan lembaga penelitian
- 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan Litbang dan Iptek.
- 7) Terbentuknya kelembagaan daerah bidang pengembangan dan penerapan iptek.

### **2.4. Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, sebagai bentuk upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu, Puskesmas terapung / Puskesmas Keliling yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat hingga daerah terpencil. Sejalan dengan program Pemerintah Pusat yaitu menuju Indonesia Sehat 2010, maka Pemerintah Kabupaten



Bulungan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan mencanangkan “**Bulungan Sehat 2008**”.

**Pada tahun 2006** sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada berjumlah 297 unit meliputi ; Puskesmas (2 unit rawat inap dan 12 unit rawat jalan), 40 unit Puskesmas Pembantu, dan 16 Puskesmas Keliling (11 unit roda empat, 50 unit roda dua, 3 unit speed boat dan 1 unit crew boat), 5 unit polindes dan 177 unit posyandu. Tenaga kesehatan berjumlah 480 orang yang terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, paramedis, sarjana kesehatan dan tenaga lainnya. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan tersebut, puskesmas di kecamatan Bunyu dan puskesmas desa Bumi Rahayu kecamatan Tanjung Selor telah ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap sedangkan di Kecamatan Sekatak, Sesayap Hilir dan Tanjung Palas Utara masih dalam proses pembangunan , yang selanjutnya akan ditunjang dengan kelengkapan dokter dan tenaga medis serta sarana penunjang lainnya,

Selain itu kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan hidup sehat merupakan gambaran pola pikir masyarakat itu sendiri. Salah satu indikator untuk mengukur kepedulian masyarakat tersebut adalah melalui akses pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada. Semakin sering melakukan konsultasi atau pengobatan/perawatan ke fasilitas kesehatan, semakin tinggi pula kepedulian atau kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan. Namun di lain sisi, semakin tinggi angka kunjungan ke fasilitas kesehatan pada suatu wilayah, menunjukkan semakin tinggi pula keluhan masyarakat. Oleh karena itu pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat dan pemanfaatan prasarana dan sarana kesehatan yang ada harus terus digalakkan.

**Berdasarkan data susenas 2006** penduduk di Kabupaten Bulungan yang mengalami keluhan kesehatan dilihat dari cara penyembuhan/pengobatan adalah 58,14% mengobati sendiri, dibanding tahun sebelumnya angka ini menunjukkan penurunan dan demikian pula prosentase penduduk yang berobat **jalan tahun 2006** mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 53,38%. Pada umumnya mereka yang mengobati sendiri selama periode tahun 2004 – 2006 sudah menggunakan obat modern yaitu sekitar 90%, sementara yang menggunakan obat atau cara-cara tradisional menunjukkan



penurunan masing-masing 31,39% pada tahun 2006 dan 32,63% pada tahun 2005. Fasilitas kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan penduduk yang berobat jalan pada tahun 2005 adalah puskesmas 69,76% dan meningkat menjadi 85,55% pada tahun 2006, sehingga dapat dikatakan puskesmas masih merupakan pilihan terbanyak dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Dalam kaitan itu maka pembangunan kesehatan lebih berorientasi pada peningkatan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui ketersediaan dan keterjangkauan akses masyarakat kepada sarana dan prasarana kesehatan seperti halnya puskesmas di semua wilayah kecamatan.

Sementara itu sejak penyerahan kewenangan program KB oleh pemerintah kepada daerah kabupaten/kota sejak tahun 2003, telah mendorong peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan KB. Melihat kondisi Kabupaten Bulungan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan sebaran yang tidak merata, maka kebijakan KB bukan diarahkan pada mengurangi angka kelahiran, tetapi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat sebagai langkah strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang tangguh.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan komposisi penduduk menurut status perkawinan dapat menunjukkan korelasi yang kuat terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang KB. Pada tahun 2006 penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin lebih besar dibanding perempuan yaitu masing-masing 44,61% dan 32,79%. Sebaliknya yang berstatus kawin penduduk perempuan lebih banyak yaitu 60,58% dan penduduk laki-laki 52,79%. Penundaan usia perkawinan serta kehamilan yang pertama berdampak memperpendek masa usia subur. Namun sebaliknya di Kabupaten Bulungan prosentase wanita pada usia perkawinan pertama yang berumur kurang dari 16 tahun pada tahun 2006 sebanyak 15,65%, angka ini menunjukkan peningkatan dibanding 10,93% tahun 2005 dan 6,91% pada tahun 2004. adanya kecenderungan mempercepat usia perkawinan pertama terutama bagi wanita yang berumur kurang dari 16 tahun ini diperkirakan akan mendorong peningkatan kebutuhan pelayanan KB oleh masyarakat dan pada sisi lain kebutuhan tenaga penolong persalinan juga semakin perlu mendapat perhatian. Sekalipun persalinan yang aman dapat dilakukan tenaga medis, di



Kabupaten Bulungan masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun/tenaga non medis. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi dan faktor budaya masyarakat dan tentunya adanya keterbatasan jumlah tenaga penolong persalinan medis terutama di wilayah pedesaan. Secara umum persalinan yang ditolong oleh dokter/bidang/tenaga medis pada tahun 2006 sudah mencapai 63,96% dan sebaliknya oleh tenaga dukun dan lainnya cenderung menurun, hal ini menggambarkan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan persalinan.

Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bulungan berjumlah 20.520 PUS atau mengalami peningkatan sebanyak 3.357 PUS di banding tahun 2004. Banyaknya peserta KB aktif tahun 2005, yaitu sebesar 70,68 persen terhadap Pasangan Usia Subur merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan program KB dan meningkatnya perilaku kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Selain itu bila dibandingkan tahun sebelumnya jumlah akseptor KB aktif juga mengalami peningkatan sebanyak 3.036 peserta yaitu dari 11.468 akseptor pada tahun 2004 menjadi 14.504 akseptor pada tahun 2005.

Sementara itu jumlah Klinik KB pada tahun 2006 adalah sebanyak 18 buah atau bertambah dibanding tahun 2005 yaitu 17 buah dan mencakup seluruh kecamatan, PKBRS hanya ada di kecamatan Tanjung Selor dan Bunyu, sedangkan kelompok penimbangan bayi berdasarkan data tahun 2006 terdapat 162 kelompok dan Pos KB Desa sebanyak 87 buah

#### **a. Permasalahan**

Beberapa permasalahan mendasar bidang kesehatan dan KB di Kabupaten Bulungan terutama berkaitan dengan letak geografis desa yang cukup sulit untuk dijangkau, disparitas status kesehatan khususnya antar tingkat sosial ekonomi, antar wilayah dan antar perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi, masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, terbatasnya tenaga dokter umum, tenaga dokter spesialis dan tenaga medis lainnya, rendahnya budaya dan perilaku sehat di kalangan masyarakat, angka kematian bayi dan ibu melahirkan relatif masih cukup tinggi, masih terbatasnya jumlah tenaga penolong persalinan baik



kuantitas maupun pemerataannya serta masih terbatasnya jumlah tenaga penyuluh lapangan KB.

#### **b. Prediksi**

Berdasarkan kondisi umum tersebut di atas, maka diprediksi peningkatan dan pengembangan bidang kesehatan ke depannya terutama dengan rencana penancangan Bulungan Sehat 2008, adalah :

- 1) Terwujudnya Bulungan Sehat pada tahun 2008.
- 2) Tersedianya puskesmas rawat inap yang memadai di semua Kecamatan pada awal 5 tahun kedua pada RPJPD.
- 3) Meningkatnya status/type RSUD Tanjung Selor yang saat ini type C meningkat menjadi type C+, type B hingga menjadi type A dan menjadi rujukan bagi masyarakat wilayah utara dalam waktu 5 tahun kedua RPJPD.
- 4) Tersedia dan terpenuhinya tenaga dokter, dokter spesialis, tenaga medis dan para medis baik dari segi jumlah maupun sebarannya.
- 5) Tersedia dan terpenuhinya alat dan peralatan kesehatan serta obat-obatan untuk seluruh wilayah.
- 6) Menurunnya angka kesakitan masyarakat seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran akan arti pentingnya hidup sehat.
- 7) Meningkatnya kemampuan pencegahan terhadap penyakit menular dan penyakit lainnya. Menurunnya angka kematian bayi, ibu melahirkan dan meningkatnya angka usia harapan hidup setiap tahunnya.
- 8) Terpenuhinya jaminan/asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan.
- 9) Tersusunnya sistem kesehatan daerah (SKD).

### **2.5. Peranan Perempuan**

Pembangunan nasional ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Walaupun sampai saat ini telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang pembangunan.



Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan daerah masih rendah, kesenjangan yang terjadi semakin terlihat pada struktur pemerintahan maupun organisasi politik.

Dalam struktur pemerintahan daerah khususnya pada jabatan struktural eselon II belum ada satupun yang dijabat oleh perempuan, sedangkan pada eselon III dari 100 jabatan struktural, maka yang dijabat oleh perempuan tidak mencapai 10 %.

Pada struktur organisasi politik, ketentuan keterwakilan 30 % kaum perempuan juga tidak dapat terpenuhi, yaitu dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bulungan, hanya 1 orang (lima persen) saja yang mewakili. Berdasarkan kondisi tersebut maka pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan pada berbagai bidang pembangunan mutlak dilakukan yang diawali melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan reproduktif yang lebih mengutamakan kesempatan kepada kaum perempuan.

#### **a. Permasalahan**

- 1) Masih rendahnya kualitas hidup dan peran kaum perempuan.
- 2) Masih rendahnya peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
- 3) Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender termasuk partisipasi masyarakat.
- 4) Pemahaman terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan.
- 5) Masih banyak terdapat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender.
- 6) Masih rendahnya partisipasi perempuan pada semua jenjang pendidikan.

#### **b. Prediksi**

Pendidikan dan kesehatan yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kaum perempuan, dalam 20 tahun ke depan akan memberikan peluang dalam meningkatkan kapasitas intelektual diri



mereka sehingga mampu secara kompetitif berperan dalam berbagai bidang pembangunan daerah.

Perkuatan kelembagaan pengarusutamaan gender akan meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan yang setara dengan laki-laki dengan tetap memperhatikan kondisi yang bersifat kultural dan struktural.

Keterlibatan kaum perempuan akan semakin meningkat baik dalam proses politik, kebijakan publik, dan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan peningkatan sumber daya manusia kaum perempuan.

## **2.6. Kesejahteraan Sosial**

Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial secara umum mengatur ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dalam menentukan garis kebijakan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat.

Ke depan, permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi masih diwarnai dengan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterpencilan, korban tindak kekerasan, akibat bencana alam dan bencana sosial, penyalahgunaan napza. Saat ini, jumlah PMKS yang membutuhkan perhatian adalah sebesar 3.343 jiwa, terdiri dari ; 175 anak cacat ; 621 lansia terlantar ; 1.663 keluarga tinggal di rumah tidak layak huni ; 574 penyandang cacat ; dan 310 komunitas adat terpencil (KAT). Sementara itu jumlah penduduk miskin berdasarkan data tahun 2005 mencapai 12.516 KK/55,754 jiwa. Perhatian khusus dalam perlindungan sosial perlu ditingkatkan terutama bagi penduduk miskin dan rentan (penduduk yang mendekati miskin), yang apabila mendapat goncangan karena peraturan pemerintah, resiko-resiko sosial dan ekonomi, akan mengakibatkan penduduk rentan menjadi miskin dan penduduk miskin menjadi semakin miskin.



#### **a. Permasalahan**

- 1) Jumlah penduduk miskin (2005) masih sangat tinggi yaitu mencapai 55.754 jiwa atau 49,33% dari jumlah penduduk tahun 2005 Kabupaten Bulungan.
- 2) Jumlah penyandang PMKS lain sudah relatif tinggi yang apabila tidak ditangani secara serius, akan meningkat drastis dalam beberapa tahun ke depan.
- 3) Tingginya angka kemiskinan dan PMKS berpotensi menimbulkan perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial.
- 4) Terbatasnya kemampuan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam penanganan PMKS dan kemiskinan.

#### **b. Prediksi**

Peningkatan kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah yang didukung peran serta masyarakat dalam bentuk lahirnya kesetiakawanan sosial dan jiwa gotong royong yang tinggi, akan mengurangi secara bertahap jumlah PMKS dan penduduk miskin. Menjelang berakhirnya lima tahun pertama RPJPD ini, diperkirakan jumlah PMKS dan penduduk miskin Kabupaten Bulungan akan berkurang sebesar 10% - 15% dari jumlah tahun 2005.

## **2.7. Agama**

Sebagian besar penduduk Kabupaten Bulungan memeluk agama Islam yaitu sebanyak 72.025 orang, kemudian disusul Katolik 27.220 orang ; Kristen 6.568 orang ; Buddha 1.189 orang ; dan Hindu 146 orang.

Sementara itu, sarana ibadah yang tersedia bagi semua umat beragama mencapai 271 buah, terdiri dari 97 masjid ; 30 langgar ; 21 musholla ; 118 gereja ; 3 vihara ; 1 pura ; dan 1 kelenteng. Penyediaan sarana ibadah ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan pemeluk agama serta perlunya pengembangan sarana pendidikan keagamaan di seluruh wilayah. Dalam aspek kerukunan antar umat beragama



sudah cukup baik, kondisi tersebut perlu terus ditingkatkan sehingga tercipta kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman, kondusif dan sejahtera.

#### **a. Permasalahan**

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan sarana ibadah sebagai wadah kegiatan pembinaan dan pengembangan keagamaan.
- 2) Belum optimalnya pendidikan agama di sekolah-sekolah bagi pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia bagi peserta didik.
- 3) Belum terbentuknya KUA di semua wilayah Kecamatan sehingga pelayanan keagamaan belum dapat optimal.

#### **b. Prediksi**

Tersedianya sarana ibadah yang cukup, terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama, dan dihayati serta diamalkannya nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari akan menjamin terpenuhinya hak setiap masyarakat untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Selain itu pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di semua wilayah, akan semakin mendorong rasa saling menghargai dan menghormati sehingga melahirkan kebersamaan dan harmonisasi antar sesama masyarakat.

### **2.8. Pemuda dan Olah Raga**

Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci keberhasilan sektor pembangunan lainnya.

Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan dalam era global.

Di samping itu, pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian yang bermartabat. Secara



keseluruhan tujuan keolahragaan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

#### **a. Permasalahan**

- 1) Belum serasinya kebijakan kepemudaan maupun keolahragaan di tingkat nasional dengan daerah.
- 2) Masih rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda
- 3) Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda pada jenjang pendidikan perguruan tinggi.
- 4) Masih rendahnya peran kemitraan masyarakat/swasta dalam pembangunan bidang keolahragaan daerah.
- 5) Masih minimnya capaian prestasi keolahragaan daerah.
- 6) Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana olah raga pada semua wilayah.
- 7) Masih lemahnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olah raga.
- 8) Masih lemahnya pembibitan dan pembinaan keolahragaan usia dini di sekolah-sekolah.

#### **b. Prediksi**

Meningkatnya koordinasi antar instansi di tingkat nasional dan daerah untuk mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan dan keolahragaan akan melahirkan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan yang serasi sehingga mendorong lahirnya kepeloporan pemuda dan terwujudnya prestasi olah raga di daerah. Pembinaan olah raga yang dimulai secara dini di sekolah-sekolah yang didukung dengan pemanfaatan kajian iptek serta sistem manajemen bidang keolahragaan yang baik akan menciptakan bibit unggul atlet daerah yang berprestasi nasional dan internasional.



## 2.9. Perekonomian Daerah

Pada awal bab ini telah diuraikan mengenai pemekaran Kabupaten Bulungan menjadi Kotamadya Tarakan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Selain luas wilayah yang berkurang juga berbagai potensi dan sarana prasarana ekonomi daerah masuk menjadi bagian dalam wilayah pemekaran. Dan sejak itu pula perekonomian daerah mengalami perubahan yang sangat drastis terutama pada sisi ekspor produk-produk unggulan baik migas maupun non migas, dan relatif daerah Kabupaten Bulungan hanya tinggal melakukan ekspor pada jenis produk-produk methanol dari pelabuhan Bunyu.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bulungan dapat dilihat antara lain dari pertumbuhan dan struktur ekonomi, pendapatan per kapita, investasi, keuangan daerah dan kinerja sektoral.

Struktur perekonomian Kabupaten Bulungan hingga tahun 2005 masih didominasi oleh sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA), terutama dari sektor pertanian dan dari sektor industri pengolahan. Jumlah seluruh nilai tambah yang tercipta akibat kegiatan ekonomi (PDRB) pada tahun 2005 adalah sebesar 1.540,177 milyar rupiah.

Berdasarkan total PDRB tersebut, sekitar 25 persen berasal dari nilai tambah sektor pertanian dan 24 persen dari sektor industri pengolahan. Sektor ekonomi berikutnya yang memberikan kontribusi dalam perekonomian Kabupaten Bulungan adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 17 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16 persen, sektor jasa-jasa sebesar 12 persen serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 4 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah 1 persen.

Jika sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan peranan dalam beberapa tahun terakhir, maka sebaliknya andil sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa cenderung terus meningkat selama periode yang sama. Artinya, struktur perekonomian Kabupaten Bulungan mulai menunjukkan pergeseran dari sektor primer (sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian) kepada sektor sekunder (sektor industri pengolahan) dan sektor tersier (sektor jasa-jasa). Namun sayangnya, sektor tersier di sini lebih didominasi oleh aktivitas jasa pemerintahan umum,



belum ke arah perdagangan, keuangan maupun transportasi dan sektor riil lainnya.

**Tabel 2.4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Dengan Migas Atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001 – 2005 ( % ).**

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004 <sup>r)</sup>	2005 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	32,69	31,34	28,28	25,79	24,56
2. Pertambangan dan Penggalian	14,17	10,46	11,89	14,94	17,42
3. Industri Pengolahan	25,41	26,48	26,58	25,23	24,00
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,69	0,63	0,63	0,65	0,62
5. Bangunan	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15
6. Perdagangan, Hotel Dan Restoran	13,15	16,08	16,28	16,18	16,21
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3,56	4,07	4,23	4,32	4,49
8. Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	0,27	0,25	0,23	0,22	0,20
9. Jasa-jasa	9,87	10,52	11,70	12,51	12,35
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

r) Angka diperbaiki

\*) Angka Sementara

Sumber : BPS - Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2006

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan dalam 5 tahun terakhir terus mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2001 pertumbuhan sebesar 2,65 persen, kemudian meningkat 3,59 persen pada tahun 2002 dan kembali menurun pada tahun 2003 sebesar 2,18 persen. Pada tahun 2004 meningkat menjadi 3,40 persen dan kembali menurun pada tahun 2005 menjadi sebesar 2,92 persen atau rata-rata pertumbuhan 3,10% per tahun (dengan migas).



Angka pertumbuhan ini relatif jauh lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan kabupaten/kota lainnya. Hal ini juga menunjukkan lemahnya daya tarik investasi daerah serta belum pulihnya iklim perdagangan berkaitan dengan aktifitas ekspor impor non migas pasca pemekaran, yang pada akhirnya mempengaruhi daya saing produk daerah. Terjadinya pertumbuhan ekonomi yang rendah tahun 2003 terutama disebabkan oleh pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 19,55% dan sub sektor kehutanan minus 7,85%. Sebaliknya peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2002 – 2004 antara lain didorong oleh pertumbuhan sub sektor pengangkutan yaitu rata-rata 4,13% (dengan migas) dan 4,75% (tanpa migas) terutama dengan selesainya pembangunan pelabuhan bongkar muat di Tanjung Selor. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan selama kurun waktu tahun 2000 – 2005 dengan migas adalah 3,10% lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tanpa migas yaitu 3,24% walaupun kontribusi sektor migas secara nominal terhadap PDRB masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor non migas memiliki prospek yang cukup menjanjikan bagi perekonomian daerah dalam beberapa tahun mendatang.

**Tabel 2.5. Nilai Ekspor Kabupaten Bulungan menurut Jenis Barang Tahun 2002 – 2005.**

Jenis Barang	Berat (Kg)	Nilai FOB (US \$)	
(1)	(2)	(3)	
Methanol (Methyl Alcohol)	87.374.947	7.019.844	
Jumlah	87.374.947	7.019.844	
	2004	149.994.060	8.435.468
	2003	144.455.232	10.408.782
	2002	154.321.672	10.169.307

Sumber : BPS - Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2006

Peranan ekspor migas masih sangat dominant jika dibandingkan dengan ekspor non migas. Nilai ekspor migas Kabupaten Bulungan selama 2002 – 2005 rata-rata US\$ 9,0 juta per tahun sedangkan non migas hanya berkisar US\$ 40.000



per tahun. Nilai ekspor Kabupaten Bulungan Tahun 2005 yaitu sebesar US\$ 7,19 Juta sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai ekspor Tahun 1997 (sebelum pemekaran) yaitu US\$ 213,28 Juta. Sementara itu nilai impor Kabupaten Bulungan selama 2001 – 2005 rata-rata US\$ 153.236. Nilai impor tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar US\$ 347.130. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari rata-rata 3,10% per tahun menjadi 6,6% hingga 7 % per tahun seperti rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi provinsi maka diperlukan nilai investasi hingga tahun 2010 (proyeksi lima tahunan) sebesar rata-rata Rp. 1.422.810,00 M.

**Tabel 2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulungan Tahun 2001 – 2005**

Tahun	Dengan Migas ( % )	Tanpa Migas ( % )
2001	2,65	1,88
2002	3,59	4,94
2003 <sup>r)</sup>	2,18	2,02
2004 <sup>r)</sup>	3,40	3,31
2005 <sup>*)</sup>	2,92	3,20

r) Angka diperbaiki

\*) Angka sementara

Sumber : BPS - Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2006

Tingkat produktivitas masyarakat di Kabupaten Bulungan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini tampak pada perkembangan PDRB perkapita selama jangka waktu 2001-2005 memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat, yaitu dari 10,187 juta rupiah per orang pada tahun 2001 menjadi 15,697 juta rupiah per orang pada tahun 2005.

Seiring dengan peningkatan produktivitas tersebut, daya beli atau tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan juga memperlihatkan kenaikan selama rentang waktu tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat digunakan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan perhitungan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulungan tahun 2005 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya



yaitu dari 71,16 (2004) menjadi 72,27 (tahun 2005) yang berarti berada dalam klasifikasi menengah ke atas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UNDP.

**Tabel 2.7. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Bulungan Tahun 2001 – 2005**

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. )		Atas Dasar harga Konstan (Rp. )	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	10.186.827,91	8.812.121,47	9.350.728,08	8.018.656,09
2002	11.824.910,56	10.699.380,55	9.494.112,64	8.247.635,51
2003 <sup>r)</sup>	12.904.595,55	11.495.191,41	9.508.327,95	8.247.135,69
2004 <sup>r)</sup>	14.347.775,95	12.345.818,24	9.625.118,74	8.341.574,83
2005 <sup>r)</sup>	15.697.347,46	13.119.406,29	9.822.386,49	8.535.302,55

r) Angka diperbaiki

\*) Angka Sementara

Sumber : BPS - Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2006

Menjelang akhir tahun 2005, angka inflasi Kabupaten Bulungan meningkat drastis dari -1,34% menjadi 7,05%. Peningkatan ini dipicu oleh naiknya harga BBM tanggal 1 Oktober 2005 yang rata-rata mencapai 126%. Pada tingkat lokal, pemerintah daerah menyikapi kenaikan BBM agar lebih terkendali dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 15% diatas harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya di beberapa wilayah yang jauh dan sulit distribusinya, harga eceran lebih tinggi dari HET yang ditetapkan. Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat terhindarkan sebagai dampak kenaikan BBM tersebut sehingga mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang mendorong semakin tingginya jumlah penduduk miskin.



**Tabel 2.8. Inflasi Kabupaten Bulungan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Bulan Agustus 2005**

No.	Kelompok Pengeluaran	Kabupaten Bulungan
(1)	(2)	(3)
	<b>U M U M</b>	<b>0,01</b>
1	Bahan Makanan	-0,32
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	-0,20
3	Perumahan	0,23
4	Sandang	0,01
5	Kesehatan	0,19
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0,47
7	Transportasi dan Komunikasi	0,00

Sumber : BPS – Berita Resmi BPS Kabupaten Bulungan Agustus 2005

Perkembangan investasi di Kabupaten Bulungan secara perlahan membaik seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian Nasional, secara umum Kabupaten Bulungan masih mempunyai keunggulan selain memiliki lahan yang luas juga terdapat sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Peluang investasi non migas yang mempunyai potensi besar untuk berkembang berada pada sektor pertanian terutama pada sub sektor perkebunan (kelapa sawit, coklat, lada, kopi), sub sektor perikanan tangkap dan budidaya, serta sub sektor kehutanan non kayu (rotan, hasil hutan ikutan dan lain-lain hasil hutan). Peluang investasi pada sektor pertambangan seperti (migas, batubara dan bahan mineral lainnya) diperkirakan masih menyimpan potensi yang cukup untuk berkembang. Diproyeksikan sebelum berakhirnya lima tahun pertama RPJPD ini eksplorasi migas di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur sudah akan dimulai.

Dengan visi Kabupaten Bulungan dan pelaksanaan AFTA 2003, maka peranan penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri sangat penting dalam mempercepat perkembangan di Kabupaten Bulungan.



Peluang investasi di Kabupaten Bulungan sebagian besar dapat ditujukan ke sub sektor perkebunan (dengan komoditas unggulan antara lain kelapa sawit, coklat, lada dan kopi, sub sektor perikanan (laut dan tambak) serta sub sektor kehutanan (rotan, hasil hutan ikutan dan lain-lain). Namun demikian, untuk mengembangkan investasi di daerah ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi. Karena itu, pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Bulungan akan memfokuskan program pengembangan investasinya ke arah penciptaan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 6 - 7 persen pertahun , maka selama jangka waktu 2005-2010 Kabupaten Bulungan membutuhkan investasi akumulatif paling kurang sebesar Rp. 1.422.810 juta, yang diharapkan berasal dari investasi Pemerintah Daerah (bersumber dari APBD, APBD Propinsi, APBN dan pinjaman luar negeri melalui pemerintah) sebanyak Rp. 948.540 juta (66,67 persen) dan investasi swasta (PMDN/PMA/Non fasilitas) sejumlah Rp. 474.270 juta (33,33 persen). Dengan nilai investasi tersebut, maka diharapkan penanaman modal mampu memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan sebesar 6 – 7 persen pertahun.

Sejak tahun anggaran 2001 sampai dengan 2005 realisasi penerimaan maupun pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan yang sangat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan pengaruh dari pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Meskipun penerimaan Pemerintah Kabupaten Bulungan meningkat pada tahun 2004 menjadi sebesar Rp. 857,120 Milyar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 770,82 milyar, namun berbagai upaya harus terus dilakukan untuk menciptakan sumber pendapatan baru dalam upaya mengantisipasi apabila pada saatnya nanti dana perimbangan termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) akan semakin kecil bahkan dihapuskan, karena dana perimbangan untuk daerah Kalimantan Timur umumnya dan Kabupaten Bulungan khususnya berasal dari hasil kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui.



Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp. 14,34 milyar sedangkan dari dana perimbangan sebesar Rp. 448,62 milyar, hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 3,1 persen jika dibandingkan dengan dana perimbangan yang mencapai 96,9 persen. Dengan demikian bagian terbesar dari pendapatan dan penerimaan daerah yang digunakan untuk Belanja Aparatur dan Publik yang berlangsung di Kabupaten Bulungan masih “bergantung” dari dana Pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pembangunan agar lebih bertanggung jawab kepada masyarakat akan mendapat kendala apabila kondisi ini terus berlangsung.

Di sektor perbankan antara tahun 1999 dengan tahun 2000 yaitu sejak perubahan kota administratif Tarakan menjadi Kotamadya mengalami penurunan yang cukup tajam. Posisi aktiva bank dari Rp. 166,514 milyar turun menjadi Rp. 110,114 milyar; posisi dana dari Rp. 143,126 milyar turun menjadi Rp. 108,902 milyar; simpanan berjangka turun dari Rp. 30,428 milyar menjadi Rp. 18,724 milyar. Namun dimulai tahun 2001 yang merupakan awal dari otonomi daerah yang dibarengi dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka sektor perbankan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 posisi aktiva bank mencapai Rp. 639,983 milyar; posisi dana Rp. 145,751 milyar; posisi giro Rp. 418,719 milyar; dan posisi simpanan berjangka Rp. 30,689 milyar. Seiring dengan perkembangan sektor-sektor pembangunan di daerah, kebutuhan pembiayaan melalui fasilitas kredit perbankan maupun lembaga keuangan lainnya mengalami peningkatan, bukan saja oleh swasta besar tetapi juga termasuk usaha kecil, menengah dan mikro. Nilai kredit perbankan tahun 2001 adalah Rp. 73,496 milyar meningkat 78,88% atau sebesar Rp. 131.468 milyar pada tahun 2005, sementara itu penyaluran kredit untuk UKM – Mikro meningkat sebesar 269,45% yaitu dari Rp. 15,673 milyar tahun 2001 menjadi Rp. 57,904 milyar tahun 2005.

Melihat prospek jangka panjang perekonomian daerah yang semakin baik, maka sejak tahun 2005 Perum Pegadaian membuka cabang di Tanjung Selor. Hal ini akan semakin mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi masyarakat khususnya UKM – Mikro yang selama ini kesulitan dalam



mendapatkan fasilitas permodalan. Nilai kredit yang disalurkan oleh Perum Pegadaian cabang Tanjung Selor selama tahun 2005 adalah sebesar Rp.11,940 milyar. Perkembangan sektor-sektor ekonomi masyarakat khususnya UKM-Mikro dapat terlihat dimana pada tahun 2004 jumlah unit usaha perdagangan UKM-Mikro dari 145 unit menjadi 255 unit, sedangkan jumlah industri kecil meningkat dari 504 unit usaha tahun 2001 menjadi 825 unit usaha pada tahun 2005. Nilai tambah yang diberikan oleh sektor perdagangan dan industri kecil – mikro selama tahun 2005 adalah Rp. 127,449 milyar sedangkan satu-satunya industri besar yang ada di daerah hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,730 milyar pada tahun 2005. sementara itu perkembangan lembaga perkoperasian di daerah juga menunjukkan peningkatan dari 99 unit usaha koperasi tahun 2001 menjadi 132 unit usaha pada tahun 2005 dan keberadaannya mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bulungan.

#### **a. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian Kabupaten Bulungan antara lain :

- 1) Struktur perekonomian Kabupaten Bulungan hingga tahun 2005 masih didominasi oleh sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA), dimana akan mengalami penyusutan setiap tahunnya dan pada saatnya pasti akan habis. Sedangkan industri yang berbasis pada sumber daya yang dapat diperbaharui belum menunjukkan peran yang berarti sebagai pengganti tulang punggung perekonomian daerah.
- 2) Walaupun cenderung setiap tahun terjadi peningkatan terhadap pendapatan perkapita, namun tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya, karena adanya disparitas yang cukup besar antar agregat pendapatan antar masyarakat itu sendiri.
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung investasi, termasuk sistem informasi, pelayanan, perizinan, serta insentif/disinsentif fiskal dan non fiskal, yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bulungan.



- 4) Peran investasi Pemerintah Daerah melalui pembangunan berbagai sektor masih sangat dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahun dan sebaliknya peran swasta belum berkembang.
- 5) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur daerah mengakibatkan berbagai potensi sumber daya ekonomi daerah lambat berkembang.
- 6) Masih rendahnya kinerja UKM dalam mendorong pertumbuhan sektor riil yang terkait belum optimalnya pemberdayaan, permodalan dan faktor-faktor pendukung lainnya.
- 7) Belum optimalnya kinerja Koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat.

#### **b. Prediksi**

Struktur perekonomian Kabupaten Bulungan ke depan secara perlahan akan mengalami pergeseran dari sektor primer (sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian) kepada sektor sekunder (industri pengolahan hasil pertanian) dan sektor tersier (sektor jasa-jasa). Dengan demikian secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap dominasi sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA).

Angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 – 7 persen pertahun selama jangka waktu 2005-2010 dengan akumulasi investasi sebesar Rp. 1.422.810,- M akan dapat dicapai mengingat perkembangan investasi sektor pemerintah maupun swasta yang terus mengalami peningkatan.

Peningkatan investasi sektor pemerintah dan sektor swasta juga akan memberikan efek multiplier yaitu mendorong berkembangnya sektor riil sehingga ekonomi masyarakat tumbuh secara positif yang secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

### **2.10. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Sektor pertanian yang mencakup tanaman bahan makanan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan berperan besar dalam perkembangan perekonomian daerah. Selain memberikan kontribusi yang



dominan terhadap perkembangan PDRB juga paling banyak menyerap tenaga kerja.

Luas lahan pertanian tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Bulungan pada tahun 2005 adalah 11.394 Ha yang meliputi; padi ladang 6.359 Ha; padi sawah seluas 5.035 Ha. Sawah yang menggunakan sistem irigasi seluas 757 Ha sedangkan sawah non irigasi seluas 4.278 Ha.

Dalam kurun waktu 2001 – 2005 sektor pertanian memberikan kontribusi rata-rata sebesar 28,53% PDRB dan menyerap tenaga kerja rata-rata 33,69% dari total angkatan kerja.

Perkembangan sub sektor pertanian tanaman bahan makanan khususnya padi di Kabupaten Bulungan pada tahun 2005 mengalami kenaikan pada luas panen tetapi mengalami penurunan pada jumlah produksinya. Secara riil luas panen padi naik dari 9.661 hektar pada tahun 2004 menjadi 9.707 hektar pada tahun 2005, sedangkan produksi padi mengalami penurunan dari 26.315 ton pada tahun 2004 menjadi 25.219 ton pada tahun 2005, atau turun sebanyak 1.096 ton.

Antara tahun 2001 – 2005 produksi padi rata-rata mencapai 22.496,4 ton per tahun (atau setara dengan 14.622,66 ton beras) dimana produksi tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu 26.631 ton dan terendah terjadi pada tahun 2003 yaitu hanya sejumlah 16.284 ton. Jika diasumsikan setiap penduduk mengkonsumsi rata-rata 200 gram/hari maka jumlah konsumsi rata-rata adalah 7.828,37 ton beras per tahun, dengan demikian masih terdapat surplus beras sebanyak lebih kurang 6.794,29 ton per tahun.

Pada jenis tanaman sayur-sayuran secara umum mengalami kenaikan baik produksi maupun luas panen. Pada tahun 2005 sawi masih merupakan jenis tanaman sayur-sayuran yang paling banyak produksinya yaitu 1.765 ton dengan peningkatan sebesar 115 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya; selanjutnya adalah ketimun yaitu 1.151 ton, kacang panjang sebanyak 216 ton dan kangkung sebanyak 1.056 ton. Luas panen masing-masing adalah 109 hektar untuk sawi, ketimun 94 hektar, kacang panjang 169 hektar dan kangkung 93 hektar.

**Tabel 2.9. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun 2005.**

No.	Komoditi	Luas Tanam/Populasi (ha/ekor)	Luas Panen (ha/ekor)	Produksi (ton)	Ket.
1.	Padi sawah	3.893	3.888	12.813	
2.	Padi Ladang	6.802	5.819	12.406	
3.	Jagung	663	680	1.848	
4.	Kedelai	177	170	141	
5.	Kacang tanah	318	340	412	
6.	Kacang hijau	223	256	214	
7.	Ubi kayu	691	646	5.490	
8.	Ubi jalar	389	516	4.226	
9.	Duku	27	-	54	
10.	Durian	30	-	150	
11.	Jeruk	60	-	360	
12.	Alpokot	5	-	7,5	
13.	Nanas	10	-	75	
14.	Rambutan	130	-	650	
15.	Mangga	15	-	20	
16.	Jambu	7	-	18	
17.	Sukun	12	-	36	
18.	Belimbing	4	-	10	
19.	Sawi	119	-	1.705	
20.	Kacang Panjang	177	169	1.183	
21.	Cabe	148	-	829	
22.	Tomat	63	-	315	
23.	Ketimun	87	94	1.151	
24.	Bayam	130	-	715	
25.	Bawang Merah	4	-	24	
26.	Kubis	20	-	280	
27.	Petsai/sawi	119	109	1.765	
28.	Bawang Daun	35	-	35	
29.	Terong	100	-	920	
30.	Buncis	40	-	200	
31.	Kangkung	102	99	1.145	
32.	Kelapa Dalam	1.596,75	-	7.503	
33.	Kopi	271,5	-	82,4	
34.	Kakao	643	-	434,4	
35.	Lada	643	-	12,9	
36.	Kapuk	38,5	-	60,4	
37.	Jahe	50	-	550	
38.	Sapi Potong	5.934	-	135,309	
39.	Kerbau	158	-	2,149	
40.	Kambing	3.790	-	18,149	
41.	Babi	3.882	-	18,149	
42.	Ayam Kampung	177.530	-	194,142	
43.	Itik	5.925	-	2385	
44.	Ayan Ras (Pedaging)	293.000	-	208,030	
45.	Ayam Ras (Petelor)	4.713	-	1,678	

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan



#### **a. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bulungan dalam pembangunan pertanian pangan antara lain :

- 1) Kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan masyarakat di sektor ini relatif tinggi.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian, modal usaha petani serta kualitas sumber daya manusia petani dan penyuluh tidak sebanding dengan luas lahan yang tersedia.
- 3) Penguasaan teknologi pertanian masih rendah.
- 4) Kurangnya diversifikasi pangan, sehingga keberagaman permintaan pasar terhadap produk pertanian belum dapat terpenuhi.
- 5) Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian.
- 6) Kurangnya daya saing produk, menyangkut standar mutu komoditas pertanian.
- 7) Belum berperannya pihak swasta dalam pengembangan pertanian baik pada industri hulu maupun hilir terutama pada sub sektor pertanian pangan.

#### **b. Prediksi**

Pembangunan pertanian jangka panjang diarahkan untuk pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu melalui basis agroindustri yang diikuti dengan peningkatan daya saing produk hasil pertanian, penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha.

Masih luasnya lahan pertanian potensial yang dapat dikembangkan menjadi landasan bahwa ke depan produksi pertanian Kabupaten Bulungan dapat terus meningkat. Namun perlu dilakukan revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian serta peningkatan sumber daya manusia petani disamping terus melakukan pengkajian serta pemanfaatan teknologi tepat guna pertanian. Selain itu upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi serta diversifikasi produk unggulan pertanian terus dilanjutkan dan yang lebih penting lagi adalah terwujudnya kawasan andalan pertanian untuk pengembangan pelaku



agribisnis yang berdaya saing sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

- 1) Terwujudnya Kabupaten Bulungan sebagai sentra produksi beras yang selain untuk memenuhi kebutuhan lokal juga memberikan pasokan bagi daerah lain.
- 2) Terwujudnya suatu mekanisme yang efektif dalam pengelolaan hasil pertanian dan pemasarannya.
- 3) Terbentuknya sentra-sentra pertanian di semua wilayah kecamatan
- 4) melalui pemanfaatan lahan tidur yang selama ini tidak tergarap.
- 5) Terjadinya peningkatan dan pengembangan hasil-hasil produk pertanian lain sehingga meningkatkan pendapatan petani.

## **2.11. Perkebunan**

Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Bulungan antara lain kelapa, kopi, kakao, dan lada. Jika dibandingkan tahun lalu, secara umum hasil produksi komoditi tanaman perkebunan mengalami penurunan pada tahun 2005. Hal ini terkait dengan luas areal komoditi tanaman kopi yang luas areal dan produksinya menurun dari tahun sebelumnya. Produksi tanaman perkebunan untuk komoditi kelapa, kopi, kakao, dan lada adalah 7.503 ton; 82,4 ton; 434,4 ton dan 12,9 ton.

Untuk jenis komoditas kelapa sawit sampai sejauh ini usaha perkebunan yang ada di daerah masih dalam tahap tanam dan belum produksi. Namun dilihat dari perkembangannya, kelapa sawit akan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan perekonomian daerah.

### **a. Permasalahan**

Beberapa permasalahan bidang perkebunan yang dihadapi oleh Kabupaten Bulungan antara lain :

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi perkebunan, modal usaha petani serta rendahnya kualitas sumber daya manusia pada perkebunan rakyat.



- 2) Terpecah dan terbatasnya areal usaha perkebunan masyarakat yang disebabkan belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan ruang kawasan sentra produksi.
- 3) Terjadinya tumpang tindih kepentingan antara pengusaha dan masyarakat berkaitan dengan pembangunan perkebunan.
- 4) Belum berkembangnya industri pengolahan hasil perkebunan.
- 5) Kurangnya daya saing produk, menyangkut standar mutu komoditas perkebunan.
- 6) Masih rendahnya peran dan kesungguhan investasi swasta di sub sektor perkebunan.

#### **b. Prediksi**

Potensi lahan yang masih luas serta potensi pasar hingga ke Tawau (Malaysia) merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan melalui peningkatan produksi, peningkatan daya saing produk, penguatan sistem promosi pemasaran dan peningkatan sumber daya manusia.

Investor di bidang perkebunan cukup banyak yang berminat di Kabupaten Bulungan, sebagian telah diberikan izin dan telah melaksanakan kegiatan tahap awal di lapangan, namun hingga kini belum pada tahap produksi. Perbaikan iklim investasi akan dilakukan melalui kemudahan proses perizinan dan kepastian hukum, namun demikian pengawasan hingga tindakan tegas terhadap pelanggaran atas perijinan yang diberikan juga perlu dilakukan.

### **2.12. Kehutanan**

Hutan di Kabupaten Bulungan tahun 2005 mempunyai luas 1.386.356,54 hektar yang terbagi menjadi empat kelompok jenis hutan yaitu: hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan lainnya/kawasan budidaya non kehutanan.

Berkaitan dengan pengelolaan hutan tersebut tidak terlepas dari perusahaan HPH yang beroperasi. Pada tahun 2005 terdapat 3 HPH dengan luas areal 457.585 hektar.



Produksi kayu bulat untuk tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 76 persen bila dibandingkan dengan tahun 2004. Produksi 178.490,53 m<sup>3</sup> pada tahun 2004 meningkat menjadi 313.444 m<sup>3</sup> tahun 2005. Dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan produksi hasil hutan khususnya kayu bulat akan mengalami penurunan yang sangat drastis terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah di bidang kehutanan. Dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan produksi hasil hutan khususnya kayu bulat akan mengalami penurunan yang sangat drastis terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah di bidang Kehutanan dan adanya gangguan destruktif terhadap sumberdaya hutan seperti kebakaran maupun illegal logging.

#### **a. Permasalahan**

- 1) Masih adanya praktek illegal logging sehingga selain menimbulkan kerugian material bagi negara, juga semakin memperluas lahan kritis.
- 2) Terjadinya perambahan hutan yang disebabkan belum optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
- 3) Belum optimalnya pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran bidang Kehutanan.
- 4) Belum terciptanya industri yang efisien dan berdaya saing yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar.

#### **b. Prediksi**

Adanya perbaikan-perbaikan kebijakan bidang kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah diperkirakan akan menjamin keberadaan sumberdaya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan ke depan secara lestari melalui pengendalian, pengawasan dan tindakan hukum yang tegas. Dilakukannya revitalisasi sektor Kehutanan, utamanya industri pengolahan kayu, percepatan pemulihan lahan/DAS yang kritis, serta meningkatnya akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH dan melestarikannya dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan.



### 2.13. Peternakan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir populasi ternak di Kabupaten Bulungan yang terbesar adalah sapi. Untuk tahun 2005 populasi sapi di Kabupaten Bulungan sebesar 6.911 ekor; kemudian babi 3.958 ekor; kambing 3.816 ekor dan kerbau sebanyak 161 ekor.

Perkembangan populasi ternak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 16,46 persen; 1,96 persen; 0,69 persen dan 1,90 persen : ternak sapi, babi, kambing, dan kerbau.

Produksi daging pada tahun 2006 di Kabupaten Bulungan hanya mencapai 202,26 ton yang terdiri dari daging sapi 180,72 ton ; kerbau 2,11 ton ; dan kambing 19,43 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi daging pertahun rata-rata mencapai 528,38 ton. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan daging di Kabupaten Bulungan masih minus rata-rata 326,12 ton per tahun. Kebutuhan daging terutama sapi dan kambing biasanya akan semakin meningkat menjelang hari-hari besar keagamaan terutama hari raya qurban. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging daerah selama ini masih memerlukan pasokan dari luar daerah.

Populasi unggas pada tahun 2005 sebanyak 534.810 dengan rincian 187.057 ekor ayam buras, 6.279 ekor itik dan 341.474 ayam ras. Populasi unggas pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 11,15 persen bila dibandingkan dengan populasi pada tahun 2004. sedangkan untuk masing-masing jenis unggas juga mengalami kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Masing-masing kenaikan berturut-turut dari ayam buras, itik dan ayam ras adalah 5,37 persen, 5,97 persen dan 14,70 persen.

Sementara itu produksi telur pada tahun 2006 adalah sebesar 3.377,43 ton terdiri dari 74,57 ton telur ayam bukan ras ; 25 ton telur itik ; dan 3.277,86 ton telur ayam ras. Dilihat dari kebutuhan konsumsi telur oleh masyarakat, maka produksi telur ayam bukan ras masih surplus sebesar 11,30 ton per tahun ; telur itik minus 81,16 ton per tahun ; sedangkan telur ayam ras surplus sebanyak 2.751,32 ton per tahun. Wilayah yang memproduksi telur ayam buras dan telur itik berada pada seluruh kecamatan, sedangkan produksi telur ayam buras hanya terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Bunyu dan Sekatak.

**a. Permasalahan**

- 1) Belum optimalnya pengembangan ternak untuk kebutuhan daging lokal sehingga masih memerlukan pasokan dari luar daerah.
- 2) Pola usaha peternakan yang masih tradisional terutama pada aspek perkandangan dan komposisi pakan ternak.
- 3) Terbatasnya sumber bibit ternak yang disebabkan harga relatif tidak terjangkau oleh peternak.
- 4) Belum optimalnya pengendalian terhadap ancaman penyakit ternak yang disebabkan terbatasnya petugas kesehatan ternak.
- 5) Skala usaha peternakan yang belum ekonomis sehingga tidak banyak memberikan kontribusi tambahan pendapatan bagi peternak.

**b. Prediksi**

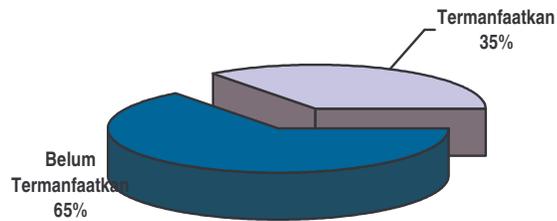
Revitalisasi sektor pertanian pada sub sektor peternakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 10 tahun ke depan melalui pemanfaatan teknologi produksi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penerapan sistem manajemen pengelolaan dan pemasaran yang baik, diperkirakan akan menjadikan sub sektor peternakan sebagai peluang investasi yang menarik dari sisi pemasaran terutama dengan posisi letak Kabupaten Bulungan secara regional dapat diakses baik melalui transportasi darat maupun laut.

**2.14. Perikanan dan Kelautan**

Kawasan pesisir dan laut kabupaten Bulungan merupakan kawasan yang penting karena kandungan potensi ekonomi kelautannya yang dapat dikembangkan. Produksi sub sektor perikanan terdiri dari jenis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tahun 2005 produksi perikanan mencapai 3.515,98 ton terdiri dari 2.459,26 ton perikanan tangkap dan sisanya 1.056,72 ton dari perikanan budidaya, dengan nilai produksi masing-masing sebesar 31,757 milyar dan 77,924 milyar. Pada tahun 2005 banyaknya rumah tangga perikanan di Kabupaten Bulungan terdiri dari 2.242 rumah tangga untuk perikanan tangkap dan 2.851 rumah tangga untuk perikanan budidaya.



**Grafik 1. Persentase Jumlah Rata-rata Penangkapan di Perairan Laut Terhadap Stock Assessment.**



Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan

**Tabel 2.10. Jenis Ikan dan Daerah Penyebarannya di Kabupaten Bulungan**

No	Jenis Ikan	Spesies	Daerah Penyebaran
1.	Ikan Sebelah	Psetodes sp	Hidup soliter terdapat di sepanjang pantai berlumpur
2.	Kerot – kerot	Therapon sp	Hidup bergrombol disepanjang pantai sampai pada kedalaman 40 m
3.	Gulamah	Otolithoides sp	Hidup bergerombol disepanjang pantai Kabupaten Bulungan
4	Bawal putih	Pampus sp	Hidup bergerombol terdapat di sepanjang perairan Kabupaten Bulungan pada kedalaman 10 – 60 m
5	Bawal Hitam	Formio niger	Hidup bergerombol terdapat di sepanjang perairan Kabupaten Bulungan pada kedalaman 10 – 60 m
6	Alu – alu	Sphyraena sp	Hidup soliter terdapat dilepas pantai Bulungan
7	Senangin/kuro	Eleutheronema sp	Terdapat di sepanjang pantai Kab. Bulungan sampai pada kedalaman 30 m
8	Selar	Selaroides sp	Sepanjang pantai Kab. Bulungan sampai pada kedalaman 30 meter
9	Kerapu Lumpur	Epinephelus sp	Terdapat di muara-muara sungai kecil
10	Puput/lelampa	Pellona sp	Tertangkap di sepanjang pantai Kab.
11	Kakap	Lates calcariper	Hidup soliter terdapat disepanjang pantai Kab. Bulungan
12	Bambangan	Lutjanus sp	Terdapat di sepanjang pantai Kab. Bulungan
13	Pari	Dasyatis sp	Sepanjang pantai Kab. Bulungan
14	Sembilang	Plotosus sp	Di muara-muara sungai kecil
15	Pepija/ikan lembek	Nomei sp	Terdapat di perairan pantai bagian selatan P. Bulungan
16	Cucut/hiu	Pristis/Spyrna	Sepanjang pantai sampai lepas pantai Kab. Bulungan



17	Tenggiri	Scomber sp	Sepanjang pantai sampai lepas pantai Kab. Bulungan
18	Teri	Stolephorus sp	Sepanjang pantai Kab. Bulungan
19	Selangat	Dorosoma chacunda	Sepanjang pantai Kab. Bulungan
20	Belanak	Mugil sp	Sepanjang pantai Kab. Bulungan
21	Cakalang	Katsuwonus pelamis.	Lepas Pantai Perairan Kab. Bulungan
22	Tongkol	Euthynnus affinis	Lepas Pantai Perairan Kab. Bulungan
21	Layang		Lepas Pantai Perairan Kab. Bulungan

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan

**Tabel 2.11. Jenis Udang Dan Moluska serta Daerah Penyebarannya di Perairan Kabupaten Bulungan**

No	Jenis	Spesies	Daerah Penyebaran
1	Udang Windu	P. monodon	Sepanjang pantai sampai pada Kedalaman 30 meter
2	Udang Putih	P. merguensis	Sepanjang pantai sampai pada Kedalaman 30 meter
3	Udang bintang (jerbung)	Metapeneaus sp.	Sepanjang Pantai Kab. Bulungan
4	Udang batu/udang merah	Metapeneaus sp.	Sepanjang Pantai Kab. Bulungan
5	Cumi-cumi/Sotong	Sepia sp./ Loligo sp.	Sepanjang pantai sampai lepas pantai Kab. Bulungan
6	Kepiting Bakau	Scylla sp.	Di sepanjang pantai Kab. Bulungan yang terdapat hutan bakau
7	Kepiting rajungan	Portonius sp.	Di sepanjang pantai Kab. Bulungan
8	Kerang Dara	Anadara sp.	Muara dan pesisir pantai

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bulungan

#### a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bulungan dalam pengembangan perikanan antara lain :

- 1) Menurunnya produktivitas lahan tambak berkaitan dengan produksi yang menggunakan bahan tidak ramah lingkungan.
- 2) Terjadinya degradasi lingkungan terutama hutan mangrove, yang salah satunya akibat dari aktivitas pembukaan lahan tambak yang tidak tertib. Akibatnya terjadi penurunan produksi perikanan terutama perikanan



- tangkap, mengingat fungsi mangrove salah satunya sebagai tempat pemijahan ikan/udang.
- 3) Sulitnya pengawasan terhadap penangkapan ikan/udang dengan menggunakan alat/bahan yang merusak lingkungan, seperti bom, trawl, bahan kimia dan lainnya yang dapat mengakibatkan rusaknya kualitas habitat biota laut dan berdampak pada menurunnya produksi perikanan.
  - 4) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi perikanan, baik budidaya maupun penangkapan.
  - 5) Terbatasnya sumberdaya manusia perikanan.
  - 6) Belum berkembangnya industri pengolahan hasil perikanan.
  - 7) Belum adanya pengaturan yang tegas terhadap pengelolaan pemasaran produk perikanan terutama tambak yang melakukan kegiatan budidaya di wilayah Kabupaten Bulungan, sedangkan proses ekspor dan pemasarannya dilakukan di daerah lain sehingga relatif tidak banyak memberikan kontribusi kepada penerimaan daerah.
  - 8) Berpotensi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan dan ekosistem biota laut dan pantai, sehingga diperlukan pengaturan dalam pengembangan dan pengelolannya.

#### **b. Prediksi**

Kebijakan pembangunan perikanan Kabupaten Bulungan dalam jangka panjang akan dilakukan dengan tetap memperhatikan ekosistem perairan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk menjaga kelestarian, kegiatan pengelolaan konservasi dalam bentuk perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari terhadap ekosistem perairan untuk kelanjutan pemanfaatannya .

Perlunya dilaksanakan kontrol dan pengendalian terhadap pembukaan lahan-lahan tambak baru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan, terutama yang mempunyai nilai ekonomis dan kualitas ekspor tinggi serta adanya



aturan mengenai pengelolaan pemasaran untuk produk perikanan budaya tambak sehingga akan memberikan kontribusi sebagai penerimaan daerah.

Di sisi lain, pengawasan dan penegakkan hukum terhadap tindakan illegal fishing yang dapat merugikan negara dan masyarakat harus semakin ditingkatkan.

## **2.15. Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam berupa bahan tambang dan bahan galian merupakan salah satu modal utama di Kabupaten Bulungan yang sangat potensial. Saat ini penambangan dan penggalian yang sudah berjalan adalah berupa pertambangan migas di Kecamatan Bunyu serta potensi yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Timur (Blok Bengara II), pertambangan emas di Kecamatan Peso dan pertambangan batubara yang tersebar di beberapa kecamatan. Sedangkan penggalian yang sudah berjalan adalah berupa penggalian batu gunung, batu gamping dan batu andesit.

Masih banyak lagi sumber daya mineral yang belum dimanfaatkan demikian pula pertambangan rakyat belum berkembang karena masih terbatasnya modal, pengetahuan dan pengalaman.

Kabupaten Bulungan merupakan bagian dari cekungan Tarakan yang meliputi area di sebelah Timur Laut Kalimantan membentang dari Semenanjung Mangkaliat di sebelah Selatan sampai Semenanjung Sempurna pada arah Utara. Cekungan Tarakan secara umum terbagi dalam empat sub-basin, yaitu Tidung, Bulungan, Berau dan Muara.

Potensi dan cadangan migas Kabupaten Bulungan meliputi Lapangan Bunyu yang terletak pada sub-basin Bulungan, Tarakan Basin. Sekuen yang produktif berada pada formasi Tabul dan Santul. Lapangan Bunyu pada kondisi awal mempunyai cadangan OOIP sebesar 474.593 MSTB dan OGIP sebesar 1.032.858 MMSCF. Cadangan minyak tersisa lapangan Bunyu status Januari 2004 diperkirakan sebesar 19.032 MSTB, sedangkan cadangan gas sebesar 340.208 MMSCF. Produksi kumulatif hingga Desember 2003 untuk minyak sebesar 91.592 MBBL dan gas sebesar 375.332 MMSCF.



Untuk lapangan Bangkudulis yang terletak pada Bulungan Sub-Basin, merupakan sub-basin terbesar dari Tarakan Basin, secara stratigrafi dibagi oleh Pertamina ke dalam empat unit satuan pengendapan, yaitu formasi Meliat, Formasi Tabul, formasi Tarakan dan formasi Bunyu. Cadangan total *Original Oil in Place* (OOIP) untuk kasus kombinasi cadangan P<sub>1</sub> dan P<sub>2</sub> adalah sebesar 26,21 juta STB. Sedangkan total OOIP untuk kasus P<sub>1</sub> adalah 5,95 juta STB. Data Pertamina – Medco per 3 September 2004 menyebutkan cadangan total gas pada Blok Simenggaris 2,3 TCF dan minyak sebesar 265 MMBO, sedangkan sumber lain menyebutkan total cadangan Blok ini untuk gas sebesar 2,009 TCF dan minyak sebesar 316,9 MMBO. Blok Simenggaris terletak di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Perkiraan total cadangan gas yang berada pada Kabupaten Bulungan diperkirakan sebesar 1,04 TCF dan minyak sebesar 164,05 MMBO.

Blok Bengara II merupakan bagian dari sistem delta Bulungan yang terbentuk dari sungai dan interpretasi seismik diidentifikasi adanya 15 play, 27 prospek, 6 lead dan lebih dari 300 anomali seismik. Akumulasi hidrokarbon diperkirakan sebesar 50 – 200 MMBO atau lebih dan potensial gas sebesar 300 BCF sampai 1,2 TCF. Merujuk pada *special report* kontraktor Apex oil and Gas Ltd. tahun 1997, potensial 16 IPA untuk Blok Bengara II diperkirakan sebesar 4,3 TCF. Estimasi awal cadangan dengan memperhitungkan resiko menghasilkan cadangan (IGIP) sebesar 963 BCF. Dengan asumsi rata-rata *recovery factor* untuk gas sekitar 80% maka *recoverable reserve* diperkirakan sebesar 770,3 BCF.

Produksi minyak rata-rata Lapangan Bunyu tahun 2003 sebesar 47.637 BBL per bulan, produksi sumur rata-rata diperkirakan sebesar 1.488,57 BBL/bulan atau sekitar 49,62 BOPD untuk masing-masing sumur. Jika tidak dilakukan upaya-upaya peningkatan produksi, maka produksi Lapangan Bunyu akan mengalami penurunan sekitar 31% per tahun. Peramalan produksi minyak Lapangan Bunyu, jumlah total diperkirakan sebesar 2.375,59 MSTB antara tahun 2004 – 2014, sehingga pada akhir tahun 2004 tersebut cadangan tersisa sekitar 16.656,46 MSTB.

Produksi gas untuk Lapangan Bunyu tahun 2003 rata-rata per bulan sebesar 234.445 MSCF atau 23.444 MSCF/hari, sehingga produksi masing-masing



sumur diperkirakan sebesar 781,5 MSCF/hari. Dalam tahun-tahun mendatang produksi gas lapangan Bunyu akan mengalami penurunan sekitar 5,5% per tahun. Jika tidak dilakukan upaya-upaya peningkatan produksi pada Lapangan Bangkudulis, total produksi minyak tahun 2004 – 2022 berdasarkan peramalan menggunakan *decline curve analysis* diperkirakan sebesar 5.239.577,33 BBL. Sisa cadangan pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 710.422,67 STB.

Lapangan Bangkudulis sesuai rencana pengembangan lapangan, akan dilakukan pemboran sebanyak 3 (tiga) sumur produksi minyak, sedangkan gas tidak diproduksi karena tidak memiliki cadangan gas di lapangan ini. Produksi awal diperkirakan sebesar 600 BOPD, dengan demikian jumlah produksi awal untuk tiga sumur diperkirakan sebesar 1.800 BOPD. Pada lapangan Simenggaris diasumsikan akan diproduksi dengan menggunakan 4 (empat) sumur dengan laju produksi per sumur sebesar 625 BOPD, Total produksi dalam 20 tahun ke depan diperkirakan sebesar 8.015,6 MSTB. Dengan demikian cadangan tersisa lapangan Simenggaris pada akhir tahun 2024 diperkirakan sebesar 8.388,4 MSTB. Sementara itu total produksi gas selama 20 tahun ke depan diperkirakan sebesar 438 BSCF, dengan demikian sisa cadangan hingga tahun 2022 sebesar 394 BSCF.

Pada Blok Bengara II hingga saat ini masih dalam tahap eksplorasi, apabila tahap ini sukses diperkirakan produksi minyak dan gas akan dapat dilakukan pada tahun 2008 dengan laju produksi diperkirakan sebesar 1.800 BOPD. Dalam 20 tahun ke depan (tahun 2027) total produksi minyak diperkirakan sebesar 6.355,24 MSTB, sehingga pada akhir tahun 2027 cadangan tersisa diperkirakan sebesar 3.644,7 MSTB. Untuk produksi gas pada Blok Bengara II selama 20 tahun ke depan (2008 – 2027) diperkirakan sebesar 438 BCF, sisa cadangan tahun 2027 diperkirakan sebesar 525,27 BCF.

Sementara itu untuk penambangan batu bara yang (sesuai jumlah ijin yang dikeluarkan) sedang melakukan eksplorasi dan bahkan sudah ada yang produksi. Untuk bahan tambang jenis logam dasar (emas, perak, nikel, dsb), sampai sejauh ini hanya dilakukan secara tradisional oleh masyarakat dan belum ada investasi oleh swasta.



Mengingat eksploitasi bahan tambang berpotensi untuk menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka ijin pertambangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap pemanfaatan lahan pasca penambangan serta melaksanakan reklamasi sebagai kewajiban dalam Andal, RKL dan RPL atau UKL dan UPL masing-masing perusahaan. Dan dalam kaitan kewajiban reklamasi tersebut perusahaan harus menyediakan pembiayaannya sebagaimana diatur dalam SK. Dirjen Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi.

**a. Permasalahan**

- 1) Produksi migas Bunyu semakin turun, yang dapat mengakibatkan tidak diterimanya bagi hasil oleh Kabupaten Bulungan sebagai daerah penghasil.
- 2) Belum adanya institusi bisnis milik pemerintah daerah yang menggarap sektor migas.
- 3) Peran daerah di sektor hulu migas masih sangat terbatas disebabkan kewenangan sektor ini masih berada di pusat.
- 4) Besarnya biaya pengembangan lapangan migas baru disebabkan status daerah yang belum dikembangkan dengan baik dan rata-rata prospek migas terletak di struktur yang dalam dengan sebaran yang terpencar ke dalam beberapa struktur dan lapangan (pengendapan tipe deltaic).
- 5) Belum dikelolanya sumber daya alam lainnya terutama jenis logam dasar (emas, perak, nikel, dsb) sebagai sumber potensial penerimaan dan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan kesempatan kerja baru.
- 6) Berpotensi menimbulkan masalah yang serius terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan jika tidak dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan (reklamasi) secara sungguh-sungguh.
- 7) Data-data kegiatan sektor migas dan hasil tambang lainnya belum dapat diakses dengan baik sehingga sulit untuk mengintegrasikan ke dalam kebijakan strategis Kabupaten Bulungan.



- 8) Belum dimanfaatkannya gas bumi yang terbuang (flare) untuk konsumsi masyarakat dan untuk dipasarkan karena belum adanya infrastruktur migas seperti jaringan pipa untuk pasar gas terdekat.
- 9) Masih adanya ketidakjelasan variable dasar dalam penghitungan Bagi Hasil migas oleh pemerintah sehingga dianggap merugikan daerah penghasil.

#### **b. Prediksi**

Dengan status cadangan sebesar 340.308 MMSCF, (per 1 Januari 2004) produksi migas lapangan Bunyu masih dimungkinkan untuk ditingkatkan apabila dilakukan eksplorasi yang lebih dalam lagi. Untuk sementara waktu, penurunan produksi migas lapangan Bunyu dapat tertutupi apabila eksplorasi dan eksploitasi pada Blok Bengara II dapat diwujudkan yang diperkirakan pada tahun 2007. Demikian juga halnya apabila cadangan Blok Bangkudulis dan Blok Simenggaris (wilayah Bulungan batas Nunukan) sudah beroperasi. Dengan kecenderungan meningkatnya harga di pasar dunia, maka potensi migas Kabupaten Bulungan akan semakin ekonomis, terbukanya peluang kegiatan usaha industri hilir/ migas oleh BUMD, (saham maksimal 10%), pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih baik, terbukanya peluang pengembangan gas bumi untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sebagai alternatif pengganti BBM, dikelolanya dengan baik dan lestari sumberdaya lainnya sehingga memperluas kesempatan kerja baru bagi masyarakat, tersedianya akses data yang lebih baik serta adanya peningkatan Bagi Hasil Migas untuk peningkatan pembangunan daerah.

### **2.16. Pariwisata**

Dalam pendekatan pembangunan wilayah dikenal adanya kawasan strategis, kawasan prioritas dan kawasan andalan yang secara tidak langsung mengisyaratkan konsistensi kesepakatan, masih relevannya pendekatan kebijakan pusat pertumbuhan yang bermaksud untuk menimbulkan dan mengaglomerasikan investasi melalui pembangunan pada suatu kawasan, sebagai suatu cara yang efisien untuk mendorong pertumbuhan dan



perkembangan kawasan yang salah satunya dapat sebagai kawasan pengembangan pariwisata di wilayah kabupaten Bulungan.

Sejalan dengan keberhasilan pembangunan sektoral, maka terlihat gejala yang menuntut perhatian pada dimensi ruang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah khususnya pada daerah perkotaan, serta belum menyentuh pemberdayaan potensi kawasan di Kabupaten Bulungan dengan kekhasannya untuk pengembangan pariwisata.

Jika kita lihat sumber dan potensi kepariwisataan yang tersebar di Kabupaten Bulungan masih belum tergali semuanya, hal ini memerlukan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Menyadari akan potensi yang dimiliki serta pentingnya arti dan peranan pariwisata baik sebagai penghasil devisa maupun sebagai alat memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja, maka pemerintah Kabupaten Bulungan telah menggariskan bahwa dalam era globalisasi peran sektor pariwisata sebagai unsur pembangunan daerah perlu ditingkatkan.

Potensi obyek wisata Kabupaten Bulungan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan sejarah yang tersebar di beberapa kecamatan yang sampai pada saat ini belum dikembangkan secara optimal ;

1. obyek wisata alam

mencakup atraksi yang berada di laut maupun darat, flora, fauna, la keaslian alam dan lingkungan sekitarnya (tirta kuning di Tanjung palas timur dan pantai Nibung serta Pulau Burung di Bunyu) ;

2. obyek wisata sejarah

meliputi tempat-tempat yang mempunyai arti penting dalam sejarah nasional, termasuk tempat-tempat mempunyai nilai arkeologi atau religi, bangunan-bangunan bersejarah dan museum-museum yang memamerkan keunikan kondisi alam ;

3. obyek wisata seni dan budaya mencakup segala aspek kesenian baik kontemporer maupun tradisional ;

4. obyek wisata yang merupakan kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari secara tradisional dalam bentuk upacara-upacara adat dan lainnya ;



5. obyek wisata buatan, mencakup fasilitas-fasilitas rekreasi baik yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Secara struktural kewilayahan, pengembangan pariwisata Kabupaten Bulungan meliputi :

1. Kawasan Pengembangan Wisata (KPW) Tanjung Palas dengan simpul pengembangan adalah :
  - a) SPW : Tanah Kuning – Mangkupadi
  - b) SPW : Tanjung Palas
  - c) SPW : Tanjung Selor
  - d) SPW : Delta Kayan
2. Kawasan Pengembangan Wisata (KPW) II Long Peso adalah :
  - a) SPW : Long Bia
  - b) SPW : Apau Ping
3. Kawasan Pengembangan Wisata (KPW) III Sekatak-Sesayap adalah :
  - a) SPW : Sesayap
4. Kawasan Pengembangan Wisata (KPW) IV Pulau Bunyu adalah :
  - a) SPW : Pantai Nibung
  - b) SPW : Pulau Burung.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kawasan ditentukan aksesibilitas dan pintu gerbang wisata sebagai berikut ;

1. Pintu Gerbang Regional adalah Kota Tanjung Selor.
2. Pintu Gerbang untuk masing-masing KPW adalah ;
  - a) Kota Tanjung Selor untuk KPW I
  - b) Kota Tanjung Selor untuk KPW II
  - c) Kota Tarakan untuk KPW III
  - d) Kota Tarakan untuk KPW IV.

#### **a. Permasalahan**

- 1) Belum optimalnya pengembangan obyek wisata dan seni budaya daerah;
- 2) Belum optimalnya informasi dan promosi produk-produk wisata dan seni budaya daerah;



- 3) Belum optimalnya dukungan infrastruktur daerah dalam menunjang pengembangan wisata daerah terutama akomodasi dan transportasi;
- 4) Masih rendahnya keterlibatan swasta dalam mendukung pengembangan industri wisata daerah;
- 5) Belum optimalnya upaya-upaya untuk memelihara dan melestarikan obyek wisata dan seni budaya daerah yang ada.

#### **b. Prediksi**

- 1) Peningkatan aksesibilitas sarana transportasi menuju kawasan pengembangan wisata (KPW).
- 2) Meningkatkan potensi even budaya dan kesenian daerah yang belum terekspose ke tingkat nasional dan internasional.
- 3) Meningkatkan sistem informasi dan promosi pariwisata secara terpadu
- 4) Meningkatkan peran swasta dalam pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

### **2.17. Tata Guna Lahan**

Pelaksanaan pembangunan tentunya akan selalu bersinggungan dengan kemungkinan perubahan terhadap lingkungan sebagai konsekuensinya. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan dibutuhkan suatu komitmen penting bagi Pemerintah Daerah maupun *stake holders* untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sehingga langkah pertama yang perlu diambil terlebih dahulu untuk pembangunan adalah dengan menetapkan tata guna lahan yang ada di Kabupaten Bulungan.

Untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai wilayah yang unggul dalam bidang Agroindustri tentu saja tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana wilayah yang memiliki interkoneksi saling berkaitan secara serasi seimbang dan dinamis sesuai kebutuhan ruang wilayahnya.

Berkaitan hal tersebut pada tahun 2004 telah dilaksanakan penelitian oleh Pemerintah Daerah dalam penentuan suatu kawasan industri sebagai implementasi dari penataan ruang wilayah daerah. Penentuan ruang kawasan industri tersebut dimaksudkan untuk memberikan *guided* bagi para investor agar



dalam melaksanakan kegiatannya dapat lebih terjangkau fasilitas pemerintah, disamping sebagai regulasi bagi pemerintah dalam menentukan fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya guna mencegah adanya *overlapping* fungsi lahan serta *kesemrawutan* fungsi lahan selain itu terkait penetapan kawasan industri tersebut juga telah ditetapkan kawasan sentra produksi sebagai pendukung keterkaitan industri hulu dan industri hilir.

Tata guna lahan di suatu wilayah merefleksikan bagaimana perencanaan dipersiapkan sebelumnya dan juga bagaimana potret kondisi sosial masyarakat. Penduduk bisa bertambah dan pembangunan terus berlangsung, tetapi luas lahan tidak akan bertambah serta lingkungan akan semakin terdegradasi. Pembangunan selalu mempunyai resiko, terutama wilayah yang kepadatan penduduknya cukup tinggi. Kabupaten Bulungan dengan cakupan wilayah yang cukup luas dan kepadatan penduduk masih rendah, mempunyai potensi yang besar dalam pemanfaatan lahan untuk berbagai bentuk kegiatan pengembangan wilayah.

Pola tata guna lahan di Kabupaten Bulungan sebagian besar masih didominasi oleh kawasan hutan, baik hutan lindung maupun kawasan budidaya kehutanan. Sedangkan sisanya kawasan budidaya non kehutanan dipergunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan, ruang terbuka hijau, hingga pemukiman.

**Tabel 2.12. Tata Guna Lahan di Kabupaten Bulungan**

Uraian	Luas (km <sup>2</sup> )
A. Dataran	15.587,90
1. Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)	7.666,44
2. Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)	5.720,56
3. Hutan Lindung	2.200,90
B. Perairan	2.422,60
Kabupaten Bulungan	18.010,50

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan

Untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka pembangunan harus mengacu pada pola pengembangan tata ruang yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari pola



pembangunan sektoral. Dalam RTRW Kabupaten Bulungan, pemanfaatan ruang untuk saat sekarang maupun ke depannya terdiri dari kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan prioritas.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam serta sumber daya buatan guna pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung yang dimaksud meliputi wilayah daratan dan lautan yang terdiri dari :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahan, yaitu kawasan hutan lindung (hutan kota Bundayati Tanjung Selor, Pulau Burung Kecamatan Bunyu, dll).
2. Kawasan suaka alam, yaitu kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa dan suaka alam laut/cagar alam taman laut (belum ada).
3. Kawasan lindung terbatas, yaitu kawasan hutan produksi terbatas.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang berada di luar kawasan lindung yang berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan bagi kepentingan produksi maupun bagi pemenuhan kebutuhan pemukiman. Kawasan ini terdiri dari :

1. Kawasan pemukiman
2. Kawasan pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan lahan kering dan tanaman tahunan/perkebunan dan peternakan.
3. Kawasan hutan produksi, mencakup hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi.
4. Kawasan tidak terbangun untuk kegiatan usaha, contohnya kawasan pertambangan rakyat.
5. Kawasan pertambangan (khusus), yaitu pertambangan minyak dan gas bumi serta batubara.
6. Kawasan penyangga.

Kawasan prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangan dan penanganannya. Di Kabupaten Bulungan, kawasan prioritas dibagi menjadi :

1. Kawasan strategis, yaitu kawasan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, yang termasuk dalam kawasan ini adalah Kecamatan Tanjung



Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Bunyu.

2. Kawasan khusus, yaitu kawasan yang berkaitan dengan kekhasan dalam pengelolaan dan pengembangan sesuai dengan potensi wilayah tersebut.

**a. Permasalahan**

Permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Bulungan, antara lain :

- 1) Belum optimalnya sosialisasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang (RTRW);
- 2) Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang;
- 3) Belum selarasnya ketetapan ruang antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kaltim;
- 4) Konflik antar kepentingan baik di tingkat masyarakat, kepentingan pembangunan serta investasi daerah berkaitan dengan pemanfaatan ruang;

**b. Prediksi**

Penataan ruang pembangunan daerah Kabupaten Bulungan penekanan tidak hanya pada aspek struktur ruang, tetapi juga ke depan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan serta berdasarkan pertimbangan aspek pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan letak Kabupaten Bulungan yang cukup strategis, maka perlu ditetapkan jaringan perekonomian daerah dan peningkatan aksesibilitas, yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan daerah-daerah sentra produksi dan antar kawasan pembangunan (pedalaman, perkotaan dan pesisir). Dengan demikian diharapkan terjadi pemerataan terhadap pertumbuhan wilayah, sinerginya fungsi antar kawasan budidaya dan lindung, serta meningkatnya aksesibilitas antar wilayah. Dalam kaitan itu perangkat kebijakan yang tegas sudah harus disusun sehingga pemanfaatan ruang dan lahan sesuai peruntukannya secara tertib dan kondusif.



## 2.18. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup di Kabupaten Bulungan selain memberikan kontribusi terhadap fungsi ekologis yang strategis juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah, namun dalam pengelolaannya perlu diimbangi dengan pengawasan agar dapat berkelanjutan.

Kebijakan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bulungan saat ini belum diaplikasikan sepenuhnya, hal ini tergambar secara faktual pada upaya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut. Kecenderungan yang terjadi adalah pemanfaatan yang bersifat eksploitatif dan destruktif, karena semata-mata hanya bertujuan memaksimalkan keuntungan (*economic rent*) melalui pengurusan sumberdaya alam secara besar-besaran (*deflasi*), tanpa mengindahkan aspek-aspek kelestarian beserta upaya konservasinya. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka akan menjadi ancaman serius terhadap kelestarian sumber daya pesisir dan laut yang pada akhirnya menimbulkan suatu fenomena kelangkaan sumber daya (*resource scarcity*) di wilayah Kabupaten Bulungan di masa mendatang.

Hutan mangrove di wilayah Kabupaten Bulungan merupakan salah satu ekosistem sumber daya pesisir yang memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi khususnya masyarakat desa pantai. Berdasarkan interpretasi Citra Landsat dari PUSPICS UGM tahun 2003, bahwa luas total kawasan pesisir kurang lebih 385.097,86 ha dengan garis pantai kurang lebih 381,756 km. Dari luasan tersebut yang termasuk kawasan mangrove adalah sebesar 198.544,52 ha serta kawasan pertambakan sebesar 92.000 ha dan pemukiman 500 ha. Dari total luas tambak tersebut, yang termasuk tambak produktif dan telah diinventarisir oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan adalah 49.826,21 ha.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNMUL pada tahun 2004 menunjukkan bahwa nilai manfaat total dari ekosistem mangrove adalah sebesar Rp. 9.189.461.713.117 / tahun dari luasan mangrove yang tersisa yaitu 198.544,52 ha atau sama dengan Rp. 46.284.137/ha/th. Manfaat terbesar (86,48%) diperoleh dari manfaat langsung hutan mangrove yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.



Mengingat besarnya nilai manfaat hutan mangrove bagi masyarakat dan organisme lainnya, maka dipandang perlu dilakukan upaya rehabilitasi dan konservasi mangrove yang mengalami degradasi lingkungan baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Demikian pula hal yang sama dengan pengelolaan hutan yang terdapat di daerah pedalaman, sehingga ke depannya pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan.

Selain itu kondisi faktual pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bulungan masih menunjukkan adanya praktek penebangan liar dan konversi lahan yang menimbulkan dampak luas terhadap kerusakan ekosistem pada tatanan DAS.

Citra pertambangan yang merusak lingkungan. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (open pit mining), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa izin (PETI) yang sangat merusak lingkungan.

#### **a. Permasalahan**

Permasalahan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bulungan, antara lain :

- 1) Terbatasnya pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan;
- 2) Alokasi dana yang tersedia untuk pelestarian lingkungan relatif masih sangat kecil yaitu rata-rata sebesar 0,27% per tahun;
- 3) Kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat untuk melestarikan lingkungan;
- 4) Tidak seimbangny perencanaan dan pelaksanaan antar bidang pembangunan yang berkaitan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan.
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan RTRW dan AMDAL dalam pelaksanaan pembangunan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.



## **b. Prediksi**

Pendekatan yang dilakukan untuk pengelolaan lingkungan yang lestari, haruslah dilakukan untuk kepentingan jangka panjang dan bersifat efisiensi dengan memperhatikan ambang batas kemampuan lingkungan.

Dengan adanya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Bulungan untuk jangka panjang maka akan tercipta :

- 1) Akses informasi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
- 2) Peningkatan peran Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Peran kelembagaan non pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup;
- 4) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- 5) Pengawasan dan penegakkan hukum secara adil terhadap perusakan lingkungan.
- 6) Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang lebih konsisten.

## **2.19. Perhubungan dan Transportasi**

Perkembangan kondisi infrastruktur menunjukkan peningkatan sangat positif walaupun dirasakan masih ketinggalan. Kemajuan di bidang ini dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator infrastruktur wilayah diantaranya adalah : pelayanan transportasi di Kabupaten Bulungan meliputi darat, laut, sungai dan udara. Pemerintah Kabupaten Bulungan secara bertahap dalam jangka panjang berkomitmen untuk terus berusaha membuka wilayah yang masih terisolir sehingga diharapkan ke depan seluruh wilayah akan dapat di tempuh melalui akses jalan darat.



Panjang jalan yang ada di Kabupaten Bulungan pada tahun 2002 adalah 708.257 Km meningkat menjadi 856.367 Km pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 menjadi 993.181 Km yang terdiri dari jalan Aspal, kerikil dan tanah. Perkembangan panjang jalan tersebut dipicu oleh adanya perkembangan dan penyebaran penduduk yang semakin luas sehingga menjadikan prioritas bagi pemerintah daerah untuk membuka isolasi kantong-kantong permukiman. Apabila dilihat dari jenis permukaan jalan telah di aspal sepanjang 198,734 Km, sedangkan dari kondisinya sebesar 63,8 % dalam kondisi sedang hingga baik adapun sisanya berupa jalan tanah dengan kondisi rusak hingga rusak berat. Hingga saat ini, panjang ruas jalan Negara yang telah di tingkatkan adalah 134,00 km, jalan Propinsi adalah 271,50 km, dan jalan Kabupaten adalah 856,367 km.

Pergerakan penumpang di dalam kota maupun menuju daerah bawahan dan hinterland dilayani oleh keberadaan moda transportasi berupa angkutan umum mini bus, wagon, dan angkutan kota, serta angkutan ojek untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bulungan berdasar dari data Polres Bulungan meningkat dari tahun 2002 sebanyak 1.626 kendaraan menjadi 2.410 unit pada tahun 2005 yang terdiri dari kendaraan station wagon sebanyak 192 buah, mobil barang sebanyak 83 buah.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor darat tersebut didominasi oleh kendaraan roda dua selama kurun waktu empat tahun dari 418 unit roda dua menjadi 2.410 unit pada tahun 2005.

Pembangunan Terminal Induk di Km 2 dimaksudkan sebagai terminal Antar Kota/Kabupaten Dalam Propinsi (AKDP) untuk sementara waktu pemanfaatannya belum optimal, namun dalam 5 sampai 10 tahun ke depan seiring dengan peningkatan perekonomian daerah diproyeksikan keberadaan terminal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

**Tabel 2.13. Panjang Jalan Negara Menurut Keadaan Jalan Tahun 2003 – 2005 (Km).**

<b>Keadaan</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
I. Jenis Permukaan	752,300	856,367	993,181
- Aspal	148,240	176,160	198,734
- Kerikil	145,000	175,609	270,640
- Tanah	438,000	504,598	523,807
- Tidak dirinci	20,900	-	-
II. Kondisi Jalan	752,300	856,367	993,181
- Baik	163,550	144,722	167,296
- Sedang	154,922	371,466	466,497
- Rusak	415,532	110,695	119,904
- Rusak Berat	18,300	229,484	239,484
III. Kelas Jalan	752,300	856,367	993,181
- Kelas I	-	-	-
- Kelas II	-	-	-
- Kelas III	-	-	-
- Kelas III a	-	-	-
- Kelas III b	-	-	-
- Kelas III C	-	856,367	993,181
- Kelas tidak dirinci	752,300	-	-

Sumber : BPS - Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2006

Dari data tahun 2005, menunjukkan bahwa lalu lintas antar pulau yang melalui pelabuhan Tanjung Selor meliputi kapal tambat sebanyak 6.888 kali dengan jumlah penumpang naik sebanyak 146.818 orang; mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2004 yang berjumlah 16.717 orang. Sedangkan yang turun tercatat sebanyak 144.497 orang.



Semenjak telah dibangunnya pelabuhan dagang Pada tahun 2004 aktivitas bongkar muat barang maupun kendaraan roda dua di pelabuhan Tanjung Selor mengalami peningkatan yang sangat pesat, ini dikarenakan peningkatan fasilitas pelabuhan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dilihat dari arus bongkar barang yang pada tahun 2003 hanya sebanyak 68.926 ton/m<sup>3</sup> menjadi 34.436.118,54 ton/m<sup>3</sup> pada tahun 2005, dari data yang ada, banyaknya armada yang beroperasi pada tahun 2004 jumlahnya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari kendaraan kapal motor, speed boat, long boat dan lainnya dengan total 146 buah. Dari jenis armada diatas yang terbanyak adalah speed boat yaitu sebanyak 135 buah.

Dengan kondisi geografis Kabupaten Bulungan yang terdiri atas 51 pulau yang terpisah oleh laut dan sungai. Kondisi ini mengakibatkan akses transportasi antar daerah di Kabupaten Bulungan maupun ke Kabupaten/Kota lain tidak dapat dijangkau dengan transportasi darat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah membangun pelabuhan termasuk fasilitas gudangnya di Kota Tanjung Selor yang cukup untuk memenuhi keperluan bongkar muat manusia dan barang yang selama ini berfungsi sebagai pintu utama masuknya kebutuhan masyarakat Tanjung Selor dan sekitarnya.

Dari data tahun 2005, menunjukkan bahwa lalu lintas antar pulau yang melalui pelabuhan Tanjung Selor meliputi kapal tambat sebanyak 6.888 kali dengan jumlah penumpang naik sebanyak 146.818 orang; mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2004 yang berjumlah 16.717 orang. Sedangkan yang turun tercatat sebanyak 144.497 orang.

Pada tahun 2004 aktivitas bongkar muat barang maupun kendaraan roda dua di pelabuhan Tanjung Selor mengalami peningkatan yang sangat pesat, ini dikarenakan peningkatan fasilitas pelabuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari arus bongkar barang yang pada tahun 2003 hanya sebanyak 68.926 ton/m<sup>3</sup> menjadi 34.436.118,54 ton/m<sup>3</sup> pada tahun 2005.

Dari data yang ada, banyaknya armada yang beroperasi pada tahun 2004 jumlahnya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari kendaraan kapal motor, speed boat, long boat



dan lainnya dengan total 146 buah. Dari jenis armada diatas yang terbanyak adalah speed boat yaitu sebanyak 135 buah.

Untuk jangka menengah dan jangka panjang, melihat kecenderungan arus penumpang dan barang yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah memprogramkan untuk membangun Pelabuhan Ferry yang representatif di Desa Ancam Kecamatan Tanjung Palas Utara. Pembangunan pelabuhan ferry ini akan membuka akses perekonomian masyarakat bukan saja di Kecamatan Tanjung Palas Utara melainkan seluruh kecamatan di Kabupaten Bulungan seiring dengan meningkatnya akses transportasi darat Trans Kalimantan yang telah menghubungkan Kabupaten Bulungan dengan Malinau, Kabupaten Nunukan Serta Kabupaten Berau. Selanjutnya pelabuhan Ferry Ancam akan menjadi ujung tombak perhubungan antar pulau meliputi Kota Tarakan, Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat dan Kabupaten Nunukan melalui akses laut.

Untuk mendukung terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus Industri (KEKI) serta meningkatnya kebutuhan pelayanan transportasi laut seiring dengan berkembangnya produk-produk industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan maka pembangunan pelabuhan laut yang lebih representatif sudah dapat terwujud pada akhir lima tahun keempat RPJPD. Alternatif lokasi pembangunan pelabuhan laut yang mungkin dapat dilakukan selain di desa Tanah Kuning adalah melalui kajian terhadap lokasi lain berdasarkan pertimbangan teknis dan pembiayaannya.

Sektor perhubungan udara merupakan model transportasi yang sangat berkembang saat ini, dan sarana ini efektif dalam melaksanakan mobilitas manusia dan barang. Angkutan udara di Kabupaten Bulungan dapat digambarkan melalui arus penerbangan dari bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor.

Arus lalu lintas pesawat udara meningkat pesat pada Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor sejak akhir tahun 2001 dengan beroperasinya armada penerbangan jenis ATR-42 yang mempunyai kapasitas *seat* lebih besar..

Arus keberangkatan pada tahun 2005 sebanyak 931 penerbangan, untuk arus penumpang selama tahun 2005 berangkat 8.897 orang dan datang sebanyak 8.437 orang. Barang yang dibongkar sebanyak 44.366 kg dan muat



42.242 kg, untuk bongkar bagasi sebanyak 52.323 Kg dan muat sebanyak 91.535 Kg Sedangkan untuk pos/paket yang dimuat sebanyak 1.737 kg.

Mengingat Kota Tanjung Selor merupakan calon ibu kota propinsi Kalimantan Utara, maka sebelum terwujudnya rencana pembangunan bandara di desa Sajau sebagaimana DED yang telah dibuat, langkah alternatif yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah memaksimalkan kapasitas bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor sebelum berakhirnya lima tahun pertama RPJPD ini

Selain moda transportasi darat dan air tersebut moda transportasi udara merupakan salah satu prasarana yang berkembang saat ini. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan sarana transportasi udara dalam 20 tahun ke depan, Pemerintah Daerah telah menyusun DED Bandara Sajau.

Arus keberangkatan pada tahun 2005 sebanyak 931 penerbangan, untuk arus penumpang selama tahun 2005 berangkat 8.897 orang dan datang sebanyak 8.437 orang. Barang yang dibongkar sebanyak 44.366 kg dan muat 42.242 kg, untuk bongkar bagasi sebanyak 52.323 Kg dan muat sebanyak 91.535 Kg Sedangkan untuk pos/paket yang dimuat sebanyak 1.737 kg.

**Tabel 2.14. Nama, Panjang, Kondisi dan Status Lapangan Terbang Menurut Kecamatan Tahun 2005.**

Kecamatan	Nama Lapangan	Panjang Landasan (M)	Kondisi Lapangan	Stength
Tanjung Selor	Tanjung Harapan	1200	Hotmix	ATR-42 & F.27
Tanjung Palas	Kaburau	700	Grass	BN - 2A
Peso	Long Bia	450	Clay/Grass	C - 185
Bunyu	Pulau Bunyu	1000	Aspal	Dash - 7

Sumber : BPS - Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2006



#### **a. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bulungan dalam pengembangan perhubungan dan transportasi antara lain :

- 1) Masih kurangnya sinkronisasi perencanaan transportasi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.
- 2) Belum sepenuhnya kecamatan di Kabupaten Bulungan terdapat jaringan transportasi baik itu dari pusat kawasan ke sub pusat wilayah maupun dari pusat kawasan ke kabupaten.
- 3) Belum tersedianya sub terminal didalam kota yang akan menghubungkan antar kota di Kabupaten Bulungan.
- 4) Belum berkembangnya sistem transportasi dalam wilayah khususnya yang berhubungan dengan trayek angkutan wilayah.
- 5) Masih kurangnya kualitas prasarana dermaga beserta fasilitasnya.
- 6) Belum tersedianya sarana pergudangan dengan sarana angkutnya yang memadai sebagai tempat penyimpanan barang.
- 7) Tingginya tingkat sedimentasi sungai sehingga terjadinya pendangkalan.
- 8) Belum adanya pemisahan antara dermaga barang dan penumpang di tiap-tiap kecamatan kecuali Tanjung Selor dan Bunyu.

#### **b. Prediksi**

Untuk jangka menengah dan jangka panjang, melihat kecenderungan arus penumpang dan barang yang terus diperkirakan Pelabuhan Ferry yang lebih representatif di Desa Ancam Kecamatan Tanjung Palas Utara sebelum berakhirnya lima tahun pertama RPJPD ini sudah dapat direalisasikan dan dioperasikan penggunaannya. Sedangkan untuk aksesibilitas penumpang dan barang berskala besar untuk kepentingan jangka panjang, maka diperkirakan sebelum berakhirnya RPJPD ini telah terwujud pembangunan pelabuhan laut yang berfungsi melayani akses transportasi dengan skala regional, nasional maupun internasional.



Kabupaten Bulungan yang mempunyai luas 18.010,50 km<sup>2</sup> dan terdiri atas 13 kecamatan masih memerlukan ruas jalan baru sehingga memungkinkan tersedianya akses bagi wilayah-wilayah yang selama ini terisolir untuk berkembang, dan ini diperlukan waktu yang cukup dengan pembiayaan yang sangat besar. Hingga saat ini panjang ruas jalan Negara yang telah di tingkatkan adalah 134,00 km, jalan Propinsi adalah 271,50 km, dan jalan Kabupaten adalah 856,367 km.

Saat ini untuk beberapa kecamatan yang daerahnya memang terpisah daratan dengan Kota Tanjung Selor, sarana transportasi dapat ditempuh dengan speed boat regular (seperti untuk tujuan ke Pulau Bunyu, Tana Lia, dan atau ke Tarakan) dan telah dibangun dermaga ASDP yang lebih representatif. Sementara itu untuk tujuan ke wilayah Tanjung Palas Barat, Peso Hilir dan Peso, dalam sementara waktu masih ditempuh melalui transportasi sungai karena akses jalan yang sedang dibangun belum selesai.

Untuk memenuhi armada transportasi darat tersedia kendaraan angkutan darat yang utama yakni kendaraan bermotor, menurut jenisnya yaitu mobil penumpang, mobil barang, truk dan sepeda motor. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Polres Bulungan, pada tahun 2005 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 2.410 buah.

Dilihat dari jenis kendaraan pada tahun 2005 untuk mobil penumpang yang terbanyak yaitu kendaraan station wagon sebanyak 192 buah, sedangkan untuk mobil barang yang terbanyak adalah kendaraan pick up sebanyak 83 buah.

Untuk ketertiban dan menunjang arus transportasi antar kota dalam provinsi, maka Terminal Induk di Km 2 Kota Tanjung Selor pada tahun 2006 sudah dapat dioperasionalkan.

## **2.20. Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi**

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Bulungan yang mencapai 9,08 persen setiap tahunnya mengakibatkan kebutuhan terhadap perumahan serta sarana dan prasarana permukiman yang meliputi air minum, air limbah, persampahan dan jaringan drainase semakin bertambah



pula. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tersebut maka sejak tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten telah merintis pembangunan perumahan bagi PNS yang berlokasi di Tanjung Selor yang bekerjasama dengan pihak developer diperkirakan tahun 2006 telah terbangun tahap pertama seluas 4,8 Ha sebanyak 56 unit rumah. Kemudian dilanjutkan pada tahap II seluas 1,3 Ha direncanakan sebanyak 200 unit rumah dengan tipe yang lebih kecil dibandingkan dengan tahap I.

Guna mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang diiringi oleh bertambahnya sampah baik rumah tangga maupun industri maka keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah sebagai sarana utilitas lingkungan menjadi kebutuhan yang mutlak. Keberadaan TPA sampah Km 12 Tanjung Selor yang telah digunakan hingga tahun 2005 dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungan akibat arah perkembangan kota disamping kapasitas penampungan sampah yang telah mulai penuh pada lokasi tersebut. Untuk itu Pemerintah Daerah harus dapat segera merelokasi tempat pembuangan akhir sampah ke lokasi baru. Diharapkan pada lokasi yang akan dioperasikan pada tahun 2007 dengan sistem sanitary landfill.

Sementara itu, di bidang Transmigrasi, dalam rentang waktu 30 (tiga puluh tahun) terakhir (1973 – 2003), telah dibangun sebanyak 24 unit pemukiman transmigrasi (UPT), yang dimulai dari desa Gunung Putih (1973), hingga desa Tanjung Buka (2003) yang sampai saat ini 17 (Tujuh belas) UPT tersebut telah menjadi desa definitif sedangkan 7 (Tujuh) lainnya masih dalam pembinaan. Unit pemukiman transmigrasi yang dihuni oleh 23.678 jiwa atau 6.459 KK tersebut tersebar di beberapa wilayah antara lain ; Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor, Sekatak dan Tana Lia. Pembangunan permukiman transmigrasi dimaksudkan selain untuk percepatan pembangunan wilayah strategis juga dalam rangka pemenuhan tenaga kerja terutama di sektor pertanian pada wilayah-wilayah yang berpenduduk sedikit sehingga mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah. Selama rentang waktu tersebut, permukiman transmigrasi telah mampu mengembangkan dirinya menjadi desa definitif yang bahkan relatif lebih maju dibanding desa-



desa lain di sekitarnya, bukan hanya sektor pertanian yang meningkat, sektor-sektor lain juga turut berkembang.

#### **a. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bulungan dalam pengembangan perumahan, permukiman dan transmigrasi antara lain :

- 1) Rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah layak huni terutama bagi masyarakat di pedesaan.
- 2) Adanya Kesenjangan tingkat perkembangan permukiman di perkotaan.
- 3) Rendahnya dukungan infrastruktur bagi perumahan, permukiman dan transmigrasi.
- 4) Belum tersedianya TPA yang permanen sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Perundang-undangan.
- 5) Masih kurangnya fasilitas sarana infrastruktur pendukung terutama sarana pendidikan dan kesehatan di unit permukiman transmigrasi (UPT) baru.
- 6) Belum terintegrasinya unit permukiman transmigrasi (UPT) baru dengan pusat pemasaran.

#### **b. Prediksi**

- 1) Hingga tahun 2010, diperkirakan akan terbangun 10 UPT baru masing-masing 2 UPT di Kecamatan Tana Lia, 2 UPT di Kecamatan Sesayap Hulu dan 6 UPT di Kecamatan Sesayap Hilir.
- 2) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni dalam satu lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan infrastruktur yang memadai.
- 3) Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dalam pembentukan UPT baru dalam rangka membangun kota terpadu mandiri (KTM).
- 4) Terpenuhinya fasilitas infrastruktur bagi perumahan dan permukiman masyarakat secara merata.
- 5) meningkatnya peran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
- 6) tersedianya rumah murah bagi masyarakat melalui fasilitasi Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan pengembang perumahan.



## 2.21. Pengairan

Irigasi merupakan fasilitas infrastruktur yang disertai dengan sistem pengelolaannya yang diarahkan untuk menopang kegiatan pertanian. Prasarana pengairan khususnya untuk irigasi dan rawa tidak terlepas dari kepentingan pengguna dalam hal ini adalah petani/masyarakat yang secara institusional di bawah pembinaan Dinas Pertanian, namun secara teknis Dinas Pekerjaan Umum juga berperan dalam proses pembangunan dan pemeliharannya sehingga prasarana pengairan ini dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Seiring dengan proyeksi pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk pengembangan sektor pertanian yang lebih luas, maka kebutuhan infrastruktur irigasi dalam beberapa tahun ke depan juga akan semakin meningkat. Hingga saat ini jumlah luas irigasi yang sudah ada relatif masih kurang karena ada beberapa buah diantaranya yang kondisinya tidak dapat digunakan secara optimal. Luas lahan sawah di Kabupaten Bulungan menurut jenis pengairan yang digunakan secara keseluruhan adalah 10.475 ha. terdiri dari 1.975 ha. sawah tadah hujan, 2.875 ha. sawah pasang surut dan 775 ha. sawah irigasi. Untuk sawah irigasi terdiri dari 32 ha. irigasi setengah teknis serta, 97 ha. irigasi sederhana PU, dan 646 ha. Irigasi Non PU.

### a. Permasalahan

- 1) Belum berfungsinya secara optimal irigasi yang ada baik untuk kepentingan pertanian maupun air baku/air bersih masyarakat.
- 2) Masih kurangnya keterpaduan koordinasi antar institusi pengelola dan pengguna baik menyangkut perencanaan, pembangunan dan pengelolaannya, menyebabkan pemanfaatannya belum optimal.
- 3) Masih minimnya penyediaan irigasi bagi kebutuhan pertanian maupun kebutuhan air baku lainnya.

### b. Prediksi

Perluasan areal pertanian dalam rangka peningkatan produksi harus diikuti dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengairan.



Diperkirakan dalam sepuluh tahun ke depan, perluasan areal pertanian baru melalui pemanfaatan lahan tidur akan mencapai 10.000 Ha. Untuk itu paling tidak akan dibangun 2.000 ha. irigasi baru.

Akan terwujudnya koordinasi yang lebih baik sehingga perencanaan, pembangunan dan pengelolaan irigasi akan lebih efektif, yang diikuti dengan meningkatnya peran kelembagaan masyarakat pengguna air di tingkat petani.

## **2.22. Air Bersih**

Air merupakan suatu kebutuhan mutlak dan secara hakiki air bersih semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Selama periode 2001 – 2005 jumlah perusahaan air minum dan cabangnya di daerah ini tidak mengalami perubahan, tetap 7 unit dengan status milik pemerintah daerah, sedangkan untuk kapasitas air minum baik potensial maupun efektif pada tahun 2005 mengalami penurunan baik produksi maupun jumlah air minum yang disalurkan. Produksi efektif total air minum yang disalurkan pada tahun 2004 adalah 1,92 juta m<sup>3</sup> menjadi 1,75 juta m<sup>3</sup> pada tahun 2005, yang berarti terjadi penurunan sebesar 8,73 persen.

Tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, rumah tangga (tempat-tinggal) tetap mendominasi pemakaian air minum terbesar yang disalurkan oleh perusahaan, diikuti kemudian hotel, pertokoan, industri, perusahaan, fasilitas umum dan badan sosial.

Pada tahun 2005 pemakaian air minum oleh rumah tangga mencapai 1.509.702 juta m<sup>3</sup>, disusul pemakaian oleh hotel, pertokoan, industri, perusahaan sebesar 179.369 m<sup>3</sup> dan fasilitas umum 34.695 m<sup>3</sup> serta badan sosial, rumah sakit, rumah ibadah 24.152 m<sup>3</sup>.

Berdasarkan data jumlah pelanggan air minum tahun 2005 adalah sebanyak 4.998 sambungan dengan konsumsi sambungan rumah tangga sebanyak 4.358 sambungan, dengan demikian masih terdapat kurang lebih 21.241 rumah tangga di 13 Kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan air bersih oleh PDAM. Namun demikian di beberapa desa, penyedia air bersih untuk kebutuhan air minum selain penyediaan Penampungan Air Hujan (PAH)



untuk masyarakat wilayah pantai juga dibangun sistem distribusi gravitasi bagi desa-desa yang mempunyai sumber air bersih.

**Tabel 2.15. Banyaknya Pelanggan Perusahaan Air Minum Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2002 – 2005**

Kategori Pelanggan	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Tangga (Tempat Tinggal), Instansi/Kantor Pemerintah	4.950	5.197	5.477	4.358
Hotel/Objek Wisata, Toko, Industri, Perusahaan	775	807	854	539
Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah, dsb	45	50	50	38
Sarana (Fasilitas) Umum	79	88	88	63
Hydran Pelabuhan	2	2	2	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.831</b>	<b>6.144</b>	<b>6.471</b>	<b>4.998</b>

Sumber : BPS - Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2006

**Tabel 2.16. Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2002 – 2005 (m3)**

Kategori Pelanggan	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Tangga (Tempat Tinggal), Instansi/Kantor Pemerintah	1.175.013	1.361.244	1.543.111	1.509.702
Hotel/Objek Wisata, Toko, Industri, Perusahaan	188.897	225.333	244.741	179.369
Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah, dsb	54.879	53.295	76.051	24.152
Sarana (Fasilitas) Umum	30.502	37.783	50.901	34.695
Hydrant Pelabuhan	160	178	267	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.449.451</b>	<b>1.677.833</b>	<b>1.915.071</b>	<b>1.747.918</b>

Sumber : BPS - Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2006



#### a. Permasalahan

- 1) Belum terpenuhi pelayanan kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat baik dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas, maupun jangkauan pemerataannya pada semua wilayah.
- 2) Adanya keterbatasan sumber air baku untuk kebutuhan air bersih terutama di wilayah pesisir.
- 3) Sebagian besar konsumen adalah rumah tangga dengan nilai jual yang lebih rendah dari pada biaya produksi.
- 4) Sebagian besar prasarana instalasi air bersih di perkotaan relatif sudah tua sehingga rentan terhadap gangguan pada distribusi.
- 5) Belum berperannya secara optimal kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih di perdesaan.

#### b. Prediksi

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana terutama di wilayah perkotaan akan semakin mendorong meningkatnya permintaan pelayanan air bersih baik dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya. Diperkirakan dalam lima tahun ke depan, kemampuan penyediaan dan pelayanan air bersih akan semakin meningkat.

### 2.23. Energi Listrik

Tenaga listrik yang berhasil diproduksi dan tenaga listrik yang terjual di wilayah Kabupaten Bulungan dari Tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun terakhir yaitu tahun 2005 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 27.599.252 KWH, atau meningkat sebesar 15,56 persen.

Begitu juga dengan listrik yang terjual untuk tahun 2005, meningkat sebesar 16,66 persen dibandingkan tahun 2004. Untuk tenaga listrik yang terjual, rumah tangga merupakan kategori pelanggan terbesar yang menggunakan tenaga listrik yaitu sebesar 14,711 juta KWH, sedangkan untuk kategori Publik, Usaha, Industri, dan Sosial masing-masing sebesar 4,640; 4,299; 2,090 dan 1,318



juta KWH. Kapasitas terpasang pembangkit listrik PLN di Kabupaten Bulungan adalah 10 MW dengan beban puncak 3,95 MW.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik baik untuk rumah tangga maupun kegiatan ekonomi, maka dalam jangka panjang prioritas pembangunan tenaga listrik meliputi : pembangunan jaringan listrik pedesaan, rehabilitasi pembangkit transmisi dan distribusi, serta pengembangan PLTS untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Sedangkan pembangunan bidang energi diprioritaskan pada kajian – kajian teknis terhadap potensi energi daerah sebagai alternatif dan substitusi pembangkit listrik tenaga diesel PLN (PLTU, PLTA, PLTMH, PLTG).

**Tabel 2.17. Banyaknya Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terpasang, Terjual, Dipakai Sendiri dan Susut Tahun 2002 – 2005**

Rincian	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Diproduksi (KWH)	19.124.949	21.565.413	23.883.928	27.599.252
Terpasang (KW)	6.866	11.452	12.160	18.446 *)
Terjual (KWh)	17.039.381	19.721.293	23.193.490	27.058.288
Dipakai Sendiri (KWH)	352.904	340.874	178.912	202.800
Susut (KWH)	1.732.664	1.503.246	1.511.526	338.164

\*) terdiri dari PT. PLN, Pemda dan Sewa

Sumber : BPS - Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2006

#### a. Permasalahan

- 1) Kapasitas produksi listrik PLN masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar masyarakat belum mendapatkan pelayanan.
- 2) Belum dimanfaatkannya energi alternatif pengganti tenaga diesel dengan harga BBM (solar) yang cenderung meningkat sehingga biaya operasional menjadi mahal.
- 3) Nilai jual (TDL) yang relatif rendah dibandingkan dengan biaya produksi.
- 4) Kondisi geografis daerah yang sulit sehingga semakin menghambat percepatan pembangunan infrastruktur (termasuk listrik).



- 5) Belum adanya keterlibatan swasta dalam penyediaan energi listrik di daerah.

#### **b. Prediksi**

Kebutuhan tenaga listrik akan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan pembangunan prasarana dan sarana baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta setiap tahun.

Melihat kondisi sekarang dan perkiraan peningkatan kebutuhan dalam 20 tahun ke depan, maka penyediaan tenaga listrik di Kabupaten Bulungan akan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi investasi swasta yang bergerak di bidang ketenagalistrikan apabila sumber energi lokal dapat dikembangkan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu untuk terus melakukan kajian tentang jumlah dan ragam sumber daya energi listrik non BBM, serta memilih alternatif teknologi konversi energi yang efektif dan lebih ekonomis sesuai dengan kondisi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Bulungan. Permasalahan penyediaan energi listrik yang terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Timur dapat dijadikan peluang pasar apa bila Kabupaten Bulungan mampu memproduksi listrik dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan sumberdaya alternatif yang lebih murah sebagai pembangkit, (PLTA, PLTG dan PLTU).

#### **2.24. Pemerintahan**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada peningkatan kinerja birokrasi agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dilingkungan aparatur pemerintah daerah. Dalam kaitan itu selain perlu menata organisasi berdasarkan peraturan yang berlaku, langkah-langkah peningkatan profesionalitas sumber daya manusia aparatur (PNS) serta mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat. Secara umum kondisi bidang pemerintahan kabupaten Bulungan pada saat ini masih dalam



proses konsolidasi terkait dengan berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya melaksanakan misi bidang pemerintahan yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, didukung oleh aparatur yang tangguh, bermoral, penuh dedikasi dan bebas KKN.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi maka diharapkan mampu menghasilkan birokrasi yang dapat berperan sebagai dinamisator pembangunan dan mampu menciptakan iklim ekonomi, sosial dan politik bagi lancarnya proses pemerintahan dan pembangunan, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberantas berbagai jenis penyalahgunaan wewenang dalam bentuk KKN. Upaya-upaya yang perlu dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi di daerah : (1). Pembinaan manajemen sumber daya aparatur (kepegawaian) yang mencakup peningkatan kompetensi aparatur, pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja, dan penerapan *reward* dan *punishment* dalam pembinaan kepegawaian. (2) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (e-services) dalam pelayanan publik terutama dibidang administrasi kependudukan. Namun demikian pelaksanaan reformasi birokrasi masih akan dihadapkan oleh berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan tersebut antara lain adalah pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, masih rendahnya kinerja aparatur, belum terlaksananya secara optimal sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi pemerintah daerah untuk dapat menunjang pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, dan belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi di setiap instansi pelayanan publik yang berakibat pada masih rendahnya kualitas pelayanan publik.

#### **a. Permasalahan**

- 1) perubahan peraturan dan kebijakan yang sering dilakukan oleh pemerintah sehingga perlu kesiapan aparatur daerah untuk melakukan penyesuaian,
- 2) masih lemahnya manajemen internal pada lingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ditandai dengan masih lemahnya sistem



koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan, yang berpengaruh terhadap kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik

- 3) masih lemahnya penerapan aturan disiplin dan penerapan sanksi terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran.
- 4) masih belum efektif dan efisiennya birokrasi pemerintah daerah sebagai akibat dari tumpang tindihnya dan berubah-ubahnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan aparatur daerah.
- 5) ketidakjelasan koordinasi dan masih tumpang tindihnya pelaksana pengawasan dan audit terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah.
- 6) masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana serta profesionalitas operator pelayanan publik terutama di wilayah kecamatan.

#### **b. Prediksi**

Sasaran umum penyelenggaraan pemerintahan sebelum berakhirnya lima tahun kedua RPJP ini adalah untuk mewujudkan aparatur daerah yang bersih dan berwibawa agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh masyarakat yaitu (1) berkurangnya secara nyata pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan pada seluruh tataran pemerintah daerah (2) terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang bersih, bertanggungjawab, transparansi dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, (3) terwujudnya praktek pelayanan publik yang tidak diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik (5) terjaminnya konsistensi peraturan pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.

### **2.25. H u k u m**

Penghormatan dan penegakkan hukum merupakan bagian penting dalam rangka pembangunan hukum itu sendiri, yang selanjutnya akan memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat untuk terlibat dalam



bidang pembangunan lainnya. Eforia reformasi dan permasalahan ekonomi masyarakat yang tidak pernah tuntas, serta menurunnya penghormatan terhadap nilai-nilai luhur adat istiadat akibat meningkatnya intensitas interaksi antar masyarakat dan antar budaya melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, menyebabkan penghormatan atas hukum semakin berkurang. Realitas tersebut dapat tercermin dari meningkatnya kasus-kasus pelanggaran hukum baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Berdasarkan data tahun 2005, kasus criminal yang dilaporkan ke Polres Bulungan adalah 318 kasus dimana 169 kasus diantaranya telah diselesaikan.

Sedangkan jumlah perkara yang dilaporkan /masuk ke Kejaksaan Negeri Tanjung Selor adalah 1.392 perkara, terdiri dari 1.227 perkara tindak pidana ringan/tilang, 2 perkara korupsi, 23 perkara narkoba/psikotropika, 13 perkara senpi/sajam, 9 perkara perikanan dan 118 perkara lain-lain. Jumlah tahanan yang masuk di Polres Bulungan sebanyak 234 orang sedangkan tahanan yang masuk di Kejaksaan sebanyak 218 orang.

#### **a. Permasalahan**

- 1) Kondisi letak geografis yang sulit tidak sebanding dengan sarana dan prasarana serta personil penegakkan hukum yang ada.
- 2) Belum adanya institusi Pengadilan Negeri sehingga penyelesaian perkara masih harus melalui PN. Tarakan.
- 3) Belum dibangunnya Rumah Tahanan Negara (Rutan).
- 4) Belum adanya Polsek dan Koramil di beberapa wilayah kecamatan.

#### **b. Prediksi**

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum untuk menciptakan keamanan yang kondusif demi terciptanya supremasi hukum dan tegaknya negara hukum
- 2) Membuat Peraturan Daerah secara terpadu menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran demi tegaknya Supremasi hukum serta menghargai Hak-Hak Azasi Manusia



- 4) Meningkatkan profesionalisme dan disiplin aparat dalam rangka menjunjung tinggi Supremasi Hukum melalui pelayanan pengawasan pembangunan yang berkualitas

## 2.26. Pos, Telekomunikasi dan Media Massa

Dalam menyongsong era globalisasi sekarang ini, sektor Pos dan Telekomunikasi, sebagai media Informasi sangat diperlukan dalam memperlancar arus berita, informasi dan data. Berkaitan hal tersebut telepon sebagai salah satu sarana telekomunikasi memiliki arti penting bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelanggan maupun jumlah sarana telekomunikasi lainnya setiap tahun dengan jumlah pelanggan sebanyak 2.355 SST pada tahun 2005. Di Kantor Pos Tanjung Selor jumlah pengiriman surat dan pos paket pada tahun 2005 menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya, ini dapat dilihat dari jumlah pengiriman surat dan pos paket pada tahun 2004 sebanyak 41.393 menjadi 34.965 pada tahun 2005 yang terdiri dari 14.726 surat biasa, 19.428 surat kilat dan 881 pos paket.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pertumbuhan minus untuk layanan jasa pos di Kabupaten Bulungan, salah satu penyebab terjadinya hal ini yaitu dengan beroperasinya beberapa operator seluler diantaranya Telkomsel, Indosat dan Excel Com yang bergerak di gelombang GSM serta Telkomsel di gelombang GSM dan CDMA sehingga diikuti dengan meningkatnya pemakaian telepon seluler (Hand Phone) yang praktis didalam penggunaannya dan cepat di dalam pengiriman berita, sehingga arus informasi sudah dengan mudah sampai ke kecamatan dengan hitungan detik, baik yang sudah ada *tower provider* telepon seluler maupun yang masih menggunakan jaringan telepon satelit, disamping tidak kalah pentingnya juga peran media massa khususnya media cetak di Kabupaten Bulungan juga sangat banyak membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah telah menjalin berbagai kerjasama dengan media cetak yang pendistribusiannya sampai ke daerah-daerah pelosok.

**a. Permasalahan**

- 1) Belum terpenuhinya pelayanan pos, telekomunikasi dan media massa di beberapa wilayah secara optimal disebabkan belum terlayannya kantor pos.
- 2) Belum terpasangnya provider GSM maupun CDMA di beberapa wilayah.
- 3) Belum terbangunnya sarana dan prasarana siaran televisi lokal.
- 4) Masih terbatasnya jangkauan pendistribusian media cetak ke beberapa wilayah.
- 5) Belum optimalnya radio siaran pendidikan daerah.

**b. Prediksi**

- 1) Terbentuknya unit pelayanan Pos di semua Kecamatan.
- 2) Terpenuhinya pelayanan komunikasi yang mampu menjangkau hingga wilayah terpencil.
- 3) Terbangunnya stasiun televisi lokal guna memberikan informasi mengenai hasil-hasil pembangunan pada masyarakat.
- 4) Adanya kemudahan bagi masyarakat di wilayah kecamatan untuk mendapatkan berbagai informasi melalui media cetak.
- 5) Terbangunnya Radio Siaran Pendidikan yang dapat diakses dengan baik di semua wilayah kecamatan.
- 6) Meningkatnya pelayanan komunikasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah kecamatan.

**2.27. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**

Berdemokrasi dan mendapatkan perlindungan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin baik dalam Pembukaan maupun pada batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terpenuhinya hak-hak tersebut akan menciptakan kondisi aman dan damai yang merupakan prasyarat bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi umum yang relatif damai dalam hubungan antar kelompok dan golongan masyarakat merupakan prasyarat penting dalam mempertahankan standar kehidupan yang sudah ada, serta mengembangkan standar-standar baru kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Proses akumulatif



peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat dilakukan dalam kondisi damai. Dalam kaitan itu lembaga kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat berperan dalam terciptanya nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam bentuk fasilitasi kesadaran berpolitik dan berdemokrasi bagi masyarakat. Selain itu juga berupaya memberikan rasa aman pada masyarakat baik dalam bentuk perlindungan dari ancaman kejahatan maupun dari bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

**a. Permasalahan**

- 1) Belum optimalnya sosialisasi Undang-Undang tentang Partai Politik.
- 2) Masih rendahnya kegiatan-kegiatan diskusi politik di daerah dalam rangka membuka wawasan politik bagi masyarakat.
- 3) Adanya kecenderungan menurunnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari perkembangan global.
- 4) Adanya kecenderungan peningkatan tindak kejahatan baik kuantitas maupun kualitasnya.
- 5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- 6) Masih terbatasnya personil terlatih dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

**b. Prediksi**

Keterlibatan masyarakat dalam percepatan pengembangan pendidikan politik, meningkatkan pengembangan sistem dan mekanisme demokrasi, meningkatkan kemandirian partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan atas kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara, namun di lain sisi perlu mewaspadaai adanya kecenderungan tindak kejahatan yang meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas sebanding dengan perkembangan kota.

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI DAERAH**

#### **3.1. Visi**

Dalam mewujudkan suatu visi wilayah, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama faktor-faktor yang dapat diperkirakan (predictable), baik faktor-faktor dari dalam wilayah (internal) seperti potensi wilayah, budaya lokal, kondisi sosial kemasyarakatan, serta kelemahan dan kendala yang dihadapi faktor-faktor dari luar (eksternal) seperti misalnya gejala perubahan global, perdagangan bebas, arus migrasi, dan kondisi sosial politik dan keamanan regional maupun nasional.

Sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang dan memperhatikan kondisi, potensi, keragaman daerah serta peluang dan tantangan masa depan, maka seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bulungan memiliki pandangan jauh kedepan yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, maka dipilihlah visi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Bulungan , yaitu :

**“KABUPATEN BULUNGAN SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN YANG UNGGUL  
DALAM BIDANG AGROINDUSTRI SERTA DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA  
YANG TANGGUH“**

Visi dimaksud mengandung makna adanya harapan yang hendak dicapai oleh segenap masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian terutama bidang agroindustri yang unggul serta didukung oleh Sumber Manusia yang tangguh.

**Makna Visi tersebut adalah :**

➤ **Unggul dalam Bidang Agroindustri**

Berdasarkan letak geografi Kabupaten Bulungan yang berada pada posisi strategis di wilayah Utara Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Bulungan sangat tepat sebagai Pusat Perekonomian



terutama bidang agroindustri yang potensial untuk mengakses keluar daerah baik Regional/Nasional misalnya ke Surabaya, Makasar maupun Internasional misalnya ke Malaysia dan Philipina, dan kedalam sebagai hubungan dengan daerah lain dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur (Connecting Area) terhadap mobilitas barang dan jasa dengan penyediaan Infra Struktur Dasar Kabupaten yang lengkap, Pengembangan **Agroindustri** sebagai unggulan masa depan Kabupaten Bulungan bertujuan meningkatkan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas yang dihasilkan dan penyerapan tenaga kerja yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

➤ **Sumber Daya Manusia yang Tangguh**

Kabupaten Bulungan, sebagaimana layaknya kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Pengembangan Sumber daya alam di Kabupaten Bulungan bersifat renewable (dapat diperbaharui) sehingga pembangunan secara berkelanjutan (sustainable) lebih mudah terwujud, serta dampak negatif terhadap perusakan lingkungan dapat diperkecil.

Mewujudkan Pusat Perekonomian bidang agroindustri yang unggul tidaklah mudah, sebab harus didukung oleh **Sumber Daya Manusia yang tangguh**, yaitu sumber daya manusia yang **kreatif, berkemauan keras untuk maju serta memiliki ilmu pengetahuan dan Akhlak yang baik (Iptek dan Imtaq)**.

Keberhasil dalam pembentukan sumber daya manusia yang tangguh merupakan modal dasar bagi pembangunan Kabupaten Bulungan yang maju serta kunci keberhasilan bagi pengembangan sektor unggulan pada bidang agroindustri serta sektor-sektor lain yang terkait dalam satu mata rantai yang saling memperkokoh struktur perekonomian dan sosial Kabupaten Bulungan.



### 3.2. Misi

Berdasarkan makna dari kata-kata yang membentuk visi maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi yang meliputi :

- 1) Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebaga pusat perekonomian bidang agroindustri yang unggul dalam pasar regional dan internasional;
- 2) Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia bidang agroindustri yang tangguh dalam lingkungan regional dan internasional;
- 3) Peningkatan Infrastruktur Dasar;
- 4) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang Berkelanjutan;
- 5) Pengembangan Sosial Budaya;
- 6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 7) Penegakan Supremasi Hukum;
- 8) Peningkatan Pelayanan Publik;
- 9) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Penjabaran dari masing-masing misi yang akan diemban adalah sebagai berikut :

#### **1. Misi Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebaga pusat perekonomian bidang agroindustri yang unggul dalam pasar regional dan internasional.**

Adalah mendorong terciptanya Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten Perdagangan, industri pertanian dan perkebunan serta perikanan yang kompetitif serta berdaya saing tinggi guna terciptanya iklim investasi yang konduktif dan peluang usaha yang lebih besar, melalui pemberdayaan masyakat, penguatan lembaga ekonomi masyarakat, tersedianya pangsa pasar yang kompetitif, perluasan lapangan kerja dan ketersediaan tenaga profesional serta menjalin hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan.



**2. Misi Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia bidang agroindustri yang tangguh dalam lingkungan regional dan internasional.**

Adalah meningkatkan Sarana dan Prasarana pengembangan sumber daya manusia yang tangguh dengan memiliki ilmu pengetahuan dan akhlak (iptek dan imtaq) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan Kabupaten Bulungan sebagai calon ibu kota Provinsi Kalimantan Utara (**Kaltara**) dengan basis pengembangan pada kawasan pedesaan (grass root) guna mendukung kelancaran perdagangan regional, nasional dan internasional, serta tersedianya *Public Space*.

**3. Misi Peningkatan Infrastruktur Dasar.**

Adalah meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan Kabupaten Bulungan sebagai Pusat Perekonomian terutama bidang Agroindustri dengan basis pengembangan kawasan pelabuhan guna mendukung kelancaran perdagangan regional, nasional dan internasional.

**4. Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang Berkelanjutan**

Adalah mendorong terciptanya suasana Kabupaten berwawasan lingkungan yang indah, bersih dan nyaman melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable).

**5. Misi Pengembangan Sosial Budaya**

Adalah mendorong Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten yang unggul dalam pengembangan budaya dan seni serta pemenuhan sarana dan fasilitas pengembangan pariwisata regional guna terciptanya kehidupan sosial kemasyarakatan yang humanis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan adat istiadat, melalui



pemberdayaan lembaga-lembaga adat, penanaman nilai-nilai adat budaya kepada generasi muda serta penguatan peranan wanita.

#### **6. Misi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Adalah mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (imtaq), menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta sehat jasmani dan rohani, untuk mewujudkan tenaga kerja, pegawai negeri sipil (PNS) dan peran serta pihak swasta yang profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global.

#### **7. Misi Penegakan Supremasi Hukum**

Adalah upaya mendorong terwujudnya jaminan kepastian hukum dan politik, menjamin rasa keadilan masyarakat, hak-hak politik dan hak azasi manusia, serta terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik.

#### **8. Misi Peningkatan Pelayanan Publik**

Adalah mengembangkan sistem pelayanan yang efektif, efisien, transparan, terjangkau, adil serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

#### **9. Misi Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**

Adalah terwujudnya dan terjaminnya kehidupan yang rukun, bersahabat antar penduduk yang sifatnya heterogen, serta terciptanya suasana yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

### **3.3. Nilai – Nilai**

Nilai-nilai (*Values*) adalah hal-hal yang dijunjung tinggi oleh organisasi dalam perjalanan mewujudkan Visi. Dengan kata lain nilai merupakan prinsip sosial, tujuan, ataupun norma yang diterima individu organisasi atau masyarakat. Nilai memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-



cara yang ditempuh dalam mewujudkan Visi. Atas dasar nilai itu maka tidak semua cara boleh ditempuh.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Bulungan, maka nilai utama yang dijadikan pedoman antara lain kesetaraan, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, demokratis untuk menuju masyarakat yang dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai tersebut harus melandasi jalannya roda pemerintahan sehingga menjadi pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan karakteristik sebagai berikut :

1. **Transparansi.** Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait, seperti berbagai aturan, kebijakan pemerintah di berbagai kegiatan. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
2. **Dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel).** Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
3. **Demokratis.** Dalam arti masyarakat diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.
4. **Pelayanan Prima.** Pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Dalam hal ini keputusan masyarakat faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi (pemerintah) untuk tetap dapat diterima oleh masyarakat. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.



5. **Efektifitas, Efisiensi, Ekonomis dan Educative.** Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
6. **Partisipasi.** Setiap dan seluruh warga masyarakat (*stakeholders*) Kabupaten Bulungan mempunyai suara dalam pembuatan legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karenanya rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan / pasca konstruksi.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas**

##### **4.1.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

###### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Persebaran dan mobilitas penduduk secara seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui, peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- 2) Penataan administrasi kependudukan guna mendorong perencanaan, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
- 4) Memperkuat kelembagaan dan jaringan KB dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk untuk menciptakan keluarga kecil berkualitas;
- 5) Meningkatkan peluang berusaha dan bekerja pada sektor-sektor unggulan sesuai dengan bidang keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja;
- 6) Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme untuk peningkatan produktifitas tenaga kerja, melalui pendidikan dan pelatihan.
- 7) Pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.
- 8) Pembenahan dan peningkatan management sistem ketenagakerjaan.
- 9) Melaksanakan revitalisasi ketenagakerjaan.
- 10) Mendorong peran serta dunia usaha dalam meningkatkan mutu tenaga kerja.
- 11) Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat terutama angkatan kerja.

**b. Strategi**

- 1) Mengintegrasikan faktor kependudukan ke dalam pembangunan sektoral daerah;
- 2) Mengoptimalkan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan yang meliputi aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas;
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK);
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam administrasi dan Informasi kependudukan;
- 5) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha;
- 6) Peningkatan sistem pengelolaan dan informasi untuk mendukung keterpaduan program;
- 7) Peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat;
- 8) Menyusun perencanaan jangka panjang terhadap kebutuhan setiap sektor lapangan kerja terutama pada sektor-sektor unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- 9) Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK);
- 10) Mengoptimalkan penyediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian untuk pengelolaan potensi daerah;
- 11) Pemerataan tenaga kerja di setiap bidang pada sektor-sektor unggulan.

**4.1.2. Pendidikan****a. Arah Kebijakan**

- 1) Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan SLTA;
- 2) Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh



- layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, kelompok perempuan dan masyarakat wilayah terpencil;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya;
  - 4) Menuntaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun;
  - 5) Meningkatkan penyediaan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan;
  - 6) Meningkatkan pendidikan non formal yang merata dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal;
  - 7) Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan kejuruan menengah dan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar sejalan dengan berkembangnya sektor agroindustri daerah.
  - 8) Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini.

**b. Strategi**

- 1) Peningkatan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran secara profesional;
- 2) Peningkatan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis;
- 3) Pemerataan fasilitas pendidikan sampai ke tingkat desa;
- 4) Peningkatan sistim pendidikan dengan sistim sekolah terbuka (menerapkan sistim bergilir dalam belajar);
- 5) Pemberian insentif untuk melanjutkan jenjang pendidikannya;



- 6) Peningkatan alternatif layanan pendidikan dasar yang memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi anak melalui pendidikan formal dan non formal;
- 7) peningkatan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah yang tidak melanjutkan ke dalam sistim pendidikan;
- 8) Peningkatan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa dan pembebasan biaya pendidikan secara berkelanjutan;
- 9) Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan;
- 10) Peningkatan minat, bakat dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- 11) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan beserta pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan non formal;
- 12) peningkatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis ta'lim serta satuan pendidikan yang sejenis;
- 13) Peningkatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok;
- 14) Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat termasuk lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 15) Peningkatan dan pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta perintisan model-model pembelajaran PAUD yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;



- 16) Peningkatan dan penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung oleh upaya peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- 17) Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
- 18) Pengembangan status sekolah tinggi yang ada menjadi universitas untuk memungkinkan penambahan jumlah bidang studi (fakultas) sehingga membuka peluang yang besar bagi masyarakat yang selama ini tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

#### **4.1.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Meningkatkan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang berkualitas dalam proses pembangunan daerah.
- 2) Mendorong munculnya lembaga pengembangan dan penelitian dengan mengembangkan iptek pada masing-masing bidang.

##### **b. Strategi**

- 1) Meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek di setiap bidang pembangunan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian pembangunan.
- 4) Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan iptek kepada masyarakat.
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana penelitian, pengembangan dan penerapan iptek.
- 6) Pengembangan iptek dalam berbagai bidang pembangunan.



#### 4.1.4. Kesehatan dan Keluarga Berencana

##### a. Arah Kebijakan

- 1) Meningkatkan dan pemerataan jumlah jaringan kualitas, fasilitas kesehatan dasar;
- 2) Mengembangkan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin;
- 3) Meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter umum, dokter spesialis dan tenaga medis lainnya;
- 5) Penjaminan ketersediaan, pengawasan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan;
- 6) Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- 7) Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecatatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular.

##### b. Strategi

- 1) Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana serta jaringannya;
- 2) Peningkatan akreditasi pelayanan puskesmas di seluruh wilayah kecamatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- 3) Pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat yang dimulai dari lingkungan keluarga.
- 4) Pengembangan Desa Siaga dengan meningkatkan implementasi kesehatan masyarakat.
- 5) Peningkatan mutu pelayanan terhadap lansia.
- 6) Peningkatan cakupan pelayanan terhadap ibu hamil dan bersalin oleh tenaga kesehatan.
- 7) Peningkatan sebaran informasi kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui.
- 8) Penyebarluasan informasi penggunaan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan remaja.



- 9) Peningkatan *hygiene* sanitasi lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya.
- 10) Peningkatan upaya pencegahan penyakit melalui pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan kesehatan.
- 11) Peningkatan perilaku hidup sehat dengan meningkatkan pemberdayaan kualitas rumah tangga sehat.
- 12) Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
- 13) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan serta pemerataannya.
- 14) Peningkatan program pemeliharaan kesehatan masyarakat pada wilayah-wilayah yang rentan terhadap penyakit.
- 15) Peningkatan upaya penyediaan kualitas gizi masyarakat.
- 16) Peningkatan program kerjasama lintas sektor yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
- 17) Peningkatan akreditasi fasilitas kesehatan.
- 18) Penyediaan fasilitas pendidikan bidang kesehatan untuk menciptakan tenaga kesehatan secara mandiri di daerah.
- 19) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM bagi tenaga kesehatan.
- 20) Meningkatkan jumlah tenaga medis, dokter umum/gigi, dokter spesialis dan tenaga ahli kesehatan.

#### **4.1.5. Peranan Perempuan**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Meningkatkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan dalam semua aspek pembangunan daerah.
- 2) Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan agar setara dengan laki-laki.

**b. Strategi**

- 1) Mengintegrasikan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan sektor-sektor pembangunan.
- 2) Peningkatan upaya perlindungan terhadap kaum perempuan.
- 3) Peningkatan peran lembaga-lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan.
- 4) Meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan ekonomi bagi kaum perempuan.
- 5) Meningkatkan kesempatan berusaha dan berkarya bagi kaum perempuan.

**4.1.6. Kesejahteraan Sosial****a. Arah Kebijakan**

- 1) Peningkatan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.
- 2) Mengembangkan semangat gotong-royong dan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi bagi seluruh masyarakat.
- 3) Menciptakan ketahanan sosial masyarakat sehingga mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap PMKS.

**b. Strategi**

- 1) Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga/fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.
- 2) Peningkatan keterampilan, kesempatan bekerja dan berusaha yang sesuai bagi PMKS, penduduk miskin dan rentan lainnya.
- 3) Pemberdayaan anak terlantar, anak cacat dan anak jalanan dengan pembekalan keterampilan tumbuh kembang secara wajar sehingga diterima di lingkungannya.
- 4) Pemberdayaan sosial bagi lanjut usia terlantar.
- 5) Memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi korban NAPZA, eks narapidana, dan eks PSK untuk dapat kembali ke kehidupan normal dan dapat diterima di lingkungan sosialnya.



- 6) Meningkatkan dan mengembangkan peran tenaga kerja sosial masyarakat/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan korban bencana, kemiskinan, dan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

#### **4.1.7. Agama**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Peningkatan pelayanan kegiatan ibadah bagi umat beragama.
- 2) Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap individu dan masyarakat.
- 3) Peningkatan kerukunan kehidupan, saling toleransi, dan hormat menghormati bagi individu dan masyarakat antar umat beragama.

##### **b. Strategi**

- 1) Peningkatan ketersediaan fasilitas peribadatan.
- 2) Peningkatan pelayanan urusan agama pada semua wilayah kecamatan.
- 3) Peningkatan kegiatan pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan keagamaan
- 5) Peningkatan kualitas tenaga pengajar bidang keagamaan.
- 6) Peningkatan kerjasama tokoh-tokoh agama dan antar umat beragama dalam berbagai kegiatan.

#### **4.1.8. Pemuda dan Olah Raga**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Meningkatkan peran pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan.
- 2) Meningkatkan dan memberdayakan peran kelembagaan pemuda di pedesaan.



- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keolahragaan.
- 4) Meningkatkan prestasi olah raga daerah.

**b. Strategi**

- 1) Peningkatan kegiatan organisasi kepemudaan untuk mendorong kepedulian terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah.
- 2) Terbentuknya lembaga dan wadah kegiatan pemuda hingga di seluruh wilayah pedesaan.
- 3) Peningkatan partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olah raga di semua wilayah.
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pelatih.
- 6) Peningkatan peran kelembagaan, sistem manajemen dan pengelolaan prestasi olah raga daerah.

## **4.2. Pembangunan Ekonomi Dalam Arti Luas**

### **4.2.1. Perekonomian Daerah**

**a. Arah Kebijakan**

- 1) Pengembangan bidang agroindustri sebagai basis utama ekonomi Kabupaten Bulungan;
- 2) Pengembangan bidang perdagangan yang mendukung bidang agroindustri;
- 3) Eksploitasi sumber daya alam yang lestari untuk digunakan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi di bidang agroindustri;
- 4) Pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

**b. Strategi**

- 1) Pengembangan ekonomi masyarakat bidang agroindustri sebagai tumpuan utama ekonomi Kabupaten Bulungan yang berbasis kepada potensi industri pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan Kehutanan.
- 2) Pengembangan sektor perdagangan, khususnya perluasan pangsa pasar untuk hasil produksi agroindustri yang kompetitif.
- 3) Eksploitasi penambangan sumber daya alam yang selektif untuk kemaslahatan rakyat.
- 4) Penguatan lembaga ekonomi masyarakat.
- 5) Perluasan kesempatan dan lapangan kerja dengan tenaga kerja yang profesional.
- 6) Penguatan hubungan kerjasama antar wilayah dan antar daerah dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan.

**4.2.2. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura****a. Arah Kebijakan**

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan manajemen usaha tani.
- 2) Perluasan areal lahan pertanian dengan memanfaatkan dan mengembangkan fungsi dan potensi lahan tidur.
- 3) Pengembangan kawasan sentra-sentra produksi baru yang berwawasan agribisnis.
- 4) Pengembangan ragam komoditas pertanian yang berorientasi pada potensi lokal dan kebutuhan pasar.
- 5) Pengembangan jaringan infrastruktur wilayah yang memberikan akses bagi pembangunan pedesaan dan sentra produksi pertanian terhadap pusat-pusat pertumbuhan/pasar.
- 6) Mendorong sektor swasta untuk berinvestasi di bidang pertanian.



#### **b. Strategi**

- 1) Peningkatan kemampuan dan keterampilan petani/kelompok tani, tenaga PPL dan aparatur bidang pertanian melalui Diklat Teknis, Kursus, Sekolah Lapang, dan Studi Banding.
- 2) Peningkatan produktivitas dan luas tanam melalui perluasan lahan pertanian masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan petani.
- 3) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya.
- 4) Pembangunan kawasan agropolitan pada wilayah pertanian potensial yang mempunyai akses keterkaitan antar wilayah dan berorientasi pasar yang luas.
- 5) Diversifikasi produk-produk pertanian unggulan daerah yang berdaya saing melalui pengembangan teknologi tepat guna.
- 6) Peningkatan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung bagi peningkatan produksi pertanian.
- 7) Membangun kemitraan petani dengan pihak swasta guna mendapatkan dukungan kerjasama permodalan, sarana produksi dan akses pemasaran.
- 8) Peningkatan peran serta lembaga-lembaga pertanian dan pengembangan kebijakan yang memihak kepada petani.

#### **4.2.3. Perkebunan**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Peningkatan dan pengembangan peran sub sektor perkebunan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah.
- 2) Meningkatkan investasi swasta di bidang perkebunan.
- 3) Membangun sistem informasi dan pelayanan perijinan bidang perkebunan.
- 4) Pembangunan industri hilir bagi produk-produk perkebunan dengan kualitas tinggi, yang berorientasi ekspor dan pasar yang lebih luas.



- 5) Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan investasi bidang perkebunan.
- 6) Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bidang perkebunan.

**b. Strategi**

- 1) Penyempurnaan regulasi dan peningkatan pelayanan investasi bidang perkebunan.
- 2) Membangun sentra-sentra industri perkebunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya.
- 3) Meningkatkan SDM dan profesionalisme bidang perkebunan.
- 4) Pemanfaatan teknologi bagi peningkatan produk-produk perkebunan.
- 5) Pembangunan industri hilir perkebunan yang berkualitas ekspor dan akses pemasaran yang luas.
- 6) Penetapan aturan yang jelas dan tegas mengenai jenis dan kriteria peruntukan lahan perkebunan dan pengelolaannya.
- 7) Meningkatkan dan mengembangkan daya saing produk perkebunan lokal untuk masuk pada pangsa pasar yang lebih luas.
- 8) Meningkatkan keterampilan masyarakat untuk masuk pada pasar kerja industri bidang perkebunan.

**4.2.4. Kehutanan**

**a. Arah Kebijakan**

- 1) Terpeliharanya sumber daya hutan dalam luasan yang cukup bagi keseimbangan lingkungan maupun untuk kepentingan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan yang lebih baik dan lestari.
- 2) Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
- 3) Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

**b. Strategi**

- 1) Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
- 2) Pemberantasan terhadap praktek- praktek illegal logging.
- 3) Pemulihan lahan/DAS kritis dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- 4) Revitalisasi bidang Kehutanan terutama industri pengolahan kayu.
- 5) Peningkatan SDM masyarakat lokal dalam rangka partisipasi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.
- 6) Membangun industri bidang Kehutanan yang efisien dan berdaya saing.

**4.2.5. Peternakan****a. Arah Kebijakan**

- 1) Pengembangan peternakan untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor.
- 2) Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumber daya lokal.
- 3) Pengembangan industri produk-produk peternakan.
- 4) Penciptaan peluang pasar yang seluas-luasnya bagi produk-produk peternakan.

**b. Strategi**

- 1) Meningkatkan produksi peternakan unggulan daerah dengan kualitas pasar ekspor.
- 2) Pembangunan infrastruktur peternakan yang mendukung kelancaran usaha, industri pengolahan dan pemasaran.
- 3) Peningkatan sumber daya peternakan, baik petani maupun tenaga teknis dengan pemanfaatan teknologi peternakan.
- 4) Mengembangkan iptek pengolahan hasil peternakan melalui fasilitasi sarana dan prasarana penunjang untuk pengolahan hasil peternakan.



- 5) Membangun sarana dan fasilitas pemasaran produk peternakan.
- 6) Meningkatkan usaha peternakan rakyat yang lebih ekonomis melalui fasilitasi sistem kemitraan permodalan.
- 7) Meningkatkan peran kelembagaan peternakan untuk mendukung ekonomi kerakyatan.
- 8) Menjamin kondisi yang kondusif dan kepastian hukum bagi dunia usaha di bidang peternakan.

#### **4.2.6. Perikanan dan Kelautan**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Pengembangan SDM bagi *stake holders* perikanan dan kelautan.
- 2) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga petani , nelayan dan masyarakat pesisir.
- 3) Pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang lebih optimal secara lestari.
- 4) Membangun iklim kewirausahaan dan kemitraan usaha perikanan dan kelautan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan.
- 5) Pengembangan ragam industri komoditas perikanan dan kelautan yang berorientasi sumber daya lokal dan kebutuhan pasar.
- 6) Membangun sistem informasi pemasaran produk perikanan baik dalam negeri maupun internasional.

##### **b. Strategi**

- 1) Meningkatkan SDM bagi seluruh stake holders perikanan dan kelautan.
- 2) Peningkatan peran kelembagaan masyarakat budidaya perikanan, nelayan dan masyarakat pesisir.
- 3) Meningkatkan kapasitas manajemen kelembagaan perekonomian masyarakat perikanan.
- 4) Pengembangan kawasan pesisir, penataan lingkungan dan perumahan nelayan.



- 5) Penyediaan infrastruktur perikanan dan aksesibilitasnya ke sentra-sentra produksi perikanan.
- 6) Pengembangan industri pengolahan produk perikanan dan kelautan yang berorientasi pasar.
- 7) Menciptakan peluang pasar yang seluas-luasnya bagi produk perikanan baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.
- 8) Peningkatan penyediaan infrastruktur perikanan dan kelautan.
- 9) Membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi usaha di bidang perikanan dan kelautan.
- 10) Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan melalui perbaikan gizi, pendidikan, kesehatan, dan pembenahan kawasan permukiman masyarakat nelayan dan pesisir.

#### **4.2.7. Sumber Daya Alam**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan SDA/pertambangan secara efisien dan ramah lingkungan.
- 2) Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memanfaatkan peluang melakukan participating interest 10 % industri hulu migas dan kegiatan usaha di sektor hilir migas, seperti penyediaan dan distribusi BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.
- 3) Mengembangkan sektor pertambangan dalam rangka perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, PAD dan kesejahteraan rakyat.
- 4) Penciptaan iklim investasi sektor pertambangan yang kondusif melalui penyiapan perangkat kebijakan sebagai antisipasi kemungkinan timbulnya dampak negatif pengembangan sektor pertambangan baik menyangkut pencemaran maupun konflik kepentingan di masyarakat.

##### **b. Strategi**

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan dan pengelolaan pertambangan.



- 2) Penegakkan hukum terhadap pelanggaran atas ketentuan dan persyaratan usaha pertambangan.
- 3) Pemberantasan usaha pertambangan tanpa ijin (PETI).
- 4) Peningkatan dan pengembangan profesionalisme dan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memasuki kegiatan usaha di sektor migas.
- 5) Menyiapkan tenaga kerja lokal yang terlatih untuk dapat berpartisipasi dalam pasar kerja pada industri pertambangan.
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA menjadi salah satu sumber penerimaan keuangan daerah.
- 7) Peningkatan upaya rehabilitasi lahan-lahan kritis akibat pengelolaan dan kegiatan pertambangan dengan menggerakkan partisipasi dan dukungan masyarakat.

#### **4.2.8. Pariwisata**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan daerah (link) terhadap potensi daerah lain yang memiliki keunggulan wisata bertaraf nasional dan internasional.
- 2) Penetapan dan pengembangan obyek wisata dan seni budaya unggulan daerah.
- 3) Peningkatan pengelolaan dan pelestarian obyek-obyek wisata dan seni budaya daerah.
- 4) Peningkatan promosi wisata dan seni budaya daerah.
- 5) Pengembangan industri pariwisata.

##### **b. Strategi**

- 1) Menciptakan dan mengoptimalkan sistem promosi pariwisata dan seni budaya daerah.
- 2) Membangun kerjasama pariwisata dengan daerah lain dan dengan biro dan agen perjalanan wisata.
- 3) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata daerah.



- 4) Peningkatan kemampuan SDM pariwisata daerah.
- 5) Pengembangan Kota Tanjung Selor dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan serta salah satu daya tarik rekreasi dan pariwisata daerah.
- 6) Pengembangan berbagai keunikan seni budaya dan atraksi yang bersifat spesifik daerah.
- 7) Mengoptimalkan pemeliharaan dan pelestarian seni budaya dan obyek wisata daerah.

### **4.3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur**

#### **4.3.1. Tata Guna Lahan**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Penataan fungsi kawasan yang saling interkoneksi antara sentra produksi dengan kawasan industri dalam rangka pembangunan wilayah strategis;
- 2) Peningkatan peran kelembagaan dalam penataan ruang daerah;
- 3) Penyelarasan pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah;
- 4) Peningkatan interaksi antar wilayah;
- 5) Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan lahan;
- 6) Pencadangan dan penataan kawasan baru sebagai alternatif pengembangan pusat pemerintahan.

##### **b. Strategi**

- 1) Pengembangan kawasan industri yang mempunyai akses terhadap kawasan sentra produksi dan potensial lainnya.
- 2) Peningkatan interaksi antar kawasan sentra produksi;
- 3) Meningkatkan pertumbuhan wilayah secara merata melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan baru;
- 4) Peningkatan keserasian dalam pemanfaatan ruang untuk meningkatkan probabilitas wilayah;



- 5) Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW;
- 6) Peningkatan aksesibilitas dan interaksi antar wilayah melalui pemerataan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana;
- 7) Percepatan penetapan Paduserasi kawasan antar kabupaten dan dengan provinsi.

#### **4.3.2. Lingkungan Hidup**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
- 2) Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada seluruh bidang pembangunan;

##### **b. Strategi**

- 1) Menyusun perangkat kebijakan dalam rangka pengendalian lingkungan.
- 2) Penegakkan hukum terhadap pencemaran lingkungan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan dan penanganan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah.
- 4) Membangun kesadaran masyarakat dan stake holder lainnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan produksi limbah.
- 6) Rehabilitasi dampak kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam.
- 7) Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di segala bidang dengan secara konsisten melaksanakan upaya-upaya pelestarian lingkungan.
- 8) Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya.



### 4.3.3. Perhubungan dan Transportasi

#### a. Arah Kebijakan

- 1) Peningkatan dan pemerataan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu guna pengembangan kawasan strategis baik perkotaan maupun pedesaan dan membuka wilayah-wilayah terisolir lainnya.
- 2) Peningkatan dan pengembangan pelabuhan udara, laut, sungai dan penyeberangan guna mendukung kelancaran lalu lintas orang, barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Bulungan.
- 3) Peningkatan upaya penanganan dan keselamatan transportasi.
- 4) Peningkatan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi;

#### b. Strategi

- 1) Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten dengan seluruh wilayah kecamatan yang memiliki akses hubungan darat guna kelancaran distribusi barang dan jasa pada wilayah pedalaman dan terpencil lainnya.
- 2) Pembangunan jalan baru yang memberikan akses pada kawasan strategis dan kawasan sentra produksi serta produk-produk unggulan daerah.
- 3) Peningkatan sarana transportasi laut dan sungai bagi wilayah yang tidak mempunyai akses hubungan darat antar wilayah, serta dari dan ke ibu kota kabupaten
- 4) Pembangunan terminal pendukung pada kawasan strategis dan sentra-sentra produksi.
- 5) Peningkatan kapasitas serta sarana dan prasarana pelabuhan udara guna mendukung kelancaran arus lalu lintas orang, barang dan jasa di kota Tanjung Selor sebagai calon ibu kota provinsi.
- 6) Pembangunan pelabuhan laut sebagai pendukung pergerakan perdagangan ekspor dan dalam rangka Kabupaten Bulungan sebagai kawasan ekonomi khusus industri (KEKI).



- 7) Peningkatan keselamatan penerbangan dan pelayaran.
- 8) Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional bidang perhubungan dan transportasi.
- 9) Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan dan transportasi.
- 10) Optimalisasi penerimaan daerah melalui pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas perhubungan dan transportasi milik daerah.

#### **4.3.4. Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan tingkat kemampuan pendapatan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- 2) Peningkatan penyediaan perumahan dan permukiman untuk transmigran yang layak huni.
- 3) Pembentukan permukiman transmigran yang mandiri

##### **b. Strategi**

- 1) Pembinaan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.
- 2) Pemenuhan perumahan dan permukiman sesuai tingkat kemampuan pendapatan masyarakat
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di perumahan dan permukiman
- 4) Terwujudnya penataan dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh
- 5) Pengembangan perumahan dan tanah untuk usaha yang memadai bagi transmigran sesuai standar minimum.
- 6) Peningkatan hubungan antar permukiman transmigrasi dengan pusat pemasaran.
- 7) Mengembangkan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang mendukung pembentukan hubungan antar pusat permukiman.



#### **4.3.5. Pengairan**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Peningkatan penyediaan infrastruktur pengairan untuk mendukung produksi pertanian.
- 2) Pengembangan jaringan daerah rawa.

##### **b. Strategi**

- 1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung rencana perluasan areal pertanian.
- 2) Peningkatan peran dan pemberdayaan kelembagaan dalam pengelolaan irigasi pada tingkat petani pemakai air.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan sarana irigasi bagi peningkatan produktivitas hasil pertanian.
- 4) Pembangunan jaringan tata air daerah rawa.
- 5) Peningkatan koordinasi antar instansi penyediaan dan pengelolaan irigasi dengan instansi pengguna irigasi dan dengan masyarakat/petani, sehingga pembangunan irigasi tepat guna dan tepat sasaran.

#### **4.3.6. Air Bersih**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Pembangunan prasarana dan sarana air bersih yang berkualitas secara merata di semua wilayah dengan harga yang terjangkau.
- 2) Peningkatan kapasitas produksi guna pemenuhan kebutuhan air bersih di perkotaan dan pedesaan yang memenuhi syarat kesehatan, sekaligus menyangkut kuantitas dan kontinuitasnya.
- 3) Inventarisasi sumber-sumber air baku di pedesaan untuk penyediaan air bersih masyarakat.

##### **b. Strategi**

- 1) Pemanfaatan sistem gravitasi dan pompanisasi untuk distribusi air bersih di pedesaan.
- 2) Pembangunan air bersih sistem tadah hujan bagi masyarakat pesisir dan wilayah yang tidak memiliki sumber air baku.



- 3) Peningkatan kapasitas dan sarana pipanisasi untuk memperluas jaringan pelayanan air bersih bagi masyarakat di pedesaan.
- 4) Peningkatan upaya pemeliharaan dan penyelamatan sumber air baku dari pencemaran guna menjamin kelangsungan ketersediaan air bersih melalui peningkatan keterlibatan masyarakat.
- 5) Pembentukan kelembagaan pengelolaan air bersih bagi masyarakat di pedesaan.
- 6) Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan untuk peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum bagi di perkotaan.

#### **4.3.7. Energi Listrik**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Peningkatan kemampuan pelayanan kebutuhan listrik masyarakat secara merata pada semua wilayah.
- 2) Pemanfaatan sumber daya setempat untuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di pedesaan.
- 3) Pengurangan ketergantungan pada energi listrik BBM untuk jangka panjang.

##### **b. Strategi**

- 1) Peningkatan kapasitas produksi listrik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- 2) Melakukan kajian dan pengembangan terhadap potensi energi listrik yang ada di daerah (batu bara, air dan gas) untuk dijadikan alternatif pengganti energi BBM untuk kepentingan jangka panjang.
- 3) Pemanfaatan sumber energi setempat untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di pedesaan.
- 4) Pemanfaatan energi PLTS bagi masyarakat di pedesaan untuk pemenuhan kebutuhan dalam jangka pendek.



#### **4.4. Pemerintah Yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Demokratis**

##### **4.4.1. Pemerintahan**

###### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Peningkatan pelayanan bidang pemerintahan yang berkualitas secara merata dan adil bagi seluruh masyarakat.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur bidang pelayanan publik.
- 3) Peningkatan prasarana dan sarana pendukung pelayanan yang efektif dan efisien.
- 4) Peningkatan efisiensi organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

###### **b. Strategi**

- 1) Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan jumlah dan kualitas aparatur pelayanan hingga di seluruh Kecamatan.
- 2) Pengembangan SDM aparatur melalui kegiatan diklat struktural, fungsional dan teknis.
- 3) Peningkatan pengawasan dan disiplin aparatur melalui sistem reward dan punishment.
- 4) Peningkatan fasilitas dan sarana kerja guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Rekrutmen CPNS secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas anggaran daerah.
- 6) Pembentukan lembaga pelayanan publik secara terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- 7) Penyelenggaraan sistem anggaran yang berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Penyediaan anggaran dan belanja yang memadai bagi terpenuhinya pelayanan masyarakat yang optimal.



#### **4.4.2. Hukum**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Penjaminan terhadap kepastian, keadilan dan penegakkan hukum bagi masyarakat.
- 2) Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral guna meningkatkan kualitas kinerja aparat hukum guna memfasilitasi penyediaan regulasi dan pembentukan badan kerjasama atau forum-forum penegak hukum.

##### **b. Strategi**

- 1) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program penyuluhan kesadaran hukum.
- 2) Perumusan peraturan daerah (perda) serta penerapan sebagai indikator peningkatan kualitas hukum dalam proses kebijakan publik di daerah.
- 3) Peningkatan kapasitas dalam menindak setiap perkara kejahatan, baik pidana maupun perdata secara adil, transparan dan akuntabel.
- 4) Pengembangan pos pemantau terpadu di setiap daerah rawan tindak kejahatan.
- 5) Peningkatan kerjasama dan fasilitasi upaya penegakkan hukum dan dalam rangka ketertiban masyarakat.

#### **4.4.3. Pos, Telekomunikasi dan Media Massa**

##### **a. Arah Kebijakan**

- 1) Pengembangan kuantitas dan kualitas media massa daerah baik media cetak maupun elektronik sebagai wahana informasi pembangunan kepada masyarakat serta guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan akses pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media massa.

**b. Strategi**

- 1) Pengembangan dan peningkatan jangkauan serta kualitas siaran radio milik pemerintah daerah
- 2) Mendorong peran masyarakat untuk mengembangkan media siaran radio swasta.
- 3) Pembangunan dan pengembangan siaran televisi lokal melalui kerja sama peningkatan jangkauan siaran televisi swasta nasional di daerah.
- 4) Peningkatan akses layanan masyarakat pada media internet.
- 5) Peningkatan jangkauan distribusi media cetak hingga ke wilayah pedesaan.

**4.4.4. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat****a. Arah Kebijakan**

- 1) Melaksanakan sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infrastruktur politik untuk memantapkan interaksi politik antara infrastruktur dan suprastruktur politik, serta sosial budaya masyarakat.
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilpres yang bersifat nasional serta pelaksanaan pilkada yang demokratis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- 3) Meningkatkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta mendewasakan sikap dan perilaku demokrasi masyarakat yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman dan pengamalan etika dan moral Pancasila.
- 4) Meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa terhadap ancaman dan gangguan, hambatan dan tantangan atas kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara bagi segenap warga masyarakat.
- 5) Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi bahaya bencana dan penanggulangannya.



#### **b. Strategi**

- 1) Meningkatkan pengembangan etika, moral dan budaya politik yang demokratis di daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas integrasi sosial budaya melalui peningkatan kelembagaan sosial dan budaya, perbaikan perilaku sosial yang menyimpang dan pengembangan sumberdaya pranata sosial.
- 3) Meningkatkan kemandirian orpol, ormas dan LSM.
- 4) Percepatan pengembangan pendidikan politik.
- 5) Meningkatkan penguatan ketahanan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.
- 6) Pengembangan metode dan materi serta peningkatan kewaspadaan.
- 7) Peningkatan upaya pembaruan bangsa dalam memperkuat integrasi.
- 8) Peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.
- 9) Peningkatan kesadaran dan kemampuan bela negara dalam rangka ketahanan bangsa dan wawasan nusantara.
- 10) Peningkatan sistem perlindungan masyarakat/pertahanan sipil dalam rangka Sishankamrata.
- 11) Penyusunan sistem informasi dan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat/pertahanan sipil.

#### **4.5. Tahapan Pelaksanaan dan Skala Prioritas**

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang di Kabupaten Bulungan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan urgensi pembangunan. Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dicanangkan, maka tahapan pembangunan dilakukan dalam tahapan 5 (lima) tahunan, sekaligus menjadi Rencana agenda Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Secara keseluruhan tahapan dalam RPJP ini menggambarkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang terdiri dari **RPJM Pertama** dimulai dari



tahun 2005 – 2010, **RPJM Kedua** dimulai dari tahun 2010 – 2015, **RPJM Ketiga** dimulai dari tahun 2015 – 2020 dan **RPJM Keempat** dimulai dari tahun 2020 – 2025.

Secara umum permasalahan yang sangat mendesak merupakan skala prioritas yang utama dalam pemecahan masalah dalam skala pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih strategis. Hal ini berkaitan dengan distribusi penduduk dalam area yang sangat luas dan terkonsentrasi di pedesaan dan kecamatan yang secara keseluruhan memerlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), dan salah satu bagian yang terpenting adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Selanjutnya pergerakan ekonomi utama di Kabupaten Bulungan kondisi saat ini adalah dari hasil pengelolaan hasil hutan, serta pengelolaan migas dan pertambangan yang merupakan sumberdaya yang tidak terbarukan. Dalam jangka panjang pengelolaan hasil hutan, migas dan pertambangan sangat mempengaruhi struktur ekonomi, sehingga diperlukan perubahan struktur dasar ekonomi yang lebih mengandalkan agribisnis dan industri pengolahan berbasis bahan terbarukan dengan didukung sumberdaya manusia yang handal, sekaligus memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Berbagai hal yang diperlukan untuk menjamin kondisi daerah yang selalu kondusif dan diminati oleh investor adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi masyarakat dan berbagai deregulasi. Untuk menunjang keadaan tersebut tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah melalui penyediaan infrastruktur berupa transportasi darat, laut/sungai dan udara, serta energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan Daerah, Kecamatan dan Pedesaan serta sentra ekonomi.

Permasalahan lain yang memerlukan penanganan segera adalah Wilayah tertinggal dan Kemiskinan, khususnya untuk mengejar ketertinggalan dan penurunan kemiskinan dibandingkan dengan daerah lain, disamping itu penataan ruang yang dilaksanakan secara konsisten terutama dalam meningkatkan pemerataan pembangunan yang disertai dengan penanganan masalah lingkungan hidup.



Terkait dengan kebutuhan akan peningkatan pelayanan masyarakat dan mendorong kemandirian wilayah, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang lebih optimal, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah pada masyarakat maka perlu pengkajian lebih lanjut tentang kemungkinan dilakukannya pemekaran wilayah Kecamatan di kabupaten Bulungan. Pelaksanaan pemekaran wilayah Kecamatan harus diimbangi dengan semangat peningkatan kinerja pembangunan berbasis keseimbangan wilayah.

#### **4.5.1. RPJM Pertama (2005 – 2010)**

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini dijadikan sebagai Pijakan Dasar dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun pertama, terutama digunakan untuk menata pijakan dasar pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Peletakan dasar masa pembangunan jangka panjang pada tahap pertama terutama peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang tangguh sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi. Sedangkan pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan berpihak pada masyarakat, dukungan infrastruktur dasar lebih diarahkan kepada pengembangan wilayah tertinggal, pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa berjalan lebih efisien dan efektif, dan penegakan aturan lebih diutamakan serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan.

##### **a. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Tangguh**

Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) ditandai dengan peningkatan berbagai bidang yang terkait khususnya pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini juga akan sangat ditunjang oleh peningkatan penelitian dan penguasaan iptek, peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan pemuda dan olahraga; serta



didukung oleh kebersamaan antar pemeluk agama dan semakin diperhatikannya kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada tahap pertama ini peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan dengan meningkatkan wajib belajar 9 tahun yang mengarah pada 12 tahun, pembentukan pendidikan unggulan daerah dengan mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan pasar, dan mengarahkan pembentukan pendidikan berbasis teknologi sebagai pendidikan unggulan. Rintisan pembentukan kerjasama dalam pengembangan pendidikan sebagai satu sistem jaringan nasional.

Salah satu kebutuhan pengembangan sumber daya manusia adalah dukungan Litbang dan Iptek sehingga prioritas pembangunan harus didukung oleh penelitian yang aplikatif di berbagai bidang. Dengan demikian setiap bidang pembangunan perlu meletakkan dasar Litbang dan penguasaan iptek

Peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman kesehatan pada segenap lapisan masyarakat, serta perluasan sosialisasi pada masyarakat tentang kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. Distribusi penduduk yang sangat besar memerlukan peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan. Selanjutnya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan maka perlu mulai dilakukan pemerataan tenaga medis, paramedis dan non medis di setiap kecamatan yang didukung oleh adanya dokter spesialis dan ahli-ahli kesehatan.

Peningkatan kualitas sumberdaya melalui peningkatan peluang usaha kerja dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, dan upaya peningkatan kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, maka diperlukan partisipasi dunia usaha, serta menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja.



Peningkatan peranan wanita merupakan salah bagian terpenting dalam pembangunan di segala bidang. Peningkatan peranan ini dilakukan melalui peningkatan peran aktif perempuan dalam pembangunan baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Peningkatan peran pemuda sebagai generasi penerus dalam pembangunan diupayakan melalui pembentukan berbagai organisasi kepemudaan sebagai wadah dalam menampung aspirasi pemuda. Peningkatan prestasi olahraga tidak terlepas dari peran aktif dan partisipasi masyarakat olahraga yaitu melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang olah raga dengan peningkatan pembinaan cabang olah raga secara berkeadilan.

Dalam bidang keagamaan, kerukunan umat beragama sejauh ini terpelihara dengan cukup baik, namun demikian tetap diperlukan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan keagamaan melalui peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan dan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama masing-masing.

Dalam bidang Kesejahteraan Sosial diperlukan peningkatan pembinaan secara lebih khusus, terutama bagi masyarakat yang memiliki ketidakmampuan secara fisik/cacat dan orang tua yang sudah uzur/jompo dengan memberikan pelayanan pendidikan terutama pendidikan dasar dan keterampilan, pelayanan kesehatan dan pelaksanaan subsidi silang.

#### **b. Pengembangan Ekonomi Wilayah**

Konsep dasar pengembangan ekonomi wilayah adalah dengan memperkuat struktur ekonomi yang fundamental dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Salah satu upaya yang diperlukan dalam pembangunan jangka panjang pertama ini adalah meningkatkan upaya pemerataan antar wilayah dan antar sector-sektor ekonomi. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas khususnya di perkebunan, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi investasi dan perdagangan dengan mengundang investor untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, melakukan pengembangan kawasan ekonomi terpadu ataupun



kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial. Sedangkan secara proporsional peran migas pertambangan dan kehutanan tetap sebagai penopang utama perekonomian.

Pengembangan pertanian tanaman pangan dalam pada pembangunan jangka panjang pertama ini dan pembangunan sebelumnya diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan sendiri melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang pertanian, penetapan wilayah sentra pembangunan pertanian, pembentukan kawasan agropolitan, serta pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara terpadu dan utuh. Sedangkan di bidang pertanian tanaman pangan dilakukan pengembangan infrastruktur pengairan sebagai penunjang utama pertanian.

Pengembangan perkebunan memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Bulungan khususnya dan provinsi Kalimantan Timur Umumnya terutama untuk masa yang akan datang, sehingga sangat diperlukan peletakan dasar pengembangan perkebunan baik terkait dengan penyiapan lahan, pengembangan komoditas maupun infrastruktur dan sumberdaya manusia yang tangguh. Pengembangan perkebunan ini dilakukan dengan melakukan pemilihan komoditas potensial, pembentukan sentra perkebunan sebagai kutub pertumbuhan bagi wilayah disekitarnya.

Pengembangan Kehutanan memiliki peranan penting bagi pengembangan ekonomi, tetapi secara bertahap peranannya sebagai ekspor bahan mentah perlu dikurangi. Dalam tahap pertama diperlukan pemetaan potensi dan fungsi hutan disertai pengelolaan hutan secara lestari dan intensif. Mengingat masih banyaknya kerusakan pada sumberdaya hutan, maka tindakan rehabilitasi dan konservasi SDH dilakukan dengan skala luas, meningkatkan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH dan melestarikannya.

Pengembangan peternakan diarahkan menjadi ternak andalan dan unggulan disertai pengembangan infra struktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan dan berupaya mencari peluang



pemasaran seluas-luasnya kepada pelaku usaha. Pembinaan pengembangan dan pengelolaan ternak bagi masyarakat perlu diperluas pada skala ekonomis, dan memiliki daya saing sebagai bagian dari agribisnis dan agroindustri bidang peternakan.

Pengembangan bidang perikanan dan kelautan dilakukan dengan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia, pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, serta peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi perikanan. Perkembangan perikanan dan kelautan perlu didukung oleh investasi dan kemitraan, disertai upaya pengolahan produk perikanan sebagai produk unggulan kabupaten Bulungan.

Pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pelaku utama perekonomian ekspor perlu didorong dan dipacu melalui berbagai sistem insentif, termasuk membangun kemitraan dalam berbagai bidang.

Pengembangan perekonomian bidang pariwisata perlu diupayakan untuk ditingkatkan secara optimal, mengingat di masa depan pengembangan pariwisata memiliki prospek yang sangat baik dengan menciptakan keterkaitan antar kepariwisataan antar Daerah dan Nasional. Pengembangan promosi wisata dan disertai dengan penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan.

Dalam mengembangkan perekonomian diperlukan peningkatan iklim dan minat investasi yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri disertai dengan jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum dalam berusaha, kemudahan usaha dan investasi diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan peningkatan pengelolaan BUMD disertai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan tanggung jawab pada pengelolaan BUMD.

Dalam pengembangan jangka panjang sistem perekonomian di kabupaten Bulungan secara bertahap ketergantungan pada pertambangan dikurangi melalui peningkatan kualitas pengolahan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan.



Untuk meningkatkan nilai ekonomis maka diperlukan peningkatan alternatif pengelolaan bahan tambang potensial, melalui penataan dan penertiban bekas tambang dengan melakukan *reuse* sebagai langkah intensifikasi.

### c. Prasarana Dasar

Prasarana dasar yang sangat diperlukan dalam pembangunan adalah Transportasi, Irigasi, Kelistrikan dan Air Bersih. Secara keseluruhan keempat bidang ini sangat menunjang keberhasilan pembangunan baik terutama dalam mendorong pertumbuhan maupun mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah (Desa dan Kecamatan).

Pengembangan transportasi darat dalam tahap pertama diarahkan pada upaya pemerataan pengembangan jaringan jalan antar wilayah kecamatan dan desa disertai pemeliharaan jalan yang sudah ada. Pengembangan transportasi juga dilakukan pada sentra ekonomi sehingga terbentuk pola jaringan yang terpadu.

Pengembangan transportasi sungai di kabupaten Bulungan tetap dilakukan dengan membangun fasilitas pendukung untuk kelancaran moda transportasi sungai, dengan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana ASDP untuk menunjang pergerakan intermoda transportasi.

Pengembangan transportasi laut dilakukan dengan melakukan integrasi pergerakan intermoda, dengan upaya peningkatan kapasitas pelabuhan laut dalam kegiatan ekspor-impor. Pengembangan pelabuhan laut dikaitkan dengan pengembangan sentra ekonomi sebagai penghasil barang ekspor dan impor.

Pengembangan pelayanan transportasi udara dilakukan melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana bandara yang memadai, sehingga aksesibilitas dapat terjangkau.

Pengembangan sistem irigasi dilakukan dengan memprioritaskan pada kemampuan dalam pengairan terhadap sawah dengan upaya peningkatan/pembangunan jaringan irigasi yang baru dan merehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Pengembangan jaringan irigasi daerah rawa dilakukan dengan peningkatan dan pembangunan jaringan tata air daerah rawa dan tambak.



Pengembangan dan peningkatan energi listrik di arah pada peningkatan penyediaan sumber daya listrik dengan cara intensifikasi dan diverifikasi dengan cara parsial pada pemukiman yang terpencar dan dalam jumlah kecil, terutama daerah pedesaan yang terpencil dan terisolir yang hingga kini belum memiliki jaringan listrik, serta secara bertahap juga dilakukan efisiensi dengan cara penekanan terjadinya losses tenaga listrik.

Pengembangan dan peningkatan Air bersih diarahkan pada peningkatan penyediaan sumber daya air bersih dengan cara intensifikasi dan diverifikasi serta berupaya meningkatkan pelayanan secara optimal, sehingga seluruh komponen masyarakat baik di desa maupun di kota akan menikmati pelayanan air bersih secara maksimal serta diikuti oleh peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sungai sebagai sumber mata air bersih bebas dari pencemaran.

#### **d. Kebijakan Publik, Pemerintahan dan Penegakan Hukum**

Pada dasarnya, setiap kegiatan pembangunan adalah secara terus-menerus melakukan peningkatan pelayanan bidang pemerintahan ke segenap lapisan masyarakat, meningkatkan efisiensi organisasi perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis, sehingga terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Terciptanya pelayanan prima tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya pegawai negeri sipil dan memberikan perhatian khusus terutama pada wilayah terpencil dan terisolir yang ada di pedalaman dan wilayah pantai.

Peningkatan pada bidang hukum dilakukan dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum. Seiring dengan kondisi keterbukaan pada saat ini dengan semakin meluasnya jaringan informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas media informasi tersebut guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Bulungan.

#### **e. Penataan Ruang dan Lingkungan**

Penataan ruang dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai program pembangunan yang ada sekarang ini. Pengembangan struktur



ruang yang dapat mengurangi disparitas antar wilayah, meningkatkan pertumbuhan wilayah, sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah. Pada wilayah yang memiliki kawasan potensial dan strategis baik skala Nasional dan Provinsi maupun skala Kabupaten diperlukan perhatian secara khusus dan dorongan yang optimal agar kawasan tersebut dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan.

Pemukiman penduduk yang tersebar dalam jumlah skala besar dan kecil baik di perkotaan maupun di perdesaan diberikan arahan pengertian tentang pemukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Untuk kawasan pemukiman penduduk yang kumuh dan atau terisolir diperlukan revitalisasi kawasan pemukiman yang sesuai dengan keperluan penduduk/masyarakat.

Pada pemukiman transmigrasi dilakukan peningkatan penyediaan hunian yang layak untuk anggota keluarga transmigrasi dan disertai dengan penyediaan lahan usaha yang memadai dan potensial guna kegiatan usaha masyarakat transmigrasi yang dapat bernilai ekonomis tinggi dengan membentuk agroindustri dan agribisnis.

Terkait dengan pemanfaatan berbagai sumberdaya alam di wilayah Kabupaten Bulungan, maka pemahaman tentang kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan perlu diprioritaskan khususnya dalam rangka penanganan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Untuk tindakan pencegahan penurunan kualitas lingkungan sehingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya maka diperlukan penegakan hukum bagi pelaku perusakan lingkungan. Upaya perbaikan kualitas lingkungan yang telah rusak dilakukan dengan rehabilitasi dan konversi serta pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam.

#### **4.5.2. RPJM Kedua (2010 – 2015)**

Program Jangka Menengah pada tahap kedua di arah pada Pemantapan Perubahan Struktur Sosial-Ekonomi, sehingga pembangunan akan lebih diarahkan pada penguatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki IPTEK dan IMTAQ, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan



agroindustri mulai berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi pemasaran di wilayah Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produksi hulu-hilir.

Kondisi pembangunan pada saat ini secara keseluruhan telah menunjukkan pada arah peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Bulungan, lingkungan mulai terkendali dan secara umum terjadi peningkatan daya saing daerah dalam kemandirian pembangunan.

Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang semakin meningkat dari seluruh komponen lapisan masyarakat.

Penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah, kondisi lingkungan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Bulungan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan atas dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap menjaga dan melestarikan lingkungan dan adanya peningkatan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan dengan menerapkan sanksi dan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara keseluruhan dalam Program Jangka Menengah Kedua diarahkan pada pembentukan masyarakat sejahtera dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih adil di segala bidang, baik antar sektor dan antar wilayah serta antar wilayah pedesaan dan perkotaan.

#### **a. Pengembangan Sumberdaya Manusia**

Kualitas Sumberdaya manusia secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan
- ◆ Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- ◆ Berkurangnya tingkat pengangguran
- ◆ Meningkatnya peran wanita dan pemuda dalam pembangunan
- ◆ Prestasi olahraga mulai bersaing di tingkat Kabupaten dan Provinsi
- ◆ Kehidupan keagamaan semakin menunjukkan peningkatan kerukunan



- ◆ Meningkatnya Indeks kesejahteraan sosial yang ditandai oleh berkurangnya anak terlantar dan atau putus sekolah.
- ◆ Meningkatnya partisipasi dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
- ◆ Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kewajiban belajar 12 tahun
- ◆ Tersedianya sekolah unggulan di setiap Kecamatan
- ◆ Kualitas ketenagakerjaan semakin meningkat
- ◆ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat
- ◆ Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelayanan kesehatan ke seluruh wilayah Kabupaten
- ◆ Tersedianya tenaga medis dengan distribusi yang merata ke seluruh wilayah Kabupaten
- ◆ Meningkatnya usia harapan hidup
- ◆ Menurunnya jumlah kematian ibu saat melahirkan
- ◆ Membaiknya lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat
- ◆ Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu
- ◆ Meningkatnya peran serta wanita dalam dunia politik, pemerintahan dan kegiatan masyarakat
- ◆ Tersedianya sekolah olah raga sebagai menunjang peningkatan prestasi
- ◆ Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas dan pendidikan keagamaan.

#### **b. Pengembangan Ekonomi Wilayah**

Dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan semakin baiknya iklim investasi, secara langsung akan mempengaruhi pengembangan perekonomian wilayah. Perubahan struktur ekonomi tersebut yang ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya pertanian dalam arti luas di seluruh wilayah Kabupaten secara signifikan
- ◆ Berkurangnya secara bertahap ketergantungan pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan



- ◆ Berkembangnya industri pengolahan dari hulu sampai hilir
- ◆ Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat skala luas terhadap pengembangan perekonomian
- ◆ Peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) semakin meningkat
- ◆ Meningkatnya interaksi ekonomi antar sektor wilayah
- ◆ Meningkatnya kualitas dan kuantitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- ◆ Meningkatnya kemandirian daerah dalam menyediakan kebutuhan pangan
- ◆ Berkembangnya sentra produksi pertanian unggulan dan pusat pelayanan pertanian.
- ◆ Berkembangnya wilayah agropolitan sebagai sarana pengembangan agribisnis dan agroindustri.
- ◆ Meningkatnya daya saing lokal dari sisi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- ◆ Berkembangnya infrastruktur informasi pasar pertanian
- ◆ Berkembangnya sentra-sentra komoditas unggulan perkebunan di beberapa wilayah Kecamatan
- ◆ Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan komoditas unggulan perkebunan
- ◆ Tersedianya pengolahan dan perbaikan pemasaran hasil perkebunan
- ◆ Terarahnya pemanfaatan sumberdaya hutan menjadi pembentukan hutan lestari
- ◆ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengolah hutan lestari.
- ◆ Berkembangnya usaha peternakan unggulan lokal yang diikuti oleh partisipasi masyarakat
- ◆ Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja bidang peternakan
- ◆ Berkembangnya usaha perikanan dan kelautan peran semakin meningkat
- ◆ Meningkatnya infrastruktur perikanan yang lebih berkualitas



- ◆ Terciptanya pengolahan hasil ikan menjadi industri perikanan sebagai komoditas unggulan daerah
- ◆ Meningkatnya iklim investasi bidang perikanan
- ◆ Meningkatnya kualitas pola kemitraan antar sektor stake holder
- ◆ Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan
- ◆ Meningkatnya jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum dengan disertai kondusifnya kondisi daerah
- ◆ Perkembangan BUMD dan Perusahaan daerah (PERUSDA) semakin membaik
- ◆ Perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) semakin berperan dalam roda perekonomian daerah
- ◆ Meningkatnya jumlah UKM dan IKM dalam kegiatan ekonomi.
- ◆ Terpeliharanya kualitas alam dan terjaganya budaya sebagai asset pariwisata
- ◆ Berkembangnya kualitas dan kuantitas obyek-obyek wisata daerah
- ◆ Meningkatnya wisata lokal, wisata nusantara dan wisata mancanegara dalam kunjungan ke obyek wisata daerah
- ◆ Terbentuknya jaringan pariwisata daerah dan semakin membaiknya promosi wisata daerah.

### **c. Prasarana Dasar**

Peningkatan perekonomian wilayah dan kualitas sumberdaya manusia sangat mempengaruhi perkembangan transportasi wilayah yang semakin membaik dan diikuti dengan perkembangan energi listrik yang semakin mapan serta irigasi yang semakin meluas wilayah pengalirannya. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh :

- ◆ Perkembangan Transportasi laut melalui kegiatan ekspor-import antar daerah dan mancanegara semakin membaik
- ◆ Perkembangan transportasi darat sebagai salah penghubung antar pusat pemukiman perkotaan dan pedesaan serta pusat-pusat perekonomian wilayah dan kawasan unggulan daerah semakin membaik



- ◆ Perkembangan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan semakin merata antar wilayah Kecamatan
- ◆ Perkembangan transportasi udara semakin diperhitungkan perannya dalam menunjang perekonomian wilayah
- ◆ Perkembangan sistem irigasi sebagai sarana penunjang pertanian tanaman pangan semakin membaik dan meluasnya wilayah aliran
- ◆ Perkembangan energi listrik di seluruh wilayah semakin membaik melalui intensifikasi dan diversifikasi saat beban puncak.

**d. Kebijakan Publik, Pemerintah dan Penegakan Hukum**

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peranan pemerintah sebagai regulator dan administrator dalam pembangunan sangat diutamakan, upaya ini ditunjukkan dengan meningkatnya efektivitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah yang ditandai oleh :

- ◆ Terpenuhinya standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah serta susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis
- ◆ Semakin membaiknya tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah terutama di wilayah Kecamatan dan Desa
- ◆ Pemerataan penyebaran pegawai pada wilayah Kecamatan terutama pada wilayah tertinggal dan terpencil ataupun terisolir.
- ◆ Peningkatan pelayanan bidang hukum semakin membaik
- ◆ Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum semakin meningkat
- ◆ Perkembangan struktur organisasi setingkat Muspida dan Muspika di wilayah Kecamatan semakin membaik
- ◆ Terciptanya kepastian hukum bagi berbagai dunia usaha
- ◆ Penegakan hukum lebih efektif dijalankan di berbagai bidang pembangunan
- ◆ Perkembangan media masa semakin mendapat tempat yang lebih proporsional dan lebih terbuka di kalangan masyarakat
- ◆ Meningkatnya kualitas media cetak maupun elektronik sebagai publikasi pembangunan



- ◆ Perkembangan lembaga publikasi dan media semakin meningkat dari segi kuantitas dan kualitas

#### **e. Penataan Ruang dan Lingkungan**

Pembangunan pada berbagai bidang terus meningkat sehingga mendorong pertumbuhan wilayah akan tetap terarah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan yang tertuang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya keseimbangan distribusi antara perkotaan dan perdesaan pada struktur ruang wilayah
- ◆ Jaringan pergerakan antar wilayah dan kegiatan ekonomi utama wilayah semakin memiliki spesialisasi
- ◆ Pengembangan wilayah tetap berpedoman dengan program pembangunan yang berkesinambungan dan mengacu tata ruang wilayah
- ◆ Penyimpangan pemanfaatan ruang lindung untuk kawasan budidaya semakin mengecil
- ◆ Meningkatnya minat investasi di daerah yang didukung oleh penataan ruang yang kondusif
- ◆ Peningkatan kualitas permukiman di berbagai wilayah Kecamatan dan Desa semakin membaik
- ◆ Tersedianya perumahan masyarakat yang berpendapatan rendah
- ◆ Meningkatnya kualitas permukiman dan berkurangnya permukiman kumuh
- ◆ Meningkatnya produktivitas masyarakat yang disebabkan tertib lingkungan dan permukiman.

#### **4.5.3. RPJM Ketiga (2015 – 2020)**

Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama 2 (dua) periode sebelumnya menunjukkan pementapan pemerataan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat. Pada tahap Periode ketiga konsentrasi pembangunan lebih mengarah pada Kualitas sumberdaya manusia semakin meningkat sehingga sumberdaya manusia di daerah setara



dengan sumberdaya manusia daerah lain (nasional), ketergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan semakin berkurang dan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang serta struktur ekonomi semakin mantap.

Pembangunan prasarana dan sarana dasar telah mencapai ke seluruh wilayah pedesaan sehingga pelaksanaan pemerintahan berjalan semakin efektif, efisien dan transparan.

Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah yang diikuti dengan peningkatan kualitas lingkungan secara global semakin mantap.

#### **a. Pengembangan Sumberdaya Manusia**

Pembangunan yang telah dilaksanakan 2 (dua) periode sebelumnya merupakan pembangunan terencana dan berkesinambungan, hal ini dapat dilihat hasilnya berupa tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas yang memiliki IPTEK dan IMTAQ yang tangguh dan dapat bersaing setara dengan daerah lainnya. Kesejahteraan masyarakat makin meningkat dan semakin mandiri dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, yang ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya pemerataan pelaksanaan pendidikan ke segenap kawasan perkotaan dan pedesaan
- ◆ Program wajib belajar 12 tahun semakin mantap
- ◆ Program sekolah unggulan dan sekolah kejuruan sudah berkembang setingkat nasional.
- ◆ Kualitas pendidikan secara umum telah setara dengan rata-rata nasional.
- ◆ Peningkatan kualitas pendidikan sebagai pilar utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia
- ◆ Kualitas tenaga kerja daerah yang ditopang oleh litbang dan iptek semakin meningkat dan setara secara nasional
- ◆ Kebijakan yang diambil sebagai keputusan didukung oleh hasil penelitian yang valid dan disepakati berbagai pihak.



- ◆ Perkembangan litbang dan iptek dalam pemerintahan dan swasta semakin meningkat.
- ◆ Kualitas tenaga kerja semakin meningkat seiring meningkatnya peran litbang dan iptek sehingga kesetaraannya setingkat nasional
- ◆ Peningkatan kesadaran akan kesehatan dan perilaku hidup sehat sangat menonjol di masyarakat
- ◆ Pemerataan distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis/para medis hingga ke pelosok desa semakin meningkat
- ◆ Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan usia harapan hidup masyarakat Bulungan.
- ◆ Menurunnya angka kematian ibu hamil saat melahirkan
- ◆ Meningkatnya lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat di masyarakat
- ◆ Meningkatnya pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang kurang mampu
- ◆ Kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah semakin meningkat
- ◆ Terpenuhinya kebutuhan tenaga teknik, medis, perencanaan, manajemen, pariwisata dan pengelolaan lingkungan
- ◆ Meningkatnya peran aktif dan partisipatif pemuda terhadap pembangunan yang berkelanjutan (sustainable)
- ◆ Meningkatnya organisasi masyarakat (ORMAS), Seni dan Olah raga yang kesetaraannya sama dengan daerah lain hingga Nasional
- ◆ Meningkatnya kegiatan agama dan kerukunan beragama di tengah masyarakat
- ◆ Meningkatnya pembangunan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan masyarakat
- ◆ Perkembangan sekolah berbasis keagamaan semakin mapan dan terdistribusi ke berbagai Kecamatan.
- ◆ Meningkatnya peran pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat
- ◆ Meningkatnya partisipatif dan peran aktif masyarakat menuju masyarakat yang mandiri



## **b. Pengembangan Ekonomi Wilayah**

Bila pada tahap ke-2 (dua) perubahan ekonomi sudah mulai membaik dan mapan, para investor meningkatkan investasinya, ketergantungan pada sumberdaya alam primer semakin berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya, maka pada tahap ketiga secara keseluruhan program pembangunan tetap mengacu pada tahapan sebelumnya dengan semakin meningkatkan dan memantapkan program yang sudah ada. Partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan perekonomian juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peran aktif dan partisipasi masyarakat semakin meningkatkan dalam mengembangkan koperasi dan berbagai UKM hingga menjadi besar. Dalam tahap ini penyediaan kebutuhan pangan dan hortikultura dapat dipenuhi secara mandiri dan sebagian dapat dipasarkan ke wilayah lain. Perkembangan ekonomi wilayah pada tahap ke-3 (tiga) ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya perkembangan teknologi pangan hingga ke desa
- ◆ Meningkatnya diversifikasi penyediaan pangan daerah
- ◆ Meningkatnya sentra produksi dan pemasaran dalam sistem jaringan yang saling menguntungkan
- ◆ Meningkatnya wilayah dan sistem agropolitan
- ◆ Meningkatnya perkembangan infrastruktur pertanian
- ◆ Meningkatnya usaha masyarakat dibidang agrobisnis dan agroindustri
- ◆ Meningkatnya sistem informasi pertanian termasuk informasi pasar
- ◆ Meningkatnya produksi perkebunan unggulan yang memiliki daya saing di pasaran nasional
- ◆ Meningkatnya hasil perkembangan industri pengolahan pertanian, peternakan dan perkebunan
- ◆ Meningkatnya pemukiman masyarakat sebagai kegiatan sentra perkebunan
- ◆ Meningkatnya pelestarian hutan lindung dengan sistem pengelolaan hutan lestari
- ◆ Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan hutan produksi



- ◆ Meningkatnya nilai ekonomi hasil hutan produksi
- ◆ Meningkatnya pemberantasan perambahan hutan (illegal logging)
- ◆ Meningkatnya peran penegak hukum dalam memberantas perambah hutan.
- ◆ Meningkatnya hasil produksi peternakan sebagai ekonomi unggulan
- ◆ Meningkatnya diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya
- ◆ Meningkatnya ekspor ternak unggulan yang memiliki daya saing di pasaran nasional
- ◆ Meningkatnya penanggulangan penyakit ternak
- ◆ Meningkatnya sumberdaya manusia bidang peternakan
- ◆ Meningkatnya perkembangan jumlah usaha ternak, tenaga ahli bidang peternakan, dan lembaga penelitian dan penyediaan ternak unggulan
- ◆ Meningkatnya hasil produksi perikanan dan kelautan
- ◆ Meningkatnya pengelolaan hasil penangkapan ikan
- ◆ Meningkatnya sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan
- ◆ Meningkatnya sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi perikanan dan kelautan
- ◆ Meningkatnya sentra-sentra produksi perikanan
- ◆ Meningkatnya minat perkembangan investasi dan kemitraan

### c. Prasarana Dasar

Pembangunan pada tahap ketiga merupakan tahapan menuju kemapanaan bidang transportasi, terutama menjadikan transportasi darat memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antar pusat pemukiman dan pusat produksi sudah secara keseluruhan. Pergerakan orang, barang dan jasa melalui pelabuhan laut dan udara menunjukkan kenaikan yang cukup baik. Kebutuhan akan listrik dan sumber air untuk masyarakat sudah terpenuhi hingga ke pelosok desa. Hal ini ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya jalan-jalan kabupaten dan jalan desa hingga ke seluruh wilayah Bulungan.
- ◆ Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan jalan
- ◆ Meningkatnya dana pemeliharaan jalan melalui APBD
- ◆ Meningkatnya pengembangan jaringan jalan sebagai sistem intermoda



- ◆ Meningkatnya akses darat yang menghubungkan pusat permukiman baik di desa maupun di kota dengan sentra produksi
- ◆ Meningkatnya pembangunan jalan di kawasan industri menuju pelabuhan laut dan darat
- ◆ Meningkatnya pelabuhan laut untuk mendorong perdagangan skala regional dan nasional
- ◆ Meningkatnya pelabuhan skala regional dan nasional maupun perintis sesuai dengan fungsinya
- ◆ Meningkatnya deregulasi bidang kepabeanan
- ◆ Meningkatnya volume perdagangan antar wilayah dan regional hingga nasional
- ◆ Meningkatnya Bandar udara sebagai pendorong perdagangan dan investasi
- ◆ Meningkatnya perkembangan kegiatan antar wilayah melalui transportasi Udara
- ◆ Meningkatnya pergerakan masyarakat Bulungan menggunakan transportasi udara
- ◆ Meningkatnya pelayanan Bandar udara yang lebih efisien dan efektif
- ◆ Meningkatnya pergerakan barang dan jasa melalui Bandar udara
- ◆ Meningkatnya luasan produktivitas tanah untuk pertanian
- ◆ Meningkatnya sistem irigasi untuk pengairan sawah dalam jangka waktu panjang dan dalam jumlah luasan yang cukup besar
- ◆ Meningkatnya sistem dan teknologi irigasi untuk pertanian
- ◆ Meningkatnya persediaan energi listrik secara mapan
- ◆ Meningkatnya pasokan listrik untuk pemukiman perkotaan dan pedesaan, kawasan industri pada beban puncak
- ◆ Meningkatnya pengembangan sistem terpadu atau *interconnected system* antar daerah dan regional
- ◆ Meningkatnya diversifikasi dan sumber pembangkit listrik serta sistem pengamanannya sesuai dengan standar
- ◆ Meningkatnya partisipasi masyarakat akan menghemat energi listrik



#### **d. Kebijakan Publik, Pemerintahan dan Penegakan**

Pada tahap ketiga ini peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transportasi serta akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin nyata. Efisiensi tingkat pelayanan masyarakat setara dengan efisiensi rata-rata nasional, standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundangan. Kualitas sumberdaya manusia dalam bidang pelayanan masyarakat semakin meningkat. Sumberdaya manusia bidang hukum kualitasnya semakin meningkat, sumber informasi semakin meluas dan mudah di akses oleh masyarakat, yang ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke jenjang yang lebih tinggi
- ◆ Meningkatnya setiap bidang pelayanan memiliki spesialis keahlian
- ◆ Meningkatnya tingkat pelayanan masyarakat di daerah terpencil, terisolir, pesisir dan pedalaman sesuai memenuhi standard
- ◆ Meningkatnya berbagai penyelenggaraan pelatihan, pendidikan bagi aparat hukum
- ◆ Meningkatnya berbagai regulasi hukum dilaksanakan secara efektif
- ◆ Meningkatnya alokasi dana anggaran APBD sektor hukum
- ◆ Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
- ◆ Meningkatnya peran media masa secara proporsional dan seimbang
- ◆ Meningkatnya peran media masa dalam memberikan informasi tentang pembangunan dan kemasyarakatan serta dunia usaha.
- ◆ Meningkatnya peluang investasi media cetak maupun elektronik
- ◆ Meningkatnya pelayanan media masa secara proporsional, terbuka dan bertanggung jawab
- ◆ Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia media masa maupun elektronik
- ◆ Meningkatnya pengembangan media masa maupun elektronik terhadap perkembangan teknologi.



#### e. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pada tahap ke-3 (tiga) ini kaidah penataan ruang mulai dipahami dengan cukup baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha, sehingga berbagai program pembangunan diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Secara lebih spesifik, struktur ruang yang dibentuk menunjukkan terbentuknya keseimbangan perkembangan antara perkotaan dan pedesaan yang didukung oleh prasarana yang memadai, telematika telah berkembang sampai tingkat pedesaan, dan kegiatan ekonomi utama semakin mendukung perkembangan wilayah. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah semakin terwujud. Perkembangan kawasan strategis sebagai penunjang perekonomian wilayah mulai ditingkatkan. Pada tahap ini kemandirian daerah khususnya di pedesaan mulai meningkat perkembangannya yang ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya pemanfaatan ruang dan menurunnya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang
- ◆ Meningkatnya penataan ruang secara kondusif
- ◆ Meningkatnya minat investasi daerah, regional dan nasional terhadap pemanfaatan ruang dengan membuka kawasan industri perkebunan dan industri lainnya.
- ◆ Meningkatnya minat investor pada kawasan ekonomi khusus maupun pusat-pusat produksi.
- ◆ Meningkatnya penanganan kawasan pedesaan terutama kawasan desa tertinggal
- ◆ Meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi unggulan sebagai penunjang perekonomian masyarakat
- ◆ Meningkatnya perkembangan pusat-pusat kegiatan masyarakat
- ◆ Meningkatnya fasilitas dan utilitas umum di pedesaan
- ◆ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman masyarakat diberbagai wilayah pedesaan terutama kawasan desa tertinggal
- ◆ Meningkatnya pemukiman transmigrasi sebagai kawasan pedesaan dan pusat perekonomian agroindustri dan agrobisnis



- ◆ Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap keseimbangan alam
- ◆ Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya pelestarian sumberdaya alam
- ◆ Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di pedesaan bidang lingkungan
- ◆ Meningkatnya penegakan hukum terhadap perusak lingkungan
- ◆ Meningkatnya perbaikan lingkungan yang rusak melalui reboisasi dan rehabilitasi
- ◆ Meningkatnya alokasi dana anggaran APBD terhadap pelestarian sumberdaya alam.

#### **4.5.4. RPJM Keempat (2020 – 2025)**

Berdasarkan pencapaian pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama 3 (tiga) periode sebelumnya menunjukkan pematapan pemerataan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat. Pada tahap Periode keempat konsentrasi pembangunan lebih mengarah pada Mewujudkan kabupaten Bulungan sebagai pusat perekonomian yang unggul dalam bidang agroindustri serta memiliki sumberdaya manusia yang tangguh setara dengan kualitas sumberdaya manusia daerah lainnya skala nasional. Pematapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat secara optimal, peningkatan efisiensi dan efektifitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan pembangunan berkelanjutan bersesuaian dengan tata ruang wilayah berbasis ekologi. Ketergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbaharukan semakin berkurang dan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang serta struktur ekonomi semakin mantap. Dalam RPJM keempat ini kemandirian dan daya daerah yang tinggi dicirikan dengan mantapnya sistem pembangunan, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata daerah lain hingga rata-rata provinsi dan secara umum mampu bersaing dalam lingkup nasional hingga global.



Secara umum kualitas sumberdaya manusia sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan keterampilan yang baik; Perekonomian tumbuh diatas rata-rata daerah lain atau rata-rata Provinsi dengan tingkat ketimpangan dan kesenjangan yang rendah; Prasarana dan sarana dasar telah menjangkau ke segenap pelosok wilayah pedesaan; Pemerintahan sudah berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas yang tinggi serta diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu; Penataan ruang menjadi acuan pembangunan wilayah dengan keseimbangan ekosistem yang baik dan terjaga keanekaragamannya.

#### **a. Pengembangan Sumberdaya Manusia**

Pembangunan yang telah dilaksanakan 3 (tiga) periode sebelumnya merupakan pembangunan terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan, hal ini dapat dilihat hasilnya berupa tersedianya sumberdaya manusia yang mapan dan berkualitas yang memiliki LITBANG, IPTEK dan IMTAQ yang tangguh dan dapat bersaing setara dengan daerah lainnya. Kesehatan masyarakat rata-rata diatas daerah lainnya; Kesejahteraan masyarakat makin meningkat dan semakin mandiri dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, yang ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap partisipasi pada dunia pendidikan dari kota hingga di perdesaan
- ◆ Program wajib belajar 12 tahun semakin mantap sebagai kebutuhan hingga ke pelosok desa
- ◆ Program sekolah unggulan dan sekolah kejuruan sudah berkembang setingkat internasional.
- ◆ Kualitas pendidikan secara umum telah setara dengan rata-rata nasional.
- ◆ Peningkatan kualitas pendidikan sebagai pilar utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia semakin mantap
- ◆ Meningkatnya
- ◆ Kualitas tenaga kerja daerah yang ditopang oleh Litbang dan Iptek semakin meningkat dan setara secara nasional hingga global



- ◆ Kebijakan yang diambil sebagai keputusan didukung oleh hasil penelitian yang valid dan disepakati berbagai pihak.
- ◆ Perkembangan Litbang dan Iptek dalam pemerintahan dan swasta semakin meningkat.
- ◆ Kualitas tenaga kerja semakin meningkat seiring meningkatnya peran Litbang dan iptek sehingga kesetaraannya setingkat nasional
- ◆ Peningkatan kesadaran akan kesehatan dan perilaku hidup sehat sangat menonjol di masyarakat
- ◆ Pemerataan distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis/para medis hingga ke pelosok desa semakin meningkat
- ◆ Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan usia harapan hidup masyarakat Bulungan.
- ◆ Menurunnya angka kematian ibu hamil saat melahirkan
- ◆ Meningkatnya lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat di masyarakat
- ◆ Meningkatnya pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang kurang mampu
- ◆ Kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah semakin meningkat
- ◆ Terpenuhinya kebutuhan tenaga teknik, medis, perencanaan, manajemen, pariwisata dan pengelolaan lingkungan
- ◆ Meningkatnya peran aktif dan partisipatif pemuda terhadap pembangunan yang berkelanjutan (sustainable)
- ◆ Meningkatnya organisasi masyarakat (ORMAS), Seni dan Olah raga yang kesetaraannya sama dengan daerah lain hingga Nasional
- ◆ Meningkatnya kegiatan agama dan kerukunan beragama di tengah masyarakat
- ◆ Meningkatnya pemerataan pembangunan fasilitas keagamaan dari kota hingga ke desa di seluruh wilayah Bulungan.
- ◆ Meningkatnya sekolah keagamaan hingga mampu bersaing dalam skala nasional
- ◆ Meningkatnya pembangunan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan masyarakat



- ◆ Perkembangan sekolah berbasis keagamaan semakin mapan dan terdistribusi ke berbagai Kecamatan.
- ◆ Meningkatnya peran pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat
- ◆ Meningkatnya pelayanan sosial bagi anak asuh, anak terlantar, para lansia dan penyandang cacat.
- ◆ Meningkatnya partisipatif dan peran aktif masyarakat menuju masyarakat yang mandiri

#### **b. Pengembangan Ekonomi Wilayah**

Bila pada tahap ketiga perubahan ekonomi sudah mulai membaik dan mapan, para investor meningkatkan investasinya, ketergantungan pada sumberdaya alam primer semakin berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya, maka pada tahap keempat secara keseluruhan program pembangunan tetap mengacu pada tahapan sebelumnya dengan semakin meningkatkan dan memantapkan program yang sudah ada. Partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan perekonomian juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peran aktif dan partisipasi masyarakat semakin meningkat dalam mengembangkan koperasi dan berbagai UKM hingga menjadi besar. Dalam tahap ini penyediaan kebutuhan pangan dan hortikultura dapat dipenuhi secara mandiri dan sebagian dapat dipasarkan ke wilayah lain. Perkembangan ekonomi wilayah pada tahap keempat ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya perkembangan IPTEK dan LITBANG tanaman pangan hingga ke desa
- ◆ Meningkatnya diversifikasi penyediaan pangan daerah
- ◆ Meningkatnya sentra produksi diberbagai wilayah pedesaan
- ◆ Meningkatnya pemasaran dalam sistem jaringan yang saling menguntungkan antar wilayah
- ◆ Meningkatnya wilayah perkebunan dengan sistem agropolitan hingga ke desa



- ◆ Meningkatnya perkebunan unggulan sebagai aset perekonomian agroindustri
- ◆ Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perkebunan sistem agropolitan
- ◆ Meningkatnya perkembangan infrastruktur pertanian
- ◆ Meningkatnya usaha masyarakat dibidang agrobisnis dan agroindustri
- ◆ Meningkatnya sistem informasi pertanian termasuk informasi pasar hingga ke desa
- ◆ Meningkatnya produksi perkebunan unggulan yang memiliki daya saing di pasaran nasional hingga internasional
- ◆ Meningkatnya hasil perkembangan industri pengolahan pertanian, peternakan dan perkebunan setara dengan hasil nasional
- ◆ Meningkatnya pemukiman masyarakat sebagai kegiatan sentra perkebunan hingga ke pelosok desa
- ◆ Meningkatnya pelestarian hutan lindung dengan sistem pengelolaan hutan lestari di seluruh desa
- ◆ Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan hutan produksi di seluruh wilayah desa
- ◆ Meningkatnya nilai ekonomi hasil hutan produksi sebagai asset perekonomian wilayah
- ◆ Meningkatnya pemberantasan perambahan hutan (illegal logging) di seluruh wilayah kecamatan
- ◆ Meningkatnya peran penegak hukum dalam memberantas perambah hutan tanpa pandang bulu dan pilih kasih
- ◆ Meningkatnya hasil produksi peternakan sebagai ekonomi unggulan di seluruh wilayah pedesaan
- ◆ Meningkatnya diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya hingga ke pelosok desa
- ◆ Meningkatnya ekspor ternak unggulan yang memiliki daya saing di pasaran nasional hingga internasional
- ◆ Meningkatnya penanggulangan penyakit ternak hingga ke pelosok desa



- ◆ Meningkatnya sumberdaya manusia bidang peternakan dan terdistribusi hingga ke wilayah desa
- ◆ Meningkatnya perkembangan jumlah usaha ternak, tenaga ahli bidang peternakan, dan lembaga penelitian dan penyediaan ternak unggulan di seluruh wilayah pedesaan.
- ◆ Meningkatnya ketersediaan bibit ternak unggul dilakukan secara mandiri
- ◆ Meningkatnya hasil produksi perikanan dan kelautan di seluruh wilayah desa khususnya desa di wilayah pesisir
- ◆ Meningkatnya pengelolaan hasil penangkapan ikan di seluruh desa-desa pesisir
- ◆ Meningkatnya sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan hingga terdistribusi ke seluruh wilayah desa khususnya desa pesisir
- ◆ Meningkatnya sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi perikanan dan kelautan di seluruh desa
- ◆ Meningkatnya sentra-sentra produksi perikanan di seluruh wilayah desa
- ◆ Meningkatnya minat perkembangan investasi dan kemitraan terutama bidang perikanan dan kelautan di pedesaan.
- ◆ Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitas kepariwisataan
- ◆ Meningkatnya kualitas dan kuantitas obyek wisata di berbagai kawasan wisata
- ◆ Meningkatnya wisatawan lokal, domestik dan mancanegara berkunjung di obyek-obyek wisata.
- ◆ Meningkatnya pendapat keuangan daerah (PAD) dari sektor kepariwisataan.

### **c. Prasarana Dasar**

Pembangunan pada tahap ke-4 (empat) merupakan tahapan menuju kemapanan bidang transportasi, terutama menjadikan transportasi darat memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antar pusat pemukiman dan pusat produksi sudah secara keseluruhan. Pergerakan orang, barang dan jasa melalui pelabuhan laut dan udara menunjukkan kenaikan yang cukup baik. Kebutuhan akan listrik dan sumber



air untuk masyarakat sudah terpenuhi hingga ke pelosok desa. Hal ini ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya kuantitas, kualitas dan mutu jalan kabupaten dan jalan desa hingga ke seluruh wilayah Bulungan.
- ◆ Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap partisipasi pemeliharaan jalan hingga ke desa
- ◆ Meningkatnya dana pemeliharaan jalan melalui APBD dan swadaya masyarakat pemakai jalan
- ◆ Meningkatnya pengembangan jaringan jalan sebagai sistem intermoda hingga ke desa
- ◆ Meningkatnya akses darat yang menghubungkan pusat pemukiman baik di desa maupun di kota dengan sentra produksi hilir dan hulu
- ◆ Meningkatnya pembangunan jalan di kawasan industri menuju pelabuhan laut dan darat hingga ke sentra produksi unit yang terkecil di pedesaan
- ◆ Meningkatnya pelabuhan laut untuk mendorong perdagangan skala regional dan nasional hingga internasional
- ◆ Meningkatnya pelabuhan skala internasional, regional dan nasional maupun perintis sesuai dengan fungsinya.
- ◆ Meningkatnya deregulasi bidang kepabeanaan hingga di kecamatan
- ◆ Meningkatnya volume perdagangan antar wilayah regional , nasional hingga internasional
- ◆ Meningkatnya Bandar udara sebagai pendorong perdagangan dan investasi
- ◆ Meningkatnya perkembangan barang dan jasa antar wilayah melalui transportasi Udara
- ◆ Meningkatnya pergerakan masyarakat Bulungan menggunakan transportasi udara
- ◆ Meningkatnya pelayanan Bandar udara yang lebih efisien dan efektif
- ◆ Meningkatnya pergerakan barang dan jasa melalui Bandar udara
- ◆ Meningkatnya luasan produktivitas tanah untuk pertanian
- ◆ Meningkatnya sistem irigasi untuk pengairan sawah dalam jangka waktu panjang dan dalam jumlah luasan yang cukup besar



- ◆ Meningkatnya sistem dan teknologi irigasi untuk pertanian
- ◆ Meningkatnya persediaan energi listrik secara mapan
- ◆ Meningkatnya pasokan listrik untuk pemukiman perkotaan dan pedesaan, kawasan industri pada beban puncak
- ◆ Meningkatnya pengembangan sistem terpadu atau *interconnected system* antar daerah dan regional
- ◆ Meningkatnya diversifikasi dan sumber pembangkit listrik serta sistem pengamanannya sesuai dengan standard
- ◆ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menghemat energi listrik

#### **d. Kebijakan Publik, Pemerintahan dan Penegakan Hukum**

Pada tahap keempat ini peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi serta akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin nyata. Efisiensi tingkat pelayanan masyarakat setara dengan efisiensi rata-rata nasional, standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundangan. Kualitas sumberdaya manusia dalam bidang pelayanan masyarakat semakin meningkat. Sumberdaya manusia bidang hukum kualitasnya semakin meningkat, sumber informasi semakin meluas dan mudah di akses oleh masyarakat, yang ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke jenjang yang lebih tinggi hingga di aparat desa.
- ◆ Meningkatnya setiap bidang pelayanan memiliki spesialis keahlian hingga di desa
- ◆ Meningkatnya tingkat pelayanan masyarakat di daerah terpencil, terisolir, pesisir dan pedalaman sesuai standar.
- ◆ Meningkatnya berbagai penyelenggaraan pelatihan, pendidikan bagi aparat hukum dan masyarakat hingga di wilayah desa
- ◆ Meningkatnya berbagai regulasi hukum dilaksanakan secara efektif dan transparan hingga di wilayah desa
- ◆ Meningkatnya alokasi dana anggaran APBD sektor hukum serta swadana masyarakat



- ◆ Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat baik di kota hingga di pedesaan
- ◆ Meningkatnya peran media masa secara proporsional dan seimbang dalam pemberitaan hingga mencakup seluruh wilayah desa
- ◆ Meningkatnya peran media masa dalam memberikan informasi tentang pembangunan dan kemasyarakatan serta dunia usaha ke seluruh wilayah desa
- ◆ Meningkatnya peluang investasi media cetak maupun elektronik hingga ke tataran yang kecil (kecamatan)
- ◆ Meningkatnya pelayanan media masa secara proporsional, terbuka dan bertanggung jawab terhadap analisa social dan ekonomi masyarakat serta pemberitaan lainnya
- ◆ Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia media masa maupun elektronik hingga ke tataran yang terkecil.
- ◆ Meningkatnya pengembangan media masa maupun elektronik terhadap perkembangan teknologi hingga ke tataran yang terkecil.

#### **e. Penataan Ruang dan Lingkungan**

Pada tahap keempat ini kaidah penataan ruang mulai dipahami dengan cukup baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha, sehingga berbagai program pembangunan diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Secara lebih spesifik, struktur ruang yang dibentuk menunjukkan terbentuknya keseimbangan perkembangan antara perkotaan dan pedesaan yang didukung oleh prasarana yang memadai, telematika telah berkembang sampai tingkat pedesaan, dan kegiatan ekonomi utama semakin mendukung perkembangan wilayah. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah semakin terwujud. Perkembangan kawasan strategis sebagai penunjang perekonomian wilayah mulai ditingkatkan. Pada tahap ini kemandirian daerah khususnya di pedesaan mulai meningkat perkembangannya yang ditandai oleh :

- ◆ Meningkatnya pemanfaatan ruang dan menurunnya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang baik di kota maupun di pedesaan.



- ◆ Meningkatnya penataan ruang secara kondusif di seluruh wilayah hingga pedesaan.
- ◆ Meningkatnya minat investasi daerah, regional dan nasional terhadap pemanfaatan ruang dengan membuka kawasan industri perkebunan dan industri lainnya hingga ke pelosok desa.
- ◆ Meningkatnya minat investor pada kawasan ekonomi khusus maupun pusat-pusat produksi hingga ke seluruh wilayah desa terutama desa-desa yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
- ◆ Meningkatnya penanganan kawasan pedesaan terutama kawasan desa tertinggal oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat
- ◆ Meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi unggulan sebagai penunjang perekonomian masyarakat
- ◆ Meningkatnya perkembangan pusat-pusat kegiatan masyarakat
- ◆ Meningkatnya fasilitas dan utilitas umum di pedesaan
- ◆ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman masyarakat diberbagai wilayah pedesaan terutama kawasan desa tertinggal
- ◆ Meningkatnya pemukiman transmigrasi sebagai kawasan pedesaan dan pusat perekonomian agroindustri dan agrobisnis
- ◆ Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap keseimbangan alam
- ◆ Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya pelestarian sumberdaya alam
- ◆ Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di pedesaan bidang lingkungan
- ◆ Meningkatnya penegakan hukum terhadap perusak lingkungan
- ◆ Meningkatnya perbaikan lingkungan yang rusak melalui reboisasi dan rehabilitasi
- ◆ Meningkatnya alokasi dana anggaran APBD terhadap pelestarian sumberdaya alam.

## **BAB V**

### **PENETAPAN FUNGSI DAN PERAN TIAP SUB WILAYAH PEMBANGUNAN**

Setiap wilayah (kecamatan), selain memiliki kesamaan, juga mempunyai perbedaan baik menyangkut potensi dasar, potensi penunjang maupun kendalanya, sehingga setiap kecamatan memiliki ciri dan kekhasan masing-masing. Atas dasar itu fungsi dan peran setiap wilayah ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu :

1. Ketersediaan aksesibilitas terkait dengan simpul-simpul transportasi yang menghubungkannya dengan daerah luar.
2. Potensi sumber daya alam yang dimiliki.
3. Jumlah penduduk dan sebarannya, serta Budaya masyarakat setempat.
4. Karakteristik wilayah, sehingga setiap wilayah mempunyai keunggulan komparatif masing-masing.

Secara keseluruhan arahan pengembangan dibuat berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang, dan kendalanya, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan wilayah dan kesesuaiannya dengan tata ruang wilayah Kabupaten Bulungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka arah pengembangan setiap wilayah kecamatan adalah :



### 5.1. Kecamatan Tanjung Selor

- a. Potensi Dasar : Pertanian pangan dan hortikultura, budidaya perikanan air tawar, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan dan jasa, Pelabuhan sungai dan pelabuhan dagang, Bandara, akses transportasi darat hingga ke provinsi Kaltim, pusat pemerintahan, obyek wisata, pusat perekonomian daerah.
- b. Potensi Penunjang : Sebagai ibu kota kabupaten Bulungan dan calon ibu kota provinsi Kaltara, pusat pelayanan umum, rumah sakit, pendidikan, kesehatan, pasar, hutan kota, dan ketersediaan lahan untuk pengembangan pusat pemerintahan cukup luas.
- c. Kendala : Tidak memiliki potensi kelautan dan pesisir.
- d. Arah Pengembangan : Pengembangan industri, perkebunan, perdagangan, jasa, fasilitas pelayanan dan simpul pariwisata daerah, serta bidang pendidikan dan kesehatan.

### 5.2. Kecamatan Tanjung Palas

- a. Potensi Dasar : Pertanian pangan, sayuran, dan hortikultura, budidaya perikanan air tawar, perkebunan, Peternakan, Kehutanan, bahan tambang, obyek wisata (budaya, sejarah dan alam), transportasi darat dan sungai, dan industri kerajinan rumah tangga
- b. Potensi Penunjang : Ketersediaan lahan produktif yang masih



luas, kawasan agropolitan, memiliki pasar tradisional dan pasar agropolitan, jarak yang dekat dengan ibu kota kabupaten, serta aksesibilitas jalan Trans Kalimantan ke Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Tengah, Sekatak, Sesayap Hulu/Hilir dan Kab. Malinau dan Berau.

- c. Kendala : Masih minim fasilitas, tidak memiliki potensi kelautan dan pesisir,
- d. Arah Pengembangan : Pengembangan pertanian dalam arti luas ke arah agro bisnis dan agro industri, sebagai salah satu kawasan pengembangan agropolitan Pasopati, industri produk-produk pertanian, pengembangan pariwisata,

### **5.3. Kecamatan Tanjung Palas Tengah**

- a. Potensi Dasar : Pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, batu bara, industri kerajinan rumah tangga
- b. Potensi Penunjang : Memiliki potensi laut dan pesisir, memiliki areal pertambakan yang cukup luas, areal sawah pasang surut potensial,
- c. Kendala : Minim fasilitas, aksesibilitas transportasi masih rendah, degradasi kawasan hutan mangrove sebagai dampak pembukaan lahan tambak,
- d. Arah Pengembangan : Pertanian pangan, persawahan padi pasang surut, perikanan tangkap, industri pengolahan dan budidaya, dan akses transportasi darat.



#### 5.4. Kecamatan Tanjung Palas Barat

- a. Potensi Dasar : Pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, Kehutanan, industri kerajinan rumah tangga
- b. Potensi Penunjang : Kawasan hutan, memiliki lahan produktif yang masih luas, transportasi sungai,
- c. Kendala : Minim fasilitas, aksesibilitas masih rendah, belum memiliki akses transportasi darat, tidak memiliki potensi kelautan dan pesisir,
- d. Arah Pengembangan : Pertanian pangan, perkebunan, aksesibilitas transportasi darat,

#### 5.5. Kecamatan Tanjung Palas Utara

- a. Potensi Dasar : Pertanian pangan, sayuran, dan hortikultura, perkebunan, peternakan, pertambangan, obyek wisata, industri kerajinan rumah tangga
- b. Potensi Penunjang : Dekat dengan kota Tarakan sehingga berpotensi untuk dibangun dermaga penyeberangan, memiliki akses jalan darat ke ibu kota kabupaten dan kecamatan sekitarnya, memiliki potensi pesisir,
- c. Kendala : Akses transportasi laut masih terbatas, dan minim fasilitas.
- d. Arah Pengembangan : Industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan, sub terminal bagi sentra-sentra pertanian, kawasan pelabuhan wilayah utara untuk perdagangan regional produk pertanian & perkebunan, akses transportasi penyeberangan.



### 5.6. Kecamatan Tanjung Palas Timur

- a. Potensi Dasar : Pertanian pangan, sayuran dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, Kehutanan, migas, batu bara, obyek wisata alam, industri kerajinan rumah tangga
- b. Potensi Penunjang : Memiliki potensi laut dan pesisir, akses transportasi darat, dekat dengan Kabupaten Berau dan kota Tarakan, sebagai salah satu kawasan pengembangan agropolitan Pasopati, Kawasan Ekonomi Khusus Industri (KEKI).
- c. Kendala : Akses transportasi laut masih terbatas, dan minim fasilitas.
- d. Arah Pengembangan : Kawasan perdagangan ekspor, kawasan pelabuhan laut dan udara, kawasan industri, industri pengolahan, jasa, dan pariwisata dan pengembangan kawasan agropolitan.

### 5.7. Kecamatan Sesayap

- a. Potensi Dasar : Pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, Kehutanan, bahan tambang, dan obyek wisata, industri kerajinan rumah tangga
- b. Potensi Penunjang : Memiliki akses jalan darat ke ibu kota kabupaten, transportasi sungai, dekat dengan Kabupaten Malinau, calon ibu kota Kabupaten Tana Tidung, lahan produktif masih luas,



- c. Kendala : Transportasi laut terbatas dan minim fasilitas, tidak memiliki potensi kelautan dan pesisir,
- d. Arah Pengembangan : Agro industri dan agro bisnis pertanian pangan dan perkebunan, pertambangan.

#### **5.8. Kecamatan Sesayap Hilir**

- a. Potensi Dasar : Pertanian pangan, perkebunan, perikanan, Kehutanan dan bahan tambang, industri kerajinan rumah tangga
- b. Potensi Penunjang : Lahan produktif masih luas, transportasi sungai,
- c. Kendala : Minim fasilitas, akses transportasi laut terbatas, jumlah penduduk sedikit,
- d. Arah Pengembangan : Agroindustri dan agrobisnis pertanian dan perkebunan,

#### **5.9. Kecamatan Peso**

- a. Potensi Dasar : Pertanian tanaman pangan (padi ladang), perkebunan, Kehutanan, bahan tambang (emas), industri kerajinan rumah tangga
- b. Potensi Penunjang : Berbatasan dengan Kabupaten Malinau, sebagai salah satu kawasan pengembangan agropolitan Pasopati, lahan produktif masih luas, transportasi sungai.
- c. Kendala : Tidak memiliki potensi kelautan dan pesisir, kondisi geografis relatif sulit, aksesibilitas



transportasi terbatas, belum memiliki akses jalan darat, minim fasilitas, jauh dari ibu kota kabupaten, dan jumlah penduduk sedikit.

- d. Arah Pengembangan : Pengembangan kawasan agropolitan, aksesibilitas transportasi darat,

#### **5.10. Kecamatan Peso Hilir**

- a. Potensi Dasar : Pertanian pangan (padi ladang), Kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri kerajinan rumah tangga
- b. Potensi Penunjang : Transportasi sungai, lahan produktif masih luas, kawasan agropolitan Pasopati,
- c. Kendala : Tidak memiliki potensi kelautan dan pesisir, aksesibilitas transportasi masih terbatas, belum memiliki akses jalan darat, minim fasilitas, dan jauh dari ibu kota kabupaten, jumlah penduduk sedikit,
- d. Arah Pengembangan : Pengembangan kawasan agropolitan, aksesibilitas jalan darat,

#### **5.11. Kecamatan Tana Lia**

- a. Potensi Dasar : Pertanian pangan (padi sawah) , perikanan, perkebunan (kelapa dalam),
- b. Potensi Penunjang : Memiliki potensi kelautan dan pesisir, memiliki potensi pertambangan batu bara dan minyak
- c. Kendala : Aksesibilitas transportasi masih terbatas, tidak memiliki akses transportasi darat,
- d. Arah Pengembangan : Pengembangan kawasan transmigrasi dan obyek wisata bahari



### 5.12. Kecamatan Bunyu

- a. Potensi Dasar : Minyak bumi dan gas alam, batu bara, industri pengolahan, dan obyek wisata, perkebunan kelapa, perikanan, peternakan, serta hutan lindung.
- b. Potensi Penunjang : Memiliki potensi kelautan dan pesisir, transportasi laut, memiliki industri pengolahan methanol,
- c. Kendala : Lahan produktif untuk pertanian terbatas,
- d. Arah Pengembangan : Industri pengolahan, sub terminal perikanan, perdagangan dan jasa, dan pariwisata.

### 5.13. Kecamatan Sekatak

- a. Potensi Dasar : Perkebunan, peternakan, perikanan, Kehutanan dan bahan tambang, industri kerajinan rumah tangga
- b. Potensi Penunjang : Akses transportasi darat ke ibu kota kabupaten dan wilayah sekitarnya,
- c. Kendala : Minim fasilitas, aksesibilitas transportasi laut terbatas,
- d. Arah Pengembangan : Industri pengolahan produk perkebunan, bahan tambang,

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2005 – 2025 yang berisikan visi, misi, strategi dan arah pembangunan Kabupaten Bulungan merupakan pedoman bagi Pemerintah dan Masyarakat untuk secara bersama-sama menyelenggarakan Pembangunan Jangka Panjang 20 (dua puluh) tahunan ke depan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bulungan harus didukung oleh komitmen dan kepemimpinan daerah yang berkualitas dan demokratis, pemerintahan yang baik dan bersih, konsistensi kebijakan pemerintah daerah, keberpihakan kepada rakyat, dan kontrol serta pengawasan yang lebih intensif.